

## **POLITISASI IDENTITAS DALAM KOMPETISI PEMILU DI INDONESIA PASCA 2014**

**Ari Ganjar Herdiansah**

*Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia, ari.ganjar@unpad.ac.id*

---

### **ABSTRACT**

*Identity has always been a political commodity driven by politicians in the electoral competition in Indonesia. This paper analyzes how the politicization of identity strengthens after the 2014 election and explains its potentials for political instability and national integration. The data used in this study gathered from the literature review and news analysis of identity and election, especially in the post-2014. This paper reveals that the weak party institutionalization encourages politicians to collaborate with civil society actors to reproduce identity issues for the sake of elections winning. The personalization of the party by its leader connected to a network of identity mass bases run the politicization in a natural setting. The further development of the politicization of the identity has the potential to divert substantial political issues such as government programs and public interests. In the economic field, political upheaval that involving the masses would weaken the confidence of investors and business actors in propelling the economic wheels. Also, political discord based on identity could damage social capital and decrease people's ability to produce its best endeavor.*

### **Keywords**

Election, identity politics, political party, national stability

---

## ABSTRAK

*Identitas senantiasa menjadi komoditas politik yang digulirkan oleh para politikus dalam pertarungan pemilu di Indonesia. Tulisan ini menganalisis bagaimana politisasi identitas menguat pasca pemilu 2014 dan menjelaskan potensi-potensinya terhadap instabilitas politik dan integrasi bangsa. Data-data yang digunakan berasal dari kajian pustaka dan analisis berita-berita terkait dengan pemilu dan identitas, terutama pasca 2014. Tulisan ini mengungkapkan bahwa lemahnya institusionalisasi partai mendorong para politisi berkolaborasi dengan aktor-aktor civil society untuk mereproduksi isu-isu identitas demi kepentingan pemilu. Personalisasi partai oleh figur pemimpinnya yang terhubung dengan jejaring basis massa berdasarkan identitas menjadikan politisasi identitas seolah-olah berjalan alamiah. Perkembangan politisasi identitas lebih lanjut berpotensi mengalihkan persoalan politik substansial seperti program pemerintah dan kepentingan publik. Di bidang ekonomi, kegaduhan politik yang melibatkan massa akan melemahkan kepercayaan investor dan pelaku usaha dalam menggerakkan roda perekonomian. Selain itu, pertentangan politik berdasarkan identitas dapat merusak modal sosial dan menurunkan kapasitas masyarakat dalam menghasilkan pencapaian terbaiknya.*

### Kata Kunci

Pemilu, Politik identitas, Partai Politik, Stabilitas nasional

---

### 1. Pendahuluan

Politik pemilu pasca 2014 ditandai dengan menguatnya politisasi identitas. Isu-isu yang berkaitan dengan etnik, agama, atau ideologi tertentu digunakan oleh sebagian elite politisi untuk membangun citra negatif lawan-lawan politiknya (Mietzner, 2014). Maraknya diskursus yang mengaitkan isu agama dan politik pemilu pasca Pilpres 2014 serta gelombang unjuk rasa yang menyertai Pemilihan Gubernur Jakarta 2017 merupakan indikasi menguatnya politisasi identitas menuju pemilu 2019 (Herdiansah, Junaidi, & Ismiati, 2017). Demokrasi memang memberikan ruang bagi setiap kelompok identitas untuk turut berpartisipasi dan mencapai

kepentingannya. Akan tetapi, politisasi identitas juga berpeluang melemahkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri apabila menjurus pada perpecahan yang menyebabkan terjadinya instabilitas politik.

Politisasi (*politicization*) merupakan proses akuisisi kapital politik oleh suatu kelompok, institusi, atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai kepentingan dalam mencapai atau mempertahankan kekuasaan (Adediji 2016: 115). Sementara yang dimaksud identitas sesuai dengan pengertian yang berlaku dalam ilmu politik dan sosiologi, yakni kategori sosial di mana orang-orang yang ditempatkan pada suatu kategori diasumsikan memiliki 'identitas' yang sama. Identitas kemudian

digunakan untuk mencapai kepentingan tertentu dari kelompok yang bersangkutan (Burke 2003: 1). Politisasi identitas dalam artikel ini diartikan sebagai upaya untuk menggunakan, mengeksploitasi, atau memanipulasi identitas apakah itu berbasis agama, etnik, atau penganut ideologi tertentu untuk menimbulkan opini atau stigma dari masyarakat dengan tujuan kepentingan politik.

Artikel ini berupaya menjelaskan mengapa politisasi identitas dalam pemilu menguat pasca 2014 dan bagaimana potensi-potensinya terhadap instabilitas politik dan integrasi bangsa. Studi ini berasumsi bahwa politisasi identitas tidak terlepas dari masih lemahnya institusionalisasi partai politik di Indonesia (Ufen, 2008), sehingga mendorong para politisi berkolaborasi dengan aktor-aktor *civil society* untuk mereproduksi isu-isu identitas demi kepentingan pemilu. Salah satu faktor lemahnya institusionalisasi partai politik, yakni personalisasi partai politik oleh figur pemimpinnya yang terhubung dengan jejaring basis massa yang tidak jarang merepresentasikan identitas tertentu (Buehler, 2009: 55). Hal tersebut menjadikan politisasi identitas semakin terfasilitasi dalam berbagai ajang pemilu.

Perkembangan politisasi identitas dalam pemilu di Indonesia patut dicermati, karena praktik tersebut berpotensi mengarah pada dampak yang berlawanan dengan tujuan demokrasi itu sendiri. Perjuangan solidaritas kelompok di sisi lain juga mengandung upaya mempromosikan ketidaksetaraan hak sipil dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi (Tornquist, 2009: 7). Padahal, dalam kehidupan yang demokratis, partisipasi dari seluruh institusi sosial

diperlukan untuk mencapai kepentingan-kepentingan publik yang adil (Bozeman, 2007: 109). Lebih lanjut, politisasi identitas yang melibatkan gerakan-gerakan massa akan mengganggu roda perekonomian. Kondisi sosial politik yang tidak stabil akan mengikis kepercayaan investor dan menyulitkan pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Pertentangan politik berdasarkan identitas pun dapat merusak modal sosial, sehingga menurunkan kapasitas masyarakat dalam menghasilkan pencapaian-pencapaian terbaiknya.

## 2. Metode Penelitian

Dengan menganalisis proses-proses politisasi identitas dalam pemilu yang dimediasi oleh para aktor politik dan masyarakat sipil, pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif. Studi literatur digunakan terutama untuk menelusuri perkembangan politisasi identitas dalam politik pemilu dengan penekanan pasca 2014. Pengamatan terhadap berita-berita yang berkaitan dengan isu-isu identitas dalam pemilu pasca 2014 dilakukan untuk menggali indikasi-indikasi berlakunya politisasi identitas. Dalam upaya memberikan gambaran mengenai akibat-akibat yang dapat muncul dari politisasi identitas dalam pemilu di Indonesia, studi ini merujuk pada literatur-literatur politik identitas yang kemudian dijadikan perspektif untuk memahami gejala-gejala serupa.

## 3. Perspektif Teori

Politik identitas merupakan sikap politik yang fokus pada sub kelompok dan merujuk pada aktivisme atau pencarian

status yang dilandaskan pada kategori ras, gender, etnisitas, orientasi budaya, dan identifikasi politik lainnya. Isunya pada orientasi politik kelompok sub-nasional melihat perbedaan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Di luar itu, politik identitas juga dapat mengacu pada identitas kebangsaan atau identitas diri (*self-identity*) yang melintasi batas-batas etnik atau nasionalisme, misalnya isu wanita dan imigran (Wiarda, 2014).

Politik identitas adalah ciri yang tidak dapat dihindari dari demokrasi liberal, sebab sistem politik itulah yang memberikan ruang bagi tumbuhnya upaya-upaya kelompok dalam mengartikulasikan kepentingan dan tujuannya. Namun identitas dalam demokrasi memuat masalah lain, karena identitas kelompok lebih bersifat memberi batasan ketimbang membebaskan individu (Gutmann, 2003: 1). Selain itu, dalam demokrasi deliberatif yang mengutamakan dialog, klaim politik identitas tidak selalu mendukung nilai-nilai kebebasan dan keadilan, tetapi juga klaim yang dapat mengancam atau merusak nilai-nilai tersebut (Eisenberg and Kymlicka 2011: 2).

Permasalahan lainnya dari perjuangan politik identitas ialah siapa yang memberikan hak kepada kelompok yang mengatasnamakan identitas, misalnya agama atau etnis? Sementara etnis dan agama adalah konsep yang dibangun secara sosial. Artinya, konsepsi dan batasan identitas dapat ditafsirkan secara beragam, sehingga menimbulkan ambiguitas terkait kepentingan dan tujuan siapakah yang diemban dalam perjuangan politik identitas? (Ingram 2004: 55).

Karena itu, gerakan perjuangan identitas saat ini sangat jarang terwujud

atas ekspresi spontan. Para politisi saat ini memanipulasi politik identitas demi kepentingannya, misalnya kandidat harus merepresentasikan sub-sub kelompok yang ada di masyarakat (Wiarda, 2014). Elite politik memainkan peran penting dalam menentukan tujuan dan taktik. Klaim-klaim identitas seringkali dibentuk dan disalaharahkan oleh dinamika intra dan inter kelompok. Pada tingkat intra kelompok, elite dapat membingkai tradisi-tradisi kelompok untuk memelihara kekuasaan dan otoritasnya menghadapi potensi pertentangan baik dari dalam maupun luar kelompok. Elite-elite minoritas seringkali mereproduksi perasaan diskriminasi sebagai alasan perjuangan (Eisenberg and Kymlicka 2011: 3).

Elite politik sering bertindak seperti entrepreneur melakukan strategi-strategi yang oportunistik tentang bagaimana memobilisasi identitas untuk meningkatkan status baik dalam masyarakat yang lebih luas maupun dalam kelompoknya. Politisasi identitas tidak hanya berwujud sebagai ekspresi perasaan atau pandangan kelompok tentang pengalaman tertentu misalnya diskriminasi, tetapi juga sebagai kendaraan instrumental dan oportunistik bagi elite yang orientasi kepentingan pribadi (Weinstock, 2006).

Ketika politik identitas dimanipulasi oleh kepentingan elite politik, maka terdapat beberapa risiko yang dapat mengancam kehidupan demokrasi. Terlebih lagi, dalam keadaan heterogenitas etnik yang seringkali menjadi hambatan bagi konsolidasi demokrasi (Birnie, 2007: 61). Pertama, politik identitas membentuk hierarki dalam kelompok-kelompok minoritas. Ketika tuntutan-tuntutan

dari kelompok politik identitas dipenuhi para elitennya semakin berani untuk meningkatkan tekanan terhadap para anggota kelompoknya dalam membela nilai-nilai tradisional di ruang publik. Sebaliknya, ketika tuntutan kelompok politik identitas tidak dipenuhi mereka dapat memicu “*cultural defensiveness*” yang juga memperkuat elite-elite konservatif yang mendorong para anggota kelompok untuk menaati tanda-tanda identitas secara ketat demi melindungi kelompok dari tekanan atau ancaman pihak luar (Weinstock, 2006).

Kedua, risiko gerakan politik identitas dikooptasi oleh negara. Politik identitas menjadi obat darurat untuk menyelesaikan masalah sosial yang kritis, termasuk rasisme, kemiskinan, dan perampasan (*dispossession*). Dampaknya, kelompok akan menonjolkan sisi primordialisme dan aspek sakral secara berlebihan, dan meningkatkan stereotipe pada kelompok-kelompok lawannya. Para pejabat pemerintah cenderung dipengaruhi pandangan-pandangan stereotipe dalam memutuskan kebijakan atau perkara. Ketiga, itu, komunitas demokratis akan dilemahkan karena orang-orang mengacu pada basis-basis yang membedakan mereka daripada menyatukan mereka. Modal sosial yang berbasis pada saling percaya sulit dicapai akibat fragmentasi etnik dan keagamaan. Keempat, identitas adalah pokok yang sulit untuk didialogkan secara rasional serta *non-negotiable*, sehingga berpotensi menciptakan *deadlock* dan konflik terbuka (Weinstock, 2006).

Alcoff and Mohanty (2006: 2) menunjukkan bahwa pertarungan politik yang memanipulasi dengan isu-isu identitas akan menyebabkan elite-elite

politik cenderung mudah menggunakan isu-isu yang dapat memobilisasi massa secara efektif. Selain itu, penggunaan isu-isu identitas juga menggambarkan ketidakmampuan partai-partai politik untuk menunjukkan kinerja secara substantif, sehingga pertanyaan lebih diarahkan pada isu-isu non substansial. Isu-isu substansial lebih dipahami oleh masyarakat dibandingkan dengan isu-isu kebijakan.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Institusionalisasi Politik dan Politisasi Identitas di Indonesia

Perubahan politik pasca Suharto ditandai dengan pembangunan institusi-institusi demokrasi, di mana dalam hal ini partai politik yang tumbuh subur berkompetisi pada pemilu yang adil dan terbuka untuk meraih kekuasaan. Namun, demokrasi prosedural saja tidak cukup untuk memperbaiki kualitas kehidupan politik, tetapi juga diperlukan partai politik yang terlembagakan dengan baik, sehingga memiliki kapasitas untuk menghubungkan pemilih dengan pemilu. Institusionalisasi merupakan proses di mana organisasi atau praktik-praktik berpolitik menjadi stabil dan dipatuhi secara luas. Para aktor membangun harapan-harapan, orientasi, dan perilaku berdasarkan premis dasar bahwa organisasi akan mampu mengatasi masalah atau mencapai tujuan di masa depan (Mainwaring & Scully, 1995: 3).

Nampaknya, institusionalisasi partai politik masih menjadi persoalan. Partai-partai mengandalkan figur atau tokoh-tokoh yang memiliki akses terhadap simpul-simpul basis massa dalam rangka memperoleh asupan suara yang maksimal. Simpul-simpul itu biasanya dibangun berdasarkan klan dan hubungan

patronase elite lokal, sehingga pada gilirannya kemudian institusionalisasi partai tersebut tetap lemah dan tidak banyak membantu proses demokratisasi politik (Buehler & Tan, 2007: 65).

Buehler (2013: 79) mengatakan bahwa lemahnya institusionalisasi partai, terlebih lagi di tingkat daerah, mendorong para politisi lokal bersandar pada broker-broker suara demi meraih kemenangan pemilu. Akibatnya, partai politik menjadi terpersonalisasikan pada figur lokal. Dinamisasi tersebut meningkatkan pertukaran di antara elite politik pusat, elite politik lokal, dan elite-elite simpul massa lokal. Sebagian elite simpul lokal tersebut mengandalkan kelompok berbasis keagamaan yang juga seringkali bersifat radikal. Lebih lanjut Buehler juga menekankan pembuatan kebijakan yang terkait dengan gerakan sosial di daerah tidak bertalian dengan partai politik dan opini publik, tetapi kelompok-kelompok informal yang tidak terorganisir yang beroperasi di luar politik institusional.

Dalam konteks pemilu di Indonesia, lemahnya insitusionalisasi partai berkelindan dengan penggunaan identitas atau aliran sebagai komoditas politik. Berdasarkan konsepsi Geertz (1976), sederhananya aliran dibagi dalam tiga, yaitu santri yang preferensi politiknya condong pada partai Islam, abangan yang preferensi pilihannya pada partai sekuler kiri, dan priayi yang identik dengan aristokrat Jawa. Semenjak pemilu 1999, partai-partai politik dapat dipetakan dalam spektrum ideologi nasionalis sekuler hingga Islam konservatif. PDIP yang didirikan oleh Megawati dikenal dalam kategori sekuler kiri, karena secara sejarah mereka adalah gabungan partai-partai nasionalis, sosialis-kiri, dan Kristen

(Singh, 2003). Sementara Partai Golkar yang juga merepresentasikan partai nasionalis sekuler tetapi diwarnai dengan gaya aristokrasi Jawa. Namun, pada 1990an kader-kader pemimpin partai ini juga diisi oleh tokoh-tokoh organisasi sipil Islam, seperti HMI, sehingga dipandang cenderung bersahabat dengan kepentingan dan aspirasi umat Islam (Baswedan, 2004).

Ketika aliran yang juga menggambarkan identitas politik mempengaruhi spektrum partai, Liddle dan Mujani justru menyatakan bahwa identifikasi partai berbasis latar belakang sosiologis tidak lagi berlaku pada pemilu pemilu 1999 dan 2004. Perilaku memilih lebih ditentukan oleh figur pemimpin, sehingga konsep aliran pada spektrum partai tidak berkorelasi dengan keterpilihan partai. Dari keseluruhan responden dalam surveinya itu, sekitar 88 persen yang memilih Megawati akhirnya memilih PDIP, 89 persen yang memilih Habibie memilih Partai Golkar, 95 persen yang memilih Abdurrahman Wahid memilih PKB, dan 75 persen yang memilih Amien Rais ternyata memilih PAN. Pola yang sama terdapat pada hasil survey pemilu 2004, di mana Yudhoyono mendapatkan dukungan dari 82 persen pemilih Partai Golkar, 78 persen pemilih PPP, dan bahkan 29 persen pemilih PDIP. Intinya, dalam konteks pemilu faktor identifikasi terhadap figur pemimpin atau elite telah mendominasi pengaruh pemilih ketimbang politik aliran (Permata & Kailani, 2010).

Namun, King (2003) menunjukkan pendapat yang berbeda. Berdasarkan kajian perbandingan hasil pemilu 1955 dengan 1999, King menemukan pola yang serupa di mana para pemilih terkumpul

pada partai-partai dengan basis identitas sosial keagamaan. Meskipun dua pemilu tersebut berjarak lebih dari empat dekade, preferensi pemilih partai Islam (PKB, PAN, dan PPP) pada 1999 ternyata sama dengan pemilih partai Islam di pemilu 1955 (Masyumi, Partai NU, PSII). Di sisi lain, para pemilih sekular yang memilih PNI dan PKI pada pemilu 1955 memiliki kemiripan dengan pemilih Partai Golkar dan PDIP pada pemilu 1999. Hal tersebut bermakna identitas yang direpresentasikan melalui konsep aliran masih berlaku dalam pemilu, tetapi kemudian dipengaruhi atau dimediasi oleh faktor kolaborasi figur ketika konteksnya adalah pemilihan presiden.

Dalam peristiwa pemilihan presiden, partai-partai yang berkoalisi tidak terlalu mempertimbangkan batasan ideologi. Akan tetapi, unsur representasi identitas pemilih pada masing-masing calon kandidat cukup mudah diidentifikasi. Pada putaran pertama pemilihan presiden 2004, terdapat lima pasang calon yaitu pertama, Wiranto-Solahudin Wahid yang diusung Partai Golkar, merepresentasikan unsur militer dan Islam/NU. Kedua, Megawati-Hasyim Muzadi yang diusung PDIP merepresentasikan nasionalis sekuler dan Islam/NU. Ketiga, pasangan Amin Rais-Siswono yang diusung PAN merepresentasikan Islam/Muhammadiyah dan sekuler kiri. Keempat, Yudhoyono-Jusuf Kalla yang diusung koalisi Partai Demokrat, PBB dan PKPI merepresentasikan militer dan nasionalis Islam. Kelima, pasangan Hamzah Haz-Agung Gumelar yang diusung PPP merepresentasikan Islam/NU dan militer.

Upaya-upaya meraih dukungan basis massa berdasarkan identitas berlangsung

dalam proses meraup suara. Masih dalam konteks Pilpres 2004, misalnya, Megawati berusaha memperoleh sokongan dari kalangan Islam tradisional dengan menggaet Hasyim Muzadi sebagai kandidat wakil presiden. Tetapi, dukungan NU terpecah setelah Abdurrahman Wahid menyiratkan dukungannya terhadap Yudhoyono (Mietzner, 2009). Kemenangan Yudhoyono-Kalla tidak lepas dari keberhasilannya dalam menyatukan basis dukungan Muslim tradisional, yakni dari kalangan NU, dan Muslim modernis, yang direpresentasikan oleh PAN dan PKS.

Pada Pilpres 2009, persona figur semakin mendominasi preferensi pemilih. Proyeksi identitas berdasarkan aliran tidak begitu kentara pada figur kandidat. Pada pasangan Yudhoyono-Budiono, misalnya, kedua sosok tersebut tidak menandakan secara jelas mewakili golongan mana, terutama Budiono yang berasal dari kalangan teknokrat. Dua pasangan lainnya, Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto, juga tidak begitu merepresentasikan identitas yang spesifik, kecuali Megawati yang lekat dengan golongan sekularis kiri. Akan tetapi, pengelompokan partai pendukung kandidat sedikit banyak menggambarkan preferensi pilihan. Terutamanya pada pasangan Yudhoyono-Budiono yang didukung oleh Partai Demokrat, PKS, PKB, PKNU, PPP dan PBB, di mana partai-partai berbasis Islam hadir di sana.

Faktor utama kemenangan Yudhoyono-Budiono adalah elektabilitas Yudhoyono yang kokoh di berbagai polling (Firmanzah, 2011). Di saat yang bersamaan, suara partai-partai Islam dalam pemilu legislatif 2009 justru mengalami penurunan yaitu menjadi

29 persen dari 37 persen di pemilu sebelumnya. Menurut Aspinall (2010), kemunduran elektoral partai-partai Islam dalam pemilu 2009 menandakan lunturnya politik aliran. Menguatnya peran media massa dan model-model kampanye yang modern dan kreatif melemahkan perilaku pemilih berdasarkan identitas kolektif. Partai-partai dengan citra identitas kolektif yang kuat, seperti PDIP dan PKB, mengalami penurunan suara yang drastis. Indikasi lain melemahnya politik aliran adalah berhasilnya partai-partai yang menggunakan pesona personal yang kuat, seperti Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Periode 2009 menunjukkan kebangkitan pola pemilih individual yang merujuk pada karakter kandidat.

Meskipun konsepsi aliran tidak lagi sesuai untuk menjelaskan konfigurasi Pilpres 2009, politisasi identitas sebenarnya masih digunakan oleh para kandidat Pilpres 2009. Seperti yang tercermin sikap bersahabat Yudhoyono terhadap partai-partai Islam dan ormas-ormas Islam menunjukkan bahwa representasi identitas masih dianggap sebagai variabel penting dalam menjaga keseimbangan dukungan politik terhadap pemerintah. Meskipun partai-partai saat ini telah terdorong pada skema tindakan pragmatis, tetapi pada saat yang bersamaan mereka pun tidak terlepas dari pemanfaatan isu-isu dan identitas agama untuk menarik simpati pemilih. Partai-partai Islam akan terus berupaya untuk menyimbolkan diri, walau tidak membatasi diri, sebagai representasi kalangan santri dan orientasi kebijakan yang pro terhadap syariat atau pro mendudukkan Islam dalam politik (Pepinsky, Liddle, & Mujani, 2012). Bertahannya PDIP sebagai partai

non-pemerintah selama 10 tahun dan cenderung bersikap sebagai partai oposisi memberikan dampak sulitnya jalinan konsolidasi basis massa Islam dengan basis massa nasionalis sekuler dan turut mendorong tanda-tanda politisasi identitas menjelang pemilu 2014.

#### **4.2 Politisasi Identitas pasca Pemilu 2014**

Fenomena terjadinya politisasi Identitas berbasis agama dan etnik semakin menguat menjelang dan pasca pemilu 2014. Kubu-kubu pendukung calon presiden pada masa itu saling membentuk poros untuk melawan satu sama lain melalui identitas yang melekat pada karakter personal kandidat yang kemudian diteruskan pada komponen-komponen pendukungnya. Polarisasi poros kandidat, antara Prabowo dan Jokowi terlihat menyiratkan kalangan yang dapat dikategorikan berdasarkan identitas agama. Partai-partai berbasis Islam banyak yang mendukung pendukung Prabowo-Hatta, seperti PKS, PAN, dan PPP (kubu Djan Faridz). Sementara partai berbasis Islam pendukung Jokowi-Jusuf Kalla hanya PKB dan PPP (kubu Romahurmuzy). Partai pengusung utama Jokowi-Jusuf Kalla, yakni PDIP yang merepresentasikan nasionalis sekuler-kiri memberikan warna tersendiri atas kontestasi pemilu dengan nuansa aliran (Herdiansah, Putri, Ashari, & Maduratmi, 2017).

Nuansa identitas-aliran, Islam berhadapan dengan nasionalis sekuler, memenuhi diskursus rivalitas politik terutama di media sosial. Sepanjang kampanye Pilpres 2014, berbagai kampanye hitam yang memojokkan lawan politik seringkali menyinggung



karakteristik agama dan etnik kandidat. Misalnya, tuduhan bahwa Jokowi adalah seorang yang lahir dari simpatisan PKI dan keturunan China yang anti-islam. Sementara Prabowo diidentikkan dengan sosok militer diktator dan didukung oleh kelompok Islam radikal serta intoleran.

Setelah Pilpres 2014 usai dan dimenangkan oleh Jokowi-Jusuf Kalla, sentimen berbasis agama dan etnik kepada Jokowi terus bergulir. Presiden (*caretaker*) PKS pada waktu itu, Anis Matta, bahkan menggambarkan suasana politik pasca 2014 sebagai era pertarungan ideologi konservatif melawan liberalisme (Kompas.com, 21 September 2014). Konsolidasi politik yang tersendat di awal pemerintahan turut mendorong instabilitas politik, di mana kondisi tersebut dimanfaatkan oleh kekuatan oposisi untuk terus menyerang kelemahan pemerintah. Isu-isu yang bersinggungan dengan keagamaan dengan cepat mendapatkan reaksi yang menganggap pemerintah seolah-olah tidak simpati terhadap umat Islam. Seperti ketika Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengusulkan untuk menghapus kolom agama. Tindakan tersebut kemudian mendapatkan reaksi dari kelompok-kelompok keagamaan. NU dan Muhammadiyah keberatan dengan penghapusan kolom agama karena dikhawatirkan kebebasan menjadi liar (Republika.co.id, 12 Juni 2014).

Politisasi identitas dalam pemilu mendapatkan momentum pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Pertarungan memperebutkan kursi DKI 1 kemudian dipenuhi oleh sentimen agama semenjak Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok, dituduh melakukan penistaan terhadap Islam ketika melakukan pidato kedinasan

di Kepulauan Seribu pada September 2016. Setelah potongan video pidato tersebut tersebar luas di media sosial, berbagai kelompok Islam melakukan aksi unjuk rasa baik di Jakarta maupun di daerah-daerah. Aksi yang diikuti oleh ratusan ribu hingga jutaan peserta itu dinamai sebagai Aksi Bela Islam yang dilakukan tiga kali, yaitu pada 17 Oktober 2016, 4 November 2016, dan 2 Desember 2016. Mereka menuntut pemerintah supaya proses hukum terhadap Ahok atas tuduhan penistaan agama ditegakkan. Mereka antara lain Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (PNPF-MUI), dan puluhan organisasi Islam lainnya (Herdiansah, Junaidi, et al., 2017).

Gelombang unjuk rasa yang terjadi terus menerus tidak hanya ditujukan kepada Ahok, tetapi juga Jokowi karena dianggap sebagai pendukung utama Ahok. Seiring dengan tekanan besar dari berbagai daerah, elektabilitas Ahok terus menyusut (Detik.com, 1 Desember 2016). Pada akhirnya, pemilihan gubernur dimenangkan oleh pasangan Anies-Sandi dengan yang didukung oleh Partai Gerindra dan PKS jumlah suara 57,96 persen (Merdeka.com, 5 Mei 2017). Kedua partai tersebut selama itu konsisten berseberangan dengan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Selain karena faktor limpahan pendukung Agus-Silvy dan sifat tenang pada diri Anies-Sandi, kemenangan Anies-Sandi pada Pilgub DKI 2017 juga tidak terlepas dari sikap sebagian besar pemilih yang mementingkan agama dan didukung oleh kekuatan kelompok-kelompok Islam (BBC.com, 27 April 2017).

Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa kemenangan Anies-Sandi bukan semata-mata karena politisasi identitas. Peristiwa perseteruan Ahok dan pendukungnya dengan kelompok-kelompok Islam, sehingga berujung di pengadilan atas kasus penistaan agama merupakan faktor pemantik politisasi identitas pada Pilgub Jakarta. Artinya, politisasi identitas tidak berdiri sendiri melainkan saling terkait dengan peristiwa dan faktor lainnya, seperti adanya perasaan tidak nyaman dari sebagian masyarakat dan marginalitas kelompok tertentu. Pada gilirannya, kondisi itulah yang dapat dimanfaatkan oleh elite-elite politik untuk menggunakan isu-isu identitas dalam rangka memaksimalkan perolehan suara.

Keberhasilan kekuatan kelompok-kelompok Islam pada Pilgub Jakarta 2017 membentuk suatu pola yang dapat direplikasi pada ajang pemilu selanjutnya, yakni Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019. Tetapi tentu saja politisasi identitas tidak serta merta dapat diterapkan. Apabila pihak petahana dapat menjaga isu-isu identitas supaya tidak sampai terangkat di masyarakat, pihak oposisi nampaknya akan mengalami kesulitan menggunakan isu-isu tersebut. Sebab, mobilisasi massa yang jumlahnya besar dapat terwujud apabila terdapat pemicu yang disadari bersama dan menyentuh aspek yang paling esensial dari kehidupan masyarakat.

### **4.3 Dampak Politisasi Identitas terhadap Stabilitas Politik dan Integrasi Bangsa**

Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, politisasi identitas seperti telah menemukan momentum

pasca pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Kemenangan Anies-Sandi seolah-olah membuktikan bahwa politisasi identitas kembali dapat dijadikan kekuatan elektoral yang efektif untuk melawan kekuatan politik yang dominan. Pola tersebut berpotensi untuk digunakan pada Pilkada serentak 2018, terutama di daerah-daerah berpenduduk banyak seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebab, kemenangan di daerah-daerah tersebut dianggap dapat membuka peluang yang lebih lebar bagi kemenangan pemilu legislatif dan Pilpres 2019.

Mobilisasi kekuatan oposisi dapat berjalan dengan massif apabila mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Salah satu kunci dukungan itu adalah apabila pihak oposisi mampu menjadi kekuatan yang menampung atau merepresentasikan keluhan yang dirasakan secara luas oleh masyarakat. Karena itu, isu-isu yang sensitif, termasuk isu-isu identitas etnik dan keagamaan, dapat dijadikan sebagai modal bagi kekuatan oposisi untuk meraih simpati dari masyarakat. Pada berbagai kesempatan, politisasi identitas dalam pemilu termanifestasi pada upaya-upaya mobilisasi massa untuk menunjukkan kekuatan jumlah (*the power of numbers*) kepada penguasa. Namun, mobilisasi massa yang berlangsung terus-menerus tentu akan mengganggu stabilitas politik. Konsentrasi massa di ruang-ruang publik akan memicu gerakan-gerakan tandingan, sehingga friksi dan konflik sosial tidak terhindarkan lagi.

Mobilisasi massa yang berlangsung secara massif juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kekacauan politik sama artinya dengan

ketidakpastian bagi para pelaku usaha dan tentu dapat mengakibatkan kerugian baik materi maupun materiil. Ketika pemerintah membutuhkan investasi dari sektor swasta untuk menggulirkan program pembangunan, terutama infrastruktur, maka kekacauan akibat aksi-aksi massa akan menambah kesulitan pemerintah dalam mencapai program-program yang justru semestinya segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

Karena upayanya yang bekerja di ranah kesadaran dan emosi masyarakat, politisasi identitas berpotensi mengganggu modal sosial dan lebih luas lagi dapat mengancam integrasi bangsa. Politik identitas pada dasarnya bersifat *self-interest*, atau mengutamakan pencapaian kepentingan kelompoknya. Politisasi identitas berseberangan dengan semangat kesatuan karena terlalu menekankan keragaman. Penekanan politisasi solidaritas kelompok yang spesifik dan identitas akan merusak kesatuan sosial politik, memperparah pembelahan sosial yang pada akhirnya justru mengurangi peluang untuk mencapai tujuan kelompok tersebut, tetapi hanya diarahkan untuk meraih tujuan segelintir elite (Schlesinger, 1998). Kolaborasi partai politik dengan kelompok-kelompok militan dalam upaya memobilisasi suara justru akan semakin memperparah keadaan. Kelompok-kelompok tersebut cenderung menonjolkan perbedaan dan menyediakan pedoman perilaku serta berupaya memonopoli kebenaran dan kepatuhan total pada konformitas kelompoknya (Vertigans, 2008: 52).

Namun, politik identitas bukan berarti tindakan yang selalu dianggap negatif atau berseberangan dengan demokrasi. Politisasi identitas berupa

aksi-aksi kolektif juga merupakan jalan yang sah bagi kelompok-kelompok yang tersisih dari aspek sosial ekonomi dan politik untuk meraih kepentingannya, ketika saluran-saluran institusional kurang tersedia untuk mereka. Karena itu, Schlesinger (1998) menyarankan supaya kelompok-kelompok yang marginal harus diintegrasikan pada kelompok *mainstream* daripada terus merayakan perbedaan. Senada dengan itu, Huntington (1993) dalam *Clash of Civilization* melihat bahwa perbedaan yang didominasi politik identitas yang sempit akan menghilangkan makna nasionalisme. Karena itu, solusi yang bisa ditempuh yaitu menekankan kembali identitas (*re-identity*) nilai-nilai kebangsaan.

## 5. Simpulan

Menguatnya politisasi identitas dalam pemilu di Indonesia pasca 2014 tidak terlepas dari pola penggunaan identitas oleh partai maupun elite politik dalam menggalang dukungan suara di era sebelumnya. Lemahnya institusionalisasi partai turut mendorong partai-partai dan para elite politikus berkolaborasi dengan elite-elite di ranah *civil society* yang memiliki simpul-simpul suara. Cara tersebut dipandang lebih efektif menggalang dukungan suara, ketimbang harus melakukan sosialisasi politik secara intensif yang belum tentu dapat dipahami oleh sebagian besar masyarakat. Menguatnya figur nasional dan dominannya preferensi yang dimediasi oleh media massa pada Pilpres 2009 ternyata tidak menghapus pola politisasi identitas. Simpul-simpul partai yang berbasis pada identitas (Islam) sebagai pendukung utama kandidat presiden mengambil bentuk lain dari politisasi identitas.

Secara politik dan sosial, politisasi identitas dapat mengganggu stabilitas nasional. Namun, menguatnya politisasi identitas merupakan dampak dari kondisi sosial ekonomi masyarakat di Indonesia yang memang tarafnya masih rendah. Suburnya organisasi-organisasi massa yang seringkali membawa perjuangan identitas menandakan bahwa pemerintah kurang begitu berhasil dalam menyediakan

pemenuhan kesejahteraan dan menekan angka pengangguran. Persinggungan mereka dengan broker-broker politik menjadi hubungan timbal balik yang sama-sama menguntungkan. Karena itu, penguatan *civil society* yang independen dan otonom serta menghindari perayaan perbedaan juga harus dibarengi dengan usaha-usaha untuk memperkecil kesenjangan sosial di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adediji, A. (2016). *The Politicization of Ethnicity as Source of Conflict: The Nigerian Situation*. Berlin: Springer VS.
- Alcoff, L. M., & Mohanty, S. P. (2006). Reconsidering Identity Politics: An Introduction. In L. M. Alcoff, M. Hames-Garcia, S. P. Mohanty, & P. M. L. Moya (Eds.), *Identity Politics Reconsidered*. New York: Palgrave Macmillan.
- Aspinall, E. (2010). INDONESIA IN 2009: Democratic Triumphs and Trials. *Southeast Asian Affairs*, 103–125.
- Baswedan, A. R. (2004). Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory. *Asian Survey*, 44(5), 669–690.
- BBC.com. (2017, April 20). Ketika Anies-Sandi menang dengan kekuatan Islamis - BBC Indonesia. *BBC.com*. Retrieved from <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39644574>
- Birner, J. K. (2007). *Ethnicity and Electoral Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bozeman, B. (2007). *Public Values and Public Interest: Counterbalancing Economic Individualism*. Washington: George Washington University Press.
- Buehler, M. (2009). Islam and democracy in Indonesia. *Insight Turkey*, 11(4), 51.
- Buehler, M. (2013). Subnational Islamization through Secular Parties: Comparing “Shari’a” Politics in Two Indonesian Provinces. *Comparative Politics*, 46(1), 63–82.
- Buehler, M., & Tan, P. (2007). Party-candidate relationships in Indonesian local politics: A case study of the 2005 regional elections in Gowa, South Sulawesi Province. *Indonesia*, 84(84), 41–69. <https://doi.org/10.2307/40376429>
- Burke, P. J. (2003). Introduction. In P. J. Burke, T. Owens, R. T. Serpe, & P. A. Thoits (Eds.), *Advances in Identity Theory and Research*. New York: Plenum Publishers.
- Detik.com. (2016, December 2). Elektabilitas Ahok-Djarot Turun Tajam, ke Mana Suara Partai Pendukung? *Detik.com*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-3360147/elektabilitas-ahok-djarot-turun-tajam-ke-mana-suara-partai-pendukung>
- Eisenberg, A., & Kymlicka, W. (2011). Bringing Institutions Back In: How Public Institutions Assess Identity. In A. Eisenberg & W. Kymlicka (Eds.), *Identity Politics in the Public Realm: Bringing Institutions Back In*. Vancouver: UBC Press.
- Firmanzah. (2011). *Mengelola Partai politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Geertz, C. (1976). *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press.
- Gutmann, A. (2003). *Identity in Democracy*. Oxfordshire: Princeton University Press.
- Herdiansah, A. G., Junaidi, & Ismiati, H. (2017). Pembelahan Ideologi, Kontestasi Pemilu, dan Ancaman Keamanan Nasional: Spektrum Politik Indonesia Pasca 2014? *Jurnal Wacana Politik*, 2(1).

- Herdiansah, A. G., Putri, D. A., Ashari, L., & Maduratmi, R. (2017). The Islam Defence Action : A Challenge of Islamic Movement to Democratic Transition in the Post 2014 Indonesia. *Jurnal Wacana*, 20(2), 57–67.
- Huntington, S. P. (1993). The Clash of Civilizations? *Foreign Affairs*, 72(3), 22. <https://doi.org/10.2307/20045621>
- Ingram, D. (2004). *Rights, Democracy, and Fulfillment in the Era of Identity Politics: Principle Compromises in a Compromised World*. Maryland: Rowman and Littlefield Publishers, Inc.
- King, D. Y. (2003). *Half-hearted Reform : Electoral Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia*. Development. Portsmouth: Greenwood Publishing Group.
- Kompas.com. (2014, September 21). Anis Matta Anggap Koalisi Merah Putih Konservatif dan Koalisi Jokowi-JK Liberal - Kompas.com. *Kompas.com*. Retrieved from <http://nasional.kompas.com/read/2014/09/21/11095221/Anis.Matta.Anggap.Koalisi.Merah.Putih.Konservatif.dan.Koalisi.Jokowi-JK.Liberal>.
- Mainwaring, S., & Scully, T. (1995). *Building Democratic Institutions: Party System in Latin America*. California: Stanford University Press.
- Merdeka.com. (2017, May 5). Sah! KPU DKI tetapkan Anies-Sandi menang Pilgub DKI 2017 | merdeka.com. *Merdeka.com*. Retrieved from <https://www.merdeka.com/politik/sah-kpu-dki-tetapkan-anies-sandi-menang-pilgub-dki-2017.html>
- Mietzner, M. (2009). *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Mietzner, M. (2014). Indonesia's 2014 Elections: How Jokowi Won and Democracy Survived. *Journal of Democracy*, 25(4), 111–125.
- Pepinsky, T. B., Liddle, R. W., & Mujani, S. (2012). Testing Islam's Political Advantage:evidence from Indonesia. *American Journal of Political Science*, 56(3), 584–600. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2011>
- Permata, A.-N., & Kailani, N. (2010). *Islam and the 2009 Indonesian elections, political and cultural issues: the case of the Prosperous Justice Party (PKS)*. (R. Madinier, Ed.). Bangkok: IRASEC.
- Republika.co.id. (2014, June 23). Muhammadiyah-NU Tolak Hapus Kolom Agama | Republika Online. *Republika.co.id*. Retrieved from <http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/14/06/23/n7lzeb18-muhammadiyahnu-tolak-hapus-kolom-agama>
- Schlesinger, A. M. (1998). *The Disuniting of America: Reflections on a Multicultural Society (Revised Edition)*. New York: W. W. Norton & Company.
- Singh, B. (2003). The 2004 presidential elections in Indonesia: much ado about nothing? *Contemporary Southeast Asia*, 25(3), 431–448.
- Tornquist, O. (2009). Introduction: The Problem is Representation. In O. Tornquist, N. Webster, & K. Stokke (Eds.), *Rethinking Popular Representation - Google Books*. New York: Palgrave Macmillan.

- Ufen, A. (2008). Political party and party system institutionalization in Southeast Asia : lessons for democratic consolidation in Indonesia, the Philippines and Thailand. *The Pasific Review*, 21(3), 327–350. <https://doi.org/10.1080/09512740802134174>
- Vertigans, S. (2008). *Militant Islam: A Sociology of Charcetristics, Causes and Consequences*. United Kingdom: Taylor & Francis.
- Weinstock, D. M. (2006). The Real World of (Global) Democracy. *Journal of Social Philosophy*, 37(1), 6–20.
- Wiarda, H. J. (2014). *Political Culture, Political Science, and Identity Politics: An Uneasy Alliance*. Ashgate.





## INTEGRASI NASIONAL DAN EKSLUSIONARIS IDENTITAS DALAM PILKADA 2017: STUDI KASUS PILKADA MALUKU UTARA, DKI JAKARTA, DAN KALIMANTAN BARAT

**Mouliza K.D Sweinstani**

*Bawaslu RI, Jakarta, Indonesia, moulizadonna@gmail.com*

**Rury Uswatun Hasanah**

*Bawaslu RI, Jakarta, Indonesia, ruryuswatunhasanah@gmail.com*

---

### ABSTRACT

*Primordialism that is understood as something inherent in each individual, often misunderstood and used for the political interests of some groups. Utilization of primordialism can be seen through the implementation of elections, including elections in 2017 in West Kalimantan, North Maluku, and DKI Jakarta which became the locus of this study. By using explanatory qualitative method, this study aims to explain how the pattern of identity utilization in the three areas. In addition, the author tries to identify what kind of utilization patterns are used in each region which will then be linked to national integration. To understand the case of identity utilization, the author uses the concept of national integration submitted by Weiner.*

### Keywords

Identity, Local Executive Election, National Integration, SARA, Primordialism

---

### ABSTRAK

*Primordialisme yang dipahami sebagai sesuatu yang melekat dalam diri setiap individu, kerap kali disalah persepsikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik sejumlah kelompok. Pemanfaatan primordialisme tersebut dapat dilihat melalui penyelenggaraan*

*Pilkada, termasuk Pilkada tahun 2017 di Kalimantan Barat, Maluku Utara, dan DKI Jakarta yang menjadi lokus penelitian ini. Dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatory, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pola pemanfaatan identitas di tiga daerah tersebut. Di samping itu, penulis mencoba untuk mengidentifikasi pola pemanfaatan yang seperti apa yang digunakan pada masing-masing daerah yang kemudian akan dikaitkan dengan integrasi nasional. Untuk memahami kasus pemanfaatan identitas, penulis menggunakan konsep integrasi nasional yang disampaikan oleh Weiner.*

## **Kata Kunci**

Identitas, Integrasi Nasional, SARA, Primordialisme, Pilkada Serentak

---

## **1. Pendahuluan**

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung menjadi saluran bagi masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai pilihannya. Di samping itu, pilkada secara langsung mampu memberikan ruang terhadap masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam politik. Hal ini berarti Pilkada dapat menjadi salah satu cara untuk penguatan demokrasi di tingkat lokal. Namun, penguatan demokrasi tersebut terganjal oleh isu-isu primordialisme yang digulirkan pada saat penyelenggaraan pilkada. Primordialisme yang dimaksud adalah suatu hal yang melekat sejak lahir pada setiap individu. Geertz mengklasifikasikan primordialisme menjadi enam jenis, yaitu ikatan darah, ras, bahasa, daerah, agama, dan adat (Geertz, 1965).

Isu-isu primordial yang berkembang pada era saat ini berbeda dengan konteks pada saat Indonesia baru merdeka. Ketika Indonesia merdeka, suasana dunia internasional yang tengah diwarnai dengan negara-negara baru merdeka sehingga isu primordial yang ada pada saat itu sebagai bentuk pencarian identitas

nasional sebagai negara baru. Berbagai negara-negara tersebut antara lain terdiri atas negara di kawasan Asia dan Afrika, seperti Indonesia, Malaya, Burma, India, Lebanon, Maroko, dan Nigeria. Negara-negara tersebut menghadapi kebingungan dalam membentuk sistem politik dan pemerintahan setelah merdeka. Mereka mengalami pencarian identitas negara dan benturan nilai antara nilai lokal dalam masyarakat dan nilai yang dibawa oleh penjajah mereka.

Proses pencarian identitas nasional terus berlangsung sekalipun negara-negara tersebut telah merdeka beberapa tahun. Selama proses pencarian identitas tersebut terjadi benturan dan gesekan nilai dari setiap golongan yang disebut sebagai sentimen primordial. Untuk kasus di Indonesia, sentimen primordial dapat ditemukan pada masa Demokrasi Liberal. Pada masa tersebut dapat disaksikan terjadi pergantian kabinet secara berkali-kali akibat sentimen primordial demi kepentingan politik setiap golongan. Meminjam pandangan Herbert Feith perbedaan kepentingan politik dan kelompok tersebut terjadi sebagai akibat

penyebaran kekuasaan baik dalam birokrasi pemerintahan maupun partai-partai (Feith, 1973).

Sementara, pada saat ini, isu primordial dimanfaatkan untuk kepentingan politik salah satunya dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam konteks pilkada di Indonesia, isu-isu primordialisme masih ditemukan di sejumlah daerah, misalnya di Maluku Utara, DKI Jakarta, dan Kalimantan Barat. Pada penyelenggaraan pilkada serentak 2017 di Maluku Utara, isu-isu primordialisme yang dimanfaatkan bahkan cenderung mengarah pada hal-hal destruktif adalah isu-isu yang berkaitan dengan perbedaan suku. Selama proses kampanye dalam pilkada tersebut berhembus persoalan tentang tidak diperkenalkannya untuk memilih pasangan calon yang berasal dari luar setiap kabupaten/kota bahkan Provinsi Maluku Utara. Materi kampanye yang digencarkan pada saat pilkada serentak 2017 adalah penekanan untuk memilih putera daerah. Berbeda dengan di Maluku Utara, di DKI Jakarta isu agama adalah isu yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pilkada DKI 2017 Pada saat itu, terdapat isu tentang himbauan tidak memilih pasangan calon yang berbeda agama dengan pemilih. Berbagai isu primordial tersebut diangkat menjadi materi kampanye dengan tujuan untuk memenangkan pasangan calon yang didukung dan menjatuhkan lawannya.

Konsekuensi dari berbagai dampak negatif pemanfaatan identitas dalam penyelenggaraan Pilkada tersebut adalah terbangunnya salah persepsi mengenai primordialisme yang seharusnya dipahami sebagai suatu hal yang melekat pada diri setiap orang dan suatu pemberian,

serta bukan pilihan yang dibuat oleh individu tersebut, menjadi sesuatu pembeda dengan pihak lain yang kerap kali dibenturkan. Seharusnya isu primordial tidak perlu untuk kembali dipermasalahkan karena identitas nasional bangsa Indonesia (*nation-state identity*) telah terbentuk. Argumen tersebut berangkat dari penjelasan James Kellas menyatakan bahwa pembentukan negara-bangsa tidaklah berdasarkan kepada etnisitas semata. Perbedaan etnisitas, budaya, dan identitas tidak perlu dipermasalahkan ketika suatu negara telah mempunyai nasionalisme resmi. Ia mendefinisikan nasionalisme resmi sebagai nasionalisme yang tidak berdasarkan kepada etnisitas, identitas bangsa, dan budaya sehingga semua orang dapat menjadi warga negara secara sah dan legal tanpa mempertimbangkan hal-hal tersebut (Kellas, 1998). Namun, pada praktik di Indonesia isu primordial dijadikan alat kepentingan politik yang apabila terjadi pembiaran terhadap salah persepsi terhadap primordialisme tersebut, dapat memunculkan potensi terganggunya integrasi nasional. Berbagai bentuk ancaman yang berpotensi mengganggu integrasi diantaranya adalah konflik kekerasan dan penyebaran kebencian. Persoalan sejenis ini tidak dapat diabaikan dan dibutuhkan manajemen atas keberagaman yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi penanganan terhadap maraknya penyebaran isu primordial yang berpotensi mengancam integrasi nasional.

Berbagai studi mengenai politik identitas telah banyak dituliskan oleh sejumlah akademisi. Melalui tulisan yang berjudul Politik Identitas Etnis di

Kalimantan Barat, Tanasaldy menjelaskan bahwa konflik etnis di Kalimantan Barat berkembang di masa akhir pemerintahan Orde Baru. Konflik tersebut muncul berkaitan dengan perpolitikan dimana etnis Dayak berusaha mendapatkan perwakilan di bidang eksekutif dan legislatif setelah sekian lama etnis tersebut mengalami marjinalisasi (Tanasaldy, 2014). Perebutan posisi strategis menjadi pemicu konflik yang berujung kepada kekerasan antara etnis Melayu dan Dayak. Studi lain yang juga mengangkat politik identitas adalah disertasi Buchari yang berjudul Politik Identitas Etnis Dayak Pada Pilkada Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007. Melalui tulisannya, Buchari menjelaskan bahwa marjinalisasi dan diskriminasi etnis Dayak di Kalimantan Barat telah menyebabkan ikatan emosional etnis Dayak semakin erat dan kuat, sehingga memunculkan politik identitas etnis Dayak dan membuat lebih mudah dikonsolidasikan untuk memilih tokoh dari etnis Dayak sebagai Gubernur (Buchari). Selain itu, keterbukaan akses dan kesempatan pada era Reformasi menjadi titik balik etnis Dayak untuk terlibat dalam kontestasi di Pilkada. Selanjutnya, Salim melalui tulisannya dengan judul Politik Identitas di Maluku Utara mengemukakan bahwa politik identitas menguatkan posisi elit dan penguasa lokal di Maluku Utara. Di samping itu, isu primordial diangkat dalam konteks perebutan kekuasaan politik di Maluku Utara.

Studi-studi sebelumnya telah mengutarakan bahwa di berbagai daerah di Indonesia masih kental dengan isu primordial. Selain itu, isu primordial menjadi permainan politik dalam rangka mendapatkan posisi strategis di pemerintahan. Persaingan etnis,

dan lainnya memicu konflik tersendiri, termasuk kekerasan. Berbeda dengan studi sebelumnya, penelitian ini menekankan kepada bagaimana keterkaitan primordialisme dengan integrasi nasional. Selain itu, penulis akan memulai analisis ini dengan mengidentifikasi bagaimana pola unsur pembentukan identitas yang terjadi pada Pilkada tahun 2017. Selanjutnya, penulis akan mulai mengidentifikasi keterkaitan eksklusionarisme<sup>1</sup> identitas pada Pilkada 2017 dengan integrasi nasional. Terakhir, strategi menghadapi isu primordialisme menjadi tawaran penulis untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan identitas.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang tidak saja memberikan gambaran penelitian namun juga mencari penyebab dan

---

1 Craigh menjelaskan bahwa kemungkinan negatif dari politik identitas adalah eksklusionarisme yang ditandai dengan adanya pemahaman bahwa identitas sebagai suatu yang bersifat esensial. Pandangan tersebut berasal dari Isin dan Wood yang membedakan identitas menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok *essentialist* yang melihat identitas sebagai manifestasi dari perbedaan yang sangat jelas atau dalam istilah Young merupakan kondisi objektif dari individu, seperti ras, gender, kelas, etnisitas, dan orientasi seksual. Kedua, kelompok konstuktif yang memandang identitas sebagai suatu hal yang tidak tetap dan dapat berubah. (Suseno, 2010)

alasan atas suatu fenomena. Penelitian ini berangkat dari suatu teori atau fenomena yang telah diketahui dan telah tersedia penjabarannya. Untuk itu, dengan melakukan penelitian ini biasanya seorang peneliti akan menguji teori atau prinsip yang telah ada tersebut lalu ia dapat menjabarkan, mengembangkan, atau justru menentang penjelasan teori yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain, penelitian jenis ini ujian utamanya adalah menjelaskan alasan terjadinya suatu peristiwa dan untuk membentuk, memperdalam, mengembangkan, atau menguji teori (Neuman, 2013).

Berkaitan dengan riset ini, penulis akan menjelaskan bagaimana pola pemanfaatan identitas pada masing-masing daerah. Setelah memberikan penjelasan mengidentifikasi pola yang mana yang digunakan pada masing-masing daerah, penulis akan mengaitkannya dengan integrasi nasional. Di sini penulis akan lihat bagaimanakah konsep integrasi nasional yang dikemukakan oleh Wainer dapat dijelaskan dengan kasus pemanfaatan identitas pada penyelenggaraan Pilkada 2017. Keseluruhan data yang akan penulis gunakan dapat riset ini adalah jenis data primer yang diperoleh melalui FGD terhadap pengawas pemilu di masing-masing daerah objek studi dan data sekunder yang berasal dari laporan Bawaslu, Koran, Jurnal, dan sebagainya.

### 3. Perspektif Teori

Teori pertama yang akan penulis gunakan dalam tulisan ini adalah Teori Politik Identitas yang dikemukakan oleh Iris Young, Nira Yuval Davis, Isin dan Wood, dan Craigh. Dengan menggunakan pisau analisis politik identitas, penulis

akan menjelaskan bagaimana pola unsur pembentuk identitas yang dimanfaatkan dalam Pilkada Langsung 2017 di beberapa daerah di Indonesia. Penulis juga akan menjelaskan bagaimana konsepsi identitas yang dimaknai pada pemanfaatan identitas dalam Pilkada tersebut serta bagaimana dampaknya pada konstruksi identitas yang dibangun.

Menurut Iris Young (1990), kelompok sosial di dalam masyarakat tidak hanya diikat oleh atribut-atribut yang bersifat eksternal yang melekat pada diri mereka namun juga diikat oleh apa yang disebut dengan *a sense of identity*. Sekalipun seseorang tidak memiliki ciri-ciri kondisi objektif (warna kulit, jenis kelamin, umur, ras, etnis, kelas, wilayah, dan sebagainya) yang sama dengan sebagian besar orang dalam kelompok tersebut, dengan adanya rasa kesamaan identitas, dia tetap dapat diakui dan mengakui dirinya sebagai bagian dari identitas kelompok itu. Rasa kesamaan identitas tersebut dapat tumbuh dalam diri individu maupun kelompok dikarenakan terdapat keterkaitan latar belakang historis dan kultural di antara keduanya sehingga hal tersebut mampu mengikat individu melampaui hal-hal atributif yang menjadi ciri dari identitas. Oleh karena itu, identitas (baik kelompok maupun individu) di sini diartikan sebagai bentuk-bentuk khas narasi-narasi budaya yang menciptakan adanya persamaan dan perbedaan di antara diri kita dengan orang lain yang dengan stabil menafsirkan posisi sosial mereka (Davis, 2000). Sementara politik identitas dengan demikian berarti pemanfaatan identitas individu maupun kelompok untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu.

Berkaitan dengan konsep-konsep identitas, Isin dan Wood membedakan konsep identitas menjadi dua kelompok utama. Pertama kelompok *essentialist*, yang melihat identitas sebagai manifestasi dari perbedaan yang sangat jelas atau dalam istilah Young disebut sebagai kondisi objektif seseorang yang berkaitan dengan gender, ras, kelas, etnisitas, atau orientasi sosial. *Kedua*, kelompok yang mengembangkan pandangan konstruktif yang tidak melihat identitas sebagai sesuatu yang tetap dan tidak berubah (Isin & Wood, 1999). Pandangan kedua tentang identitas ini lebih mengedepankan pada pemahaman bahwa upaya pembentukan identitas seseorang akan selalu bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman. Identitas tidak bersifat tetap dan tidak pernah stabil melainkan identitas dapat berubah sewaktu-waktu bahkan adakala identitas yang pada suatu saat dimaknai sebagai pembeda dirinya dengan kelompok lain, di lain kesempatan identitas tersebut dapat menjadi hal yang menandakan persamaan dirinya dengan kelompok lain. Paham kedua tentang identitas ini memercayai bahwa identitas selalu bersifat relasional, tidak pernah selesai, dan sedang dalam proses pembentukan.

Isin dan Wood menjelaskan bahwa konsepsi identitas yang non-esensial di atas berpotensi untuk membuka celah guna memahami lebih baik mengapa kelompok mempunyai perasaan yang sangat kuat akan identitas mereka dan mengapa mereka menggunakan identitas mereka dalam perjuangan mendapatkan pengakuan. Calhoun Craigh dalam bukunya *Social Theory and the Politics of Identity* yang dikutip oleh Isin dan Wood menyatakan bahwa terdapat

kemungkinan negatif dari politik identitas. Apabila identifikasi identitas selalu dimaknai sebagai esensialisme, maka konstruksi sosial yang demikian dapat menjadi eksklusionarisme yang merupakan akibat dari konstruksi identitas kelompok yang sangat dramatis.

Selanjutnya berkaitan dengan primordialisme, menurut Geertz pola-pola berbeda terkait sentimen primordial terdiri dari lima pola. Pertama, satu kelompok dominan dan berjumlah sedikit, seperti Siprus dengan Yunani dan Turki. Kedua, satu kelompok sentral berdasarkan kedaerahan, seperti Jawa lawan kelompok luar Jawa. Ketiga, dua kelompok yang hampir seimbang kedudukannya, seperti kelompok Melayu dan Cina di Malaya. Keempat, pola gradasi berupa kelompok besar, kelompok *medium*, dan kelompok kecil dalam suatu negara, seperti di Filipina dan Nigeria. Kelima, terjadi fragmentasi etnis yang menyebabkan terbentuknya berbagai kelompok kecil, seperti di kebanyakan negara Afrika. negara dan cerminan negara demokrasi.

Pentingnya pengelolaan isu primordialisme di negara-negara plural sesungguhnya tidak lain ditujukan untuk tercapainya integrasi nasional. Myron Weiner dalam Finkle mengetengahkan sebuah kualifikasi sifat yang selanjutnya digunakan ketika membicarakan salah satu bentuk dari masalah integrasi. Ia mengetengahkan beberapa bentuk integrasi yaitu, pertama, Integrasi Nasional. Istilah integrasi ini berkaitan dengan pluralitas di dalam suatu nation-state yang sebetulnya bangunan nation-state ini terdiri dari berbagai macam bangsa yang memiliki budaya, bahasa, nilai, dan sistem politiknya masing-

masing. Keragaman di dalam nation-state ini sesungguhnya dicirikan dengan dengan tingginya loyalitas budaya yang dijunjung tinggi oleh masing-masing budaya yang mana pada masa sebelum menjadi nation-state, loyalitas ini terbelenggu oleh kekuatan kolonial untuk kepentingan kolonial. Oleh karena itu, Weiner mengemukakan setidaknya ada dua strategi yang dapat dilakukan untuk membangun integrasi nasional di tengah tingginya loyalitas budaya, (1) melakukan eliminasi atas ciri-ciri budaya khas masyarakat minoritas menjadi budaya nasional, biasanya mengintegrasikannya menjadi budaya yang dominan. Cara ini sering disebut dengan kebijakan asimilasi, atau (2) membangun loyalitas nasional tanpa perlu melakukan eliminasi terhadap budaya subordinate, atau yang lebih dikenal dengan kebijakan *unity in diversity*.

Bentuk kedua adalah Integrasi Teritorial. Integrasi ini berkaitan dengan terdapatnya satu kewenangan sentral yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan kelompok dalam satu teritorial tersebut. Ketiga, Integrasi Nilai yang dalam pengertian sederhana diartikan sebagai terdapatnya prosedur yang mudah diterima untuk melakukan resolusi konflik. Keempat, Integrasi Elit dan Masa. Integrasi ini berhubungan dengan bagaimana menyatukan elit dan masa yang mana diketahui bahwa elit dan masa memiliki tujuan dan nilai yang berbeda. Kelima, Perilaku Integratif yang berkaitan dengan kapasitas dan kesiapan individu untuk bekerja bersama dengan orang lain dalam sebuah organisasi yang memiliki tujuan tertentu untuk sebuah pencapaian dalam sebuah masyarakat modern. Perilaku integrated yang dimiliki

individu tersebut menjadi faktor yang penting dalam mendukung pembangunan suatu bangsa (Weiner, 1971).

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### **4.1 Isu-Isu Eksklusionalis Identitas di Beberapa Daerah Dalam Pilkada 2017**

Berdasarkan pada pengamatan penulis atas pemanfaatan identitas yang terjadi pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2017 di ketiga daerah yang penulis jadikan objek studi dalam riset ini, maka hampir sebagian besar identitas dimaknai sebagai konsep esensial yang menilai bahwa identitas yang melekat pada dirinya adalah identitas yang menjadi pembeda dirinya dengan orang lain. Pemaknaan identitas yang demikian praktis hanya dimaknai secara sempit karena pemaknaan ini tidak membuka ruang bagi munculnya penafsiran identitas sebagai suatu hal yang bersifat adaptif dan sebagai alat pemersatu. Oleh karena itu, pemaknaan identitas pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2017 di tiga daerah ini cenderung mengarah pada apa yang disebut dengan eksklusionalis yang memberikan dampak negative terhadap pemanfaatan identitas dalam konteks kepolitikan. Beberapa pemanfaatan negative identitas pada Pilkada tersebut penulis uraian sebagai berikut:

- **Maluku Utara**

Isu politik identitas masih menjadi salah satu isu yang kerap kali muncul dalam penyelenggaraan Pilkada. Salah satu persoalan yang muncul sebagai implikasi dari menguatnya isu etnisitas adalah sentimen primordial (Salim, 2015). Dalam konteks Pilkada tahun 2017 di

Maluku Utara, isu primordial yang paling kencang dihembuskan adalah untuk memilih putera daerah. Sejumlah materi kampanye cukup sering mengutarakan himbauan dan ajakan untuk tidak memilih pasangan calon yang bukan berasal baik dari Kabupaten/Kota maupun Provinsi Maluku Utara. Himbauan dan ajakan tersebut bahkan disertai dengan iming-iming berupa pemberian uang untuk tidak memilih pasangan calon yang bukan kepala daerah. Harga yang ditawarkan per kepala keluarga berkisar mulai dari Rp100.000,00 sampai dengan Rp 3.000.000,00 (Anonymous, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa betapa kuat isu primordial untuk menjegal lawan yang bukan berasal dari suku yang ada di Maluku Utara. Dalam menjaga trah kesukuan, tidak jarang dalam penyelenggaraan Pilkada di Maluku Utara para peserta yang mencalonkan diri berasal dari keluarga petahana atau mempunyai kekerabatan dengan kepala daerah lain di Provinsi Maluku Utara.

Ditinjau dari perspektif sejarah Maluku Utara, pertarungan identitas etnis selalu mewarnai momentum politik di Maluku Utara. Sejak masa empat Kesultanan Islam berdiri sebagai pusat pemerintahan negara dan bangsa, memberikan gambaran bahwa politik identitas etnis berjalan beriringan (Salim, 2015). Dalam pembentukan sistem pemerintahan tidak dapat terlepas dari basis tradisi atau adat hingga saat ini. Dengan begitu, bukan suatu hal yang baru ketika isu primordial hadir dalam dinamika politik lokal di Maluku Utara. Setiap elit politik akan terus berusaha mengangkat isu identitas etnis dalam perhelatan pemilihan kepada daerah di Maluku Utara. Isu tersebut

menjadi alat propaganda elit untuk mengumpulkan dukungan massa dalam rangka memenangkan pasangan calon yang diusung dan menjatuhkan lawan politik, terutama yang bukan putera daerah.

- **DKI Jakarta**

Isu primordialisme yang terjadi pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, dapat dikatakan menjadi isu pemanfaatan identitas yang paling massif jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Masalah yang diangkat pada Pilgub DKI 2017 tersebut adalah isu etnis dan isu agama. Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, terdapat isu di tengah masyarakat untuk tidak memilih salah satu pasangan calon dikarenakan perbedaan agama kandidat dengan mayoritas agama yang dianut masyarakat. Jika dilihat pada asal mula bergulirnya isu ini, maka isu ini dilatar belakangi oleh pernyataan Calon Gubernur DKI Petahana yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan masyarakat muslim. Dengan alasan membela agamanya, isu yang timbul di tengah masyarakat justru membesar dan melebar hingga munculah himbauan-himbauan untuk tidak memilih kandidat non-muslim. Isu ini bahkan melebar hingga isu etniisitas, yaitu antara Tionghoa dan non-Tionghoa di Indonesia. Apa yang terjadi di DKI Jakarta, terutama berkaitan dengan isu-isu Tionghoa seolah mengingatkan kita kembali pada berbagai kebijakan yang mengopresi etnis ini di bidang politik dan hanya mengunggulkan mereka dibidang bisnis seperti pada masa Hindia Belanda dan Indonesia merdeka di bawah kepemimpinan Soeharto. Politik identitas yang dikonsepsikan oleh pemerintah Orde Baru telah berhasil membentuk wacana khusus terhadap



etnis tionghoa sesuai dengan kebutuhan penguasa. Hampir senada dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda melalui kebijakan *divide et impera*, pemerintah Orde Baru telah menempatkan orang tionghoa sebagai *liyan*<sup>2</sup> dalam bangun mosaik keindonesiaan. Pemerintah Orde Baru menempatkan masyarakat keturunan tionghoa dalam sektor bisnis dan berhasil membentuk wacana khusus tentang etnis tionghoa sesuai dengan kebutuhan penguasa. Penempatan peran masyarakat etnis tionghoa dalam bidang ekonomi dan bisnis ini, mengakibatkan munculnya asumsi dalam masyarakat yang menyatakan bahwa masyarakat keturunan tionghoa adalah makhluk ekonomi dengan kehidupan sosialnya yang sangat eksklusif (Meij, 2009).

Dampak dari masifnya penolakan terhadap pencalonan kandidat non-muslim dan Tionghoa ini sangat besar bagi bangsa ini. Bangsa Indonesia yang telah mencapai kesepakatan negara bangsa yang berdasarkan Pancasila, seolah kembali terbelah oleh isu Nasionalis Religius-Nasionalis Sekuler seperti pada masa di mana Indonesia masih mencari dasar negara Indonesia merdeka. Dampak lebih jauh dari kasus ini adalah seolah masyarakat Indonesia secara

keseluruhan telah terbelah menjadi pribumi-nonpribumi, Islam-NonIslam, dan Pancasila-Agamis.

#### • Kalimantan Barat

Politik lokal di Kalimantan Barat tidak dapat dipisahkan dengan urusan persaingan antar etnik. Seperti diketahui dua etnik besar yang mendominasi wilayah Kalimantan Barat adalah etnik Melayu dan etnik Dayak. Berdasarkan konstruksi sejarah yang terbentuk di Kalimantan Barat, etnik Dayak telah mengalami marjinalisasi yang cukup lama. Misalkan pada masa Orde Baru, pemerintahan Soeharto tidak pernah menginginkan terbentuknya kepemimpinan lokal yang kuat, termasuk di Kalimantan Barat karena hal tersebut dapat mengancam kepemimpinan pusat dan memicu kemunculan separatisme (Tanasaldy, 2014). Dengan begitu, pemimpin lokal di Kalimantan Barat berasal atau didatangkan dari pusat. Memasuki era Reformasi yang ditandai dengan demokratisasi dan desentralisasi, kesempatan pemimpin lokal yang memang berasal dari Kalimantan Barat untuk memimpin menjadi terbuka. Namun, keterbukaan tersebut memperkuat persaingan antar kedua etnik besar tersebut. Dalam rangka untuk mendapatkan posisi strategis baik di eksekutif maupun legislatif, sejumlah kaum elit memainkan isu politik sektarian yang menuntut penempatan etnik Dayak dalam posisi strategis tersebut. Keadaan persaingan kedua etnik menjadi lebih terbuka ketika pemilihan kepala daerah secara langsung (Kristianus, 2011). Persaingan kedua masih dapat dirasakan dalam Pilkada tahun 2017. Materi kampanye yang bermuatan SARA kerap kali muncul untuk menjatuhkan pihak lawan. Temuan tersebut dapat

---

2 Istilah *liyan* adalah pembakuan dari kata dalam bahasa Inggris "the other". *Liyan* dalam teori pasca kolonial merupakan istilah yang sangat penting dalam melakukan definisi terhadap identitas subjek. *Liyan* mengacu pada subjek kolonial yang posisinya diletakkan sebagai manusia marjinal dalam diskursus imperial. (Aschcroft, Griffiths, & Tiffin, 1999)

dilihat dalam Pilkada di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sanggau.

Berdasarkan pada ketiga uraian pemanfaatan identitas di atas, dapat diketahui bahwa unsur pembentuk identitas (yang dimanfaatkan) dalam penyelenggaraan Pilkada di ketiga daerah tersebut pada tahun 2017 lebih merujuk pada unsur objektif manusia. Pada Kasus Maluku Utara identitas yang digunakan sebagai alat melawan lawan politik lebih didasarkan pada kesamaan suku. Sementara itu di Kalimantan Barat lebih pada unsur etnisitas. Sedangkan di DKI Jakarta identitas masa yang menolak kandidat non-muslim lebih ditentukan oleh identitas keagamaan dan identitas etnis. Dengan adanya unsur pembentuk identitas yang demikian, maka wajar jika pemanfaatan identitas cenderung mengarah pada dampak negative karena identitas objektif tersebut hanya dimaknai secara sempit yang menjadikan seseorang hanya akan mengelompokkan diri dengan mereka yang memiliki kesamaan unsur objektif tersebut.

#### **4.2 Identitas dan Integrasi Nasional**

Mengacu kepada kasus di Maluku Utara, DKI Jakarta, dan Kalimantan Barat terdapat pola pemanfaatan identitas yang berbeda. Dalam konteks Maluku Utara dan Kalimantan Barat, isu primordialisme diangkat berhubungan dengan etnisitas yang berangkat dari sebuah konstruksi sejarah kedua daerah tersebut. Pada kasus Maluku Utara, sistem pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari basis tradisi sehingga pemimpin yang diharapkan berasal dari suku-suku di daerah tersebut. Dengan begitu, persaingan yang terjadi dalam pilkada selalu berkaitan dengan isu putera daerah. Sementara, pada kasus di

Kalimantan Barat, persaingan yang terjadi selalu antara etnis Dayak dan Melayu. Hal ini disebabkan oleh marjinalisasi etnis Dayak dan dominasi etnis Melayu dalam berbagai jabatan di Kalimantan Barat.

Berbeda dengan kedua daerah tersebut, dalam pilkada DKI Jakarta 2017, isu primordialisme menyentuh ranah suku dan agama.

Dengan demikian, isu di Jakarta menjadi lebih kompleks dibandingkan kedua daerah tersebut dalam urusan penyelenggaraan Pilkada 2017. Pada kasus Pilkada DKI Jakarta, terdapat integrasi nilai yang terbentuk dalam kalangan Islam yang disalahpersepsikan untuk memaksakan kepentingan kelompoknya dalam penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017. Padahal pemahaman integrasi nilai yang ditekankan oleh Weiner adalah penyatuan nilai-nilai dalam masyarakat untuk melakukan resolusi konflik, bukan seperti yang terjadi di Jakarta yang justru memperbesar konflik.

Persoalan yang terdapat di ketiga daerah tersebut dapat dikatakan belum mencapai tahapan integrasi yang disampaikan Weiner. Berangkat dari persoalan masing-masing daerah menunjukkan bahwa Indonesia baru menerapkan integrasi nasional dan integrasi teritorial. Sementara, tahapan integrasi nilai, integrasi elit dan massa, dan perilaku integratif masih belum dicapai oleh negara ini. Hal ini dapat dirasakan melalui sejumlah elit yang masih suka memainkan isu primordialisme untuk kepentingan dalam pilkada. Begitupula, kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan nilai yang mereka yakini bukan untuk membentuk integrasi nilai, melainkan untuk memaksakan tujuannya. Dengan

begitu, semakin sulit menuju perilaku integratif yang menekankan kepada kesediaan dan kesadaran masyarakat untuk bekerja sama dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara.

Untuk kasus tiga daerah tersebut bukan hanya belum memenuhi tahapan integrasi Weiner, melainkan juga masih terjebak dalam pemaknaan identitas secara sempit. Dalam konsep Isin dan Wood pemaknaan sempit tersebut dikenal sebagai pemahaman esensialis yang memandang identitas sebagai perbedaan yang sangat jelas. Dengan kata lain, pemahaman identitas sebatas dalam kondisi objektif seseorang yang berkaitan dengan gender, ras, kelas, etnisitas, atau orientasi sosial. Pembiaran terhadap pemahaman seperti itu akan memberi ruang terhadap tumbuhnya eksklusionarisme.

### **4.3 Strategi Menghadapi Ancaman Integrasi Nasional**

Integrasi mungkin menunjuk kepada pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah, dan pada suatu pembentukan identitas nasional (Weiner, 1977). Istilah integrasi nasional kerap kali dibahasakan di negara-negara yang majemuk dan plural karena keberagaman yang ada menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara tersebut. Pluralisme selalu dijadikan persoalan ketika identitas yang melekat pada setiap individu dijadikan pembeda yang jelas antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Padahal perlu disadari keberagaman adalah suatu hal wajar dan tidak dapat dihilangkan di negara-negara yang multikultur.

Indonesia sebagai negara yang plural juga dihadapi dengan isu primordial yang dapat dilihat melalui Pilkada tahun 2017 seperti pembahasan sebelumnya. Isu-isu primordial tersebut memungkinkan terjadinya gangguan terhadap integrasi nasional apabila tidak ditangani segera. Berdasarkan pandangan Wriggins, ia menawarkan lima cara untuk menjaga integrasi nasional. Pertama, membentuk musuh bersama yang berarti membuka kesadaran masyarakat bahwa negaranya mempunyai ancaman dari luar. Dengan kesadaran tersebut mampu membentuk rasa kebersamaan dan persatuan dalam masyarakat untuk berjuang dan membela negara dari ancaman musuh tersebut. Keberadaan musuh bersama tersebut dianggap mampu mengaburkan perbedaan yang ada sehingga masyarakat tidak merasa dari golongan yang berbeda, tetapi merasa sebagai bagian dari negara.

Kedua, gaya politik yang dimiliki para pemimpin menjadi cara yang menentukan dalam menjaga integrasi nasional. Menurut Wriggins, gaya politik tersebut dapat menjaga atau menghancurkan integrasi nasional. Integrasi nasional dapat terjaga ketika pemimpin mampu memperlihatkan perhatian dan rasa hormat pada semua suku bangsa dan golongan yang berbeda-beda di negaranya (Wriggins, 1977). Ketiga, penguatan lembaga politik dan administratif, berupa birokrasi dan tentara. Kekuasaan birokratis harus mampu menanggapi berbagai perbedaan dengan baik dan responsif. Misalkan, lembaga birokrasi memberi kesempatan kerja yang merata ke seluruh daerah dalam suatu negara. Sementara, peran tentara sebagai alat nasionalisasi dan menjaga keutuhan suatu negara. Di samping itu, lembaga-lembaga lain yang berperan

dalam menjaga integrasi nasional adalah badan legislatif dan partai politik. Partai politik dapat berfungsi sebagai lembaga yang memperkecil konflik antar komunal, suku, dan lainnya. Partai politik juga berperan dalam mengkompromikan berbagai perbedaan, tuntutan-tuntutan yang berbenturan, dan menghadapi konflik dengan bijaksana. Sementara badan legislatif menjadi lembaga yang menampung aspirasi berbagai kelompok dan memperkuat kaum minoritas untuk mau bersatu dengan kaum mayoritas. Dengan demikian, konflik yang timbul akibat isu primordial dapat diatasi.

Keempat, penguatan pemahaman tentang ideologi negara merupakan salah satu cara mempertahankan integrasi nasional. Pemerintah harus mampu membuat masyarakat meresapi dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi negara. Ideologi harus dipahami sebagai serangkaian ide tentang tujuan-tujuan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara dan petunjuk bagaimana cara mencapai tujuan-tujuan tersebut (Wriggins, 1977). Kelima, membuka kesempatan dan pertumbuhan ekonomi yang luas. Menurut Wriggins, kemacetan ekonomi akan mempertajam perselisihan dan persaingan dalam masyarakat. Sebaliknya, kesempatan dan pertumbuhan ekonomi dirasa mampu memasukkan setiap orang dalam kesatuan bangsa.

Weiner juga menawarkan suatu cara untuk menghadapi keberagaman dan sentimen primordial. Ia menyarankan tentang penanaman kesetiaan nasional dalam masyarakat. Dalam artian setiap individu menyadari bahwa di balik perbedaan yang mereka miliki, ada suatu penyatu, yaitu negara yang harus dijaga keutuhannya dan merupakan milik

bersama. Ia juga menjelaskan bahwa kemampuan pemimpin dalam mengontrol wilayahnya menjadi cara untuk menjaga integrasi nasional. Sebagai contoh, pemimpin pusat mampu mengontrol semua pemimpin daerah. Demikian pula, pemimpin daerah mampu mengawal dan membimbing pemimpin yang lebih rendah atau yang ada di bawahnya. Selanjutnya, strategi yang tidak kalah penting untuk dijalankan adalah konsensus dan konsolidasi antar kepentingan. Kedua hal ini dianggap sebagai jalan tengah atau cara memediasi berbagai perbedaan dalam masyarakat yang menyulut konflik. Terakhir, langkah yang menjadi solusi dari permasalahan keberagaman, yaitu tingkah laku integratif. Dengan kata lain, kesediaan setiap individu untuk bekerja sama dengan terorganisir demi mencapai tujuan bersama. Selain itu, kesediaan setiap individu untuk berperilaku dengan cara yang bisa membantu pencapaian tujuan-tujuan bersama tersebut (Weiner, 1977).

Merujuk kepada Geertz, memperkuat supremasi hukum merupakan strategi untuk mempertahankan integrasi nasional. Dengan adanya hukum, upaya kelompok-kelompok tertentu untuk memainkan isu primordial menjadi terhalangi. Mereka akan berpikir ulang untuk menciptakan konflik yang mengatasnamakan perbedaan identitas karena sewaktu-waktu mereka akan terkena hukuman. Ia juga berbicara tentang perlunya negara memperkuat supremasi politik. Hal ini berarti pemerintah dapat menggunakan kekuatan dan kekuasaannya dalam menangani persoalan yang ditimbulkan atas perbedaan suku, agama, ras, dan lainnya. Tidak kalah penting, Geertz menekankan bahwa sentimen primordial

akan selalu ada dalam negara yang plural. Dalam rangka menghadapi sentimen primordial tersebut, langkah yang harus diambil adalah mengelola pluralisme tersebut melalui rasa kebersamaan atas nama negara. Ia juga menamakan rasa kebersamaan tersebut sebagai kesadaran atas perbedaan dan keberagaman (Geertz, 1965). Rasa kebersamaan dan persatuan tersebut dianggap mampu menjadi fondasi dalam menjaga stabilitas negara. Bahkan rasa kebersamaan merupakan cerminan negara demokrasi.

Tidak jauh berbeda dengan Geertz, Rauf berpendapat bahwa konflik sebagai suatu hal yang wajar dan tidak perlu dihilangkan, termasuk konflik etnis, agama, dan lainnya. Dalam negara demokrasi, konflik harus dikelola sehingga rakyat dapat hidup secara damai dan penuh toleransi. Penanganan konflik yang dianjurkan dalam negara demokrasi berupa cara persuasif (Rauf, 2000). Cara persuasif yang dimaksud adalah penyelesaian konflik secara damai dan pendekatan secara personifikasi terhadap pihak-pihak yang berkonflik. Dengan demikian, langkah yang diambil dalam menangani persoalan primordialisme tidak menyulut persoalan baru.

## 5. Simpulan

Primordialisme merupakan sebuah keniscayaan yang akan selalu ada di sebuah negara yang plural. Isu-isu primordialisme tidak dapat dihilangkan di negara-negara tersebut. Namun, primordialisme dapat dikelola dengan menekankan kepada aspek kebersamaan. Adapun, strategi lain yang paling penting dalam menangkal isu-isu primordial adalah penerapan supremasi hukum. Pada kasus DKI Jakarta, penerapan supremasi hukum berhasil mengatasi konflik yang berkaitan dengan etnisitas dan agama.

Strategi yang juga dapat digunakan untuk menangani isu primordialisme, yaitu alkulturasi. Hal ini berarti terdapat upaya konsolidasi terhadap benturan dan gesekan yang berhubungan dengan etnisitas. Implementasi dari alkulturasi dapat dilihat dalam konteks Kalimantan Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. (2017, Oktober 29). (R. U. Hasanah, Interviewer)
- Aschroft, Bill. Gareth Griffith, dan Helen Tiffin. (1995). *The Post-colonial Studies Reader*. Routledge
- Buchari, S. A. (n.d.). *Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran*. Retrieved November 5, 2017, from Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran: [http://library.fisip.unpad.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=31](http://library.fisip.unpad.ac.id/index.php?p=show_detail&id=31)
- Davis, N. Y. (2000). *Gender and Nation, serial Politics and Culture*. London: Sage Publication.
- Feith, H. (1973). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Geertz, C. (1965). The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States. In C. Geertz, *Old Societies and New States* (pp. 105-157). New York: The Free Press.
- Insin, E. E., & Wood, P. K. (1999). *Citizenship and Identity*. London: Sage Publication.
- Kellas, J. G. (1998). *The Politics of Nationalism and Ethnicity*. Houndmills: Macmillan Press.
- Kristianus. (2011). Nasionalisme Etnik di Kalimantan Barat. *Masyarakat Indonesia*, XXXVII(2), 147-176.
- Meij, L. S. (2009). *Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa. Sebuah Kajian Pascakolonial*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Neuman, L. (2013). *Social Research Methods 7th Edition*. Boston, USA: Allyn&Bacon.
- Rauf, M. (2000). *Konsensus Politik: Sebuah Penajagan Teoritis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Salim, K. (2015). Politik Identitas di Maluku Utara. *Jurnal Politik*, 11(2), 1667-1678.
- Suseno, N. (2010). *Kewarganegaraan: Tafsir, Tradisi, dan Isu-isu Kontemporer*. Depok: Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Tanasaldy, T. (2014). Politik Identitas Etnis di Kalimantan Barat. In H. S. Nordholt, G. v. Klinken, & I. K. Hoogenboom, *Politik Lokal di Indonesia* (pp. 461-490). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta.
- Weiner, M. (1971). Political Integration and Political Development. In J. Finkle, & R. Gable, *Political Development and Social Change*. New York: John Wiley&Son, Inc.
- Weiner, M. (1977). Integrasi Politik dan Pembangunan Politik. In Y. Muhaimin, & C. MacAndrews, *Masalah-masalah Pembangunan Politik* (pp. 40-49). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wriggins, H. (1977). Integrasi Bangsa. In Y. Muhaimin, & C. MacAndrews, *Masalah-masalah Pembangunan Politik* (pp. 50-60). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Young, I. M. (1990). *Justice and the Politics of Difference*. Pricetown: Pricetown University Press.

## **FUNDAMENTALISME ISLAM DALAM PILKADA DKI JAKARTA TAHUN 2017**

**Yusa Djuyandi**

Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia,  
yusa.djuyandi@unpad.ac.id

**Mohammad Fazrulzaman Azmi**

Mahasiswa Program Pascasarjana, Ilmu Politik,  
Universitas Padjadjaran, Indonesia, mfazrulzamanazmi@gmail.com

---

### **ABSTRAK**

*Pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 politik identitas muncul dalam berbagai macam isu, dan salah satu isu yang begitu kuat adalah soal fundamentalisme Islam. Adanya pernyataan kontroversial dari petahana, Basuki Tjahaja Purnama, terkait Surat Al-Maidah ayat 51 menjadi pemicu atas membesarnya gerakan fundamentalisme Islam, sebab sebelumnya gerakan ini kurang mendapat respon dari masyarakat. Atas dasar persoalan tersebut maka penelitian ini mengangkat isu politik identitas yang terkait dengan fundamentalisme Islam dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana data primer bersumber dari hasil observasi peneliti dan data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan pemberitaan media massa. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kaum fundamentalisme Islam di Indonesia mencoba untuk mengusung konsepsi ke-Islaman bukan hanya sekedar menjadi aliran dan ritual keagamaan melainkan juga aliran politik, hal ini tampak dari adanya gerakan, tindakan dan aksi yang mereka lakukan ketika Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Meskipun gerakan yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis mendapatkan momentum yang tepat untuk meningkatkan atensi masyarakat melalui kesalahan sikap yang dilakukan oleh petahana, namun konsistensi gerakan mereka*

*dalam membangun kesadaran terhadap identitas keagamaan yang kemudian pada akhirnya mampu memunculkan adanya garis pembeda' atau politik perbedaan antara calon gubernur yang beragama Islam dan non-Islam.*

**Kata Kunci:** Pilkada, DKI Jakarta, Fundamentalisme, Islam, Gerakan.

---

## ABSTRACT

*In the 2017 regional election of DKI Jakarta, political identity emerged in a variety of issues, and one of the strong issues is Islamic fundamentalism. The existence of a controversial statement from incumbent, Basuki Tjahaja Purnama, related Surat Surah Al-Maidah verse 51 which became the trigger for the growing Islamic fundamentalism movement, because previously this movement received less response from the community. On the basis of this issue, this research raises the issue of political identity associated with Islamic fundamentalism in the local elections of DKI Jakarta in 2017. This research uses qualitative method, where the primary data comes from the observation of the researcher and the secondary data comes from books, journals, and news coverage in mass media. Based on the research results can be seen that the Islamic fundamentalism in Indonesia tries to carry the concept of Islamization is not just a flow and religious ritual but also the flow of politics, it can be seen from the movement and action they did in the local elections of DKI Jakarta 2017. Although the movement by fundamentalists gained the right momentum to increase the attention of the people through the misconduct of the petahana, the consistency of their movement in building religious religious awareness was finally able to create a distinctive line or political distinction, between candidate governor Muslims and non-Muslims.*

**Keywords:** Local Election, DKI Jakarta, Fundamentalism, Islam, Movement

---

### 1. Pendahuluan

Kebangkitan agama menjadi fenomena yang menarik dikarenakan terjadi ketika umumnya orang-orang berpikir bahwa kekuatan rasional yang berdasarkan sains dan teknologi telah berhasil menepikan misteri spiritual dari kerangka berpikir manusia modern.

Sehingga, manusia modern menyangka bahwa kecukupan materi dapat memenuhi kebahagiaan manusia, dalam konteks politik, siapa pun pemimpinnya tidak menjadi persoalan signifikan, asalkan kinerjanya dapat memenuhi kepuasan publik. Namun dalam situasi tersebut muncul gerakan-gerakan fundamentalis



agama yang terus memperjuangkan apa yang menjadi keyakinannya (Jamhari & Jahroni, 2004: 11). Fenomena tersebut merupakan suatu kebangkitan (*revival*), namun sebagian lainnya berpendapat bahwa hal ini merupakan suatu penemuan kembali (*rediscovery*) (Wuthnow, 1987). Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 diikuti oleh tiga pasang kandidat yang berkontestasi memperebutkan kursi Gubernur dan Wakil Gubernur di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden RI dalam Pilpres 2014 menyebabkan adanya peralihan kursi kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta pada wakilnya, yakni Basuki T. Purnama. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti oleh terpilihnya Djarot S. Hidayat sebagai Wakil Gubernur menggantikan Basuk T. Purnama. Ahok-Djarot yang merupakan Gubernur-Wakil Gubernur kembali mengajukan diri sebagai kontestan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

Naiknya, Basuki yang sering disapa 'ahok' menjadi Gubernur menggantikan Jokowi menuai berbagai respon dari pelbagai kalangan, khususnya kaum fundamentalis Islam. Namun, hal itu tidak menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap pemerintahan Ahok saat itu, melainkan perlahan wacana kontra-rezim semakin memudar, seperti halnya aksi pengangkatan Gubernur tandingan yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) yang tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap konstelasi politik DKI Jakarta saat itu. Hingga pada puncaknya, saat begitu masifnya pemberitaan mengenai komentar Ahok terkait Surat Al-Maidah Ayat 51, respon dari pelbagai gerakan ke-Islaman semakin masif adanya.

Ahok yang terdaftar sebagai kandidat atau kontestan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 menuai pelbagai kecaman dari kelompok-kelompok Agama, hingga berujung pada proses hukum yang merugikannya sebagai kandidat saat itu. Begitu masifnya pemberitaan media massa, kemudian gencarnya propaganda-propaganda mengenai kasus 'penistaan agama' menjadi semacam 'snow ball' yang terus membesar dan berujung pada kekalahan pasangan nomor urut dua, yakni Basuki-Djarot. Kontruksi wacana tersebut tidak terlepas dari peran gerakan-gerakan kelompok fundamentalisme agama (Islam) yang berkepentingan untuk mencegah Basuki menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta masa bhakti 2017-2022.

Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas warga negaranya beragama Islam, tentu konteks ke-Islaman akan sangat berpengaruh terhadap laju atau perolehan suara dari proses Pemilu yang berlangsung. Isu agama yang begitu kuat pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 menjadi sebuah wujud dari politik identitas berupa fundamentalisme Islam yang menekankan pada keutuhan pemaknaan terhadap kasus penistaan agama dan sikap politik dari ummat Islam, khususnya yang ada di wilayah DKI Jakarta. Bangkitnya semangat politik berdasarkan religiusitas dapat disebabkan sebagai suatu bentuk dari dedikasi pemeluk agama terhadap ajaran agamanya.

Fenomena kebangkitan agama tersebut merupakan penguatan paham keagamaan yang berkarakter fundamentalis (Jamhari & Jahroni, 2004: 12). Gellner (dalam Arifin, 2005) berpendapat bahwa gagasan dasar

fundamentalis adalah suatu agama tertentu yang dipegang kokoh dalam bentuk literal (harfiah) dan bulat, tanpa kompromi, pelunakan, reinterprestasi dan tanpa pengurangan. Fundamentalis tidak hanya sebatas pada agama, tetapi juga pada politik, sosial budaya. Karena baginya fundamentalis adalah suatu pandangan yang di tegakkan atas keyakinan baik bersifat agama, politik, maupun budaya yang dianut pendiri dan ajaran-ajarannya ditanamkan dan senantiasa menjadi rujukan.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka kemudian dirumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana fundamentalisme Islam dalam Pilkada DKI Jakarta 2017?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data primer yang diperoleh peneliti berasal dari hasil observasi atas aksi-aksi protes yang terjadi menjelang Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Aksi itu ditujukan sebagai bentuk protes kepada Basuki Tjahaja Purnama, kandidat Gubernur DKI Jakarta yang juga merupakan petahana, karena dianggap menistakan agama Islam.

Data penelitian ini juga didukung dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan pemberitaan media massa yang relevan dengan kajian penelitian.

Data-data yang diperoleh kemudian diverifikasi dan dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Verifikasi data dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu membandingkan data-data yang diperoleh sehingga sampai pada keyakinan bahwa data yang diperoleh adalah valid.

## 3. Perpektif Teori

### 3.1 Politik Identitas

Identitas menurut Jeffrey Week (dalam Widayanti, 2009) berkaitan dengan kepemilikan atau keanggotaan individu dalam kelompok (*belonging*) berdasarkan persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang dengan yang lain. Sehingga terdapat dua kategori di dalamnya, yakni identitas sosial mengenai kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas. Hal ini menentukan posisi subjek di dalam relasi atau interaksi sosialnya. Kemudian, identitas politik mengenai nasionalitas dan kewarganegaraan (*citizenship*). Hal ini menentukan posisi subjek di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa kepemilikan (*sense of bellonging*) dan sekaligus menandai posisi subjek yang lain di dalam suatu pembedaan (*sense of otherness*) (Setyaningrum, 2005: 19).

Kemudian, Identitas politik (*political identity*) merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik. Sedangkan, politik identitas (*political of identity*) mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik. Oleh karena itu, politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Morowitz (1998), mendefinisikan politik identitas memberikan garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Karena garis-garis penentuan tersebut tampak tidak dapat dirubah, maka status sebagai anggota bukan anggota dengan serta merta tampak bersifat permanen.

Sehingga dapat kita maknai bahwa politik identitas merupakan 'politik perbedaan'.

Ubed Abdillah (2002) menjelaskan bahwa terdapat tiga pola perkembangan gerakan politik identitas, yakni pola *pramodern*, menggambarkan perpecahan objektif yaitu ketika terdapat perpecahan fundamental karena terdapat gerakan sosial yang menyeluruh. Hal ini disebabkan mobilisasi secara ideologis atas aspirasi dari pemimpin yang umumnya bertujuan untuk merampas kekuasaan. Kemudian, pola *modern*, hal ini menggunakan pendekatan kondisional yaitu ketika keterpecahan membutuhkan sumber-sumber untuk dimobilisasi. Terdapat keseimbangan dalam pola aksi jenis ini, sehingga terdapat partisipasi yang seimbang baik itu dari atas maupun dari bawah. Model ini lebih bertujuan pada pembagian kekuasaan. Selain itu, terdapat pola *postmodern* yang memiliki pola gerakan dari dinamikanya sendiri, sehingga protes muncul dari berbagai macam kesempatan individual, dengan demikian tidak terdapat perpecahan yang dominan. Pola aksi model ini biasanya muncul karena kesadaran diri yang bertujuan untuk otonomi.

### 3.2 Fundamentalisme Islam di Indonesia

Istilah fundamentalisme muncul dari luar tradisi sejarah Islam, dan pada mulanya merupakan gerakan keagamaan kaum Protestan di Amerika Serikat pada tahun 1920-an. Namun terlepas dari latar belakang tersebut, istilah fundamentalisme sering digunakan untuk menunjuk fenomena keagamaan yang memiliki kemiripan dengan karakter dasar fundamentalisme protestan. Pada dasarnya fenomena pemikiran, gerakan, dan kelompok fundamentalisme terjadi di

semua agama, seperti fundamentalisme Islam, Yahudi, Hindu, dan Budhisme. Fundamentalisme juga dapat muncul dalam bentuk apapun dan dimanapun ketika orang-orang melihat adanya kebutuhan untuk melawan budaya sekuler (*godless*), bahkan ketika mereka harus menyimpang dari tradisi ortodoks mereka untuk melakukan perlawanan (Ratnasari, 2010).

Pada dasarnya, gerakan fundamentalis tidak muncul begitu saja sebagai respons spontan terhadap datangnya modernisasi yang dianggap sudah keluar terlalu jauh. Kaum religius berusaha mereformasi tradisi mereka dan memadukannya dengan budaya modern, seperti yang dilakukan pembaharu Muslim. Ketika cara-cara moderat dianggap tidak membantu, beberapa orang menggunakan metode yang lebih ekstrem, dan saat itulah gerakan fundamentalis lahir. William Montgomery Watt (dalam Arifin, 2005) mendefinisikan bahwa kelompok fundamentalis Islam adalah kelompok Muslim yang sepenuhnya menerima pandangan dunia tradisional serta berkehendak mempertahankannya secara utuh tanpa adanya suatu arus modernisasi di dalamnya.

Seiring dengan itu, Martin E. Marty dan R. Scott Appleby (dalam Arifin, 2005) berpendapat istilah fundamentalisme cukup tepat untuk menjelaskan fenomena tertentu dari gerakan keagamaan yang terjadi pada semua agama, termasuk Islam. Meskipun istilah fundamentalisme pada mulanya digunakan untuk menjelaskan satu gerakan Protestan di Amerika, namun ada ciri-ciri tertentu dari gerakan itu yang dapat ditemukan pada gerakan-gerakan dalam agama-agama lain diseluruh dunia.

Marty dan Appleby (dalam Arifin, 2005) menyebutkan bahwa fundamentalisme merupakan respons terhadap modernitas. Fundamentalisme Islam di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yakni tradisional dan modern. Fundamentalisme tradisional diwakili oleh kelompok yang menekankan pendekatan literal dan skriptural terhadap sumber Islam, seperti Persatuan Islam (Persis), dan dalam konteks mutakhir Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa-fatwanya. Sementara itu, fundamentalisme modern atau neo-fundamentalisme dalam politik diwakili misalnya oleh partai politik Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), dan partai-partai Islam lain yang bercita-cita mendirikan “negara Islam” dengan dasar syariah dan ideologi Islam (Mahendra, 1999).

Mereka yang memperjuangkan Piagam Jakarta sebagai dasar negara termasuk dalam kelompok fundamentalisme atau neo-fundamentalisme. Mereka tidak mempersoalkan watak negara-bangsa dengan demokrasi sekularnya. Namun, secara substansial sesungguhnya terdapat paradoks antara penerimaan mereka terhadap sistem politik sekular dengan perjuangan mereka menerapkan syariat Islam. Jadi, ditemukan adanya sikap kompromistis atau bahkan pragmatis di kalangan kelompok fundamentalis Islam ini, tidak lagi taktik politik. Munculnya beberapa gerakan fundamentalisme dapat dilihat dari penelitian Yusril Ihza Mahendra yang bertitik tolak pada perspektif sosiologis mengenai fundamentalisme. Dalam penelitian tersebut digambarkan mengenai institusi politik yang menjadi pengaruh fundamentalisme dan modernism yaitu Masyumi di Indonesia dan Jama’ati

Islam di Pakistan. Dengan menggunakan prespektif bahwa fundamentalisme dan modernism bukan sekedar sebagai aliran keagamaan namun juga sebagai aliran politik (Mahendra, 1999).

Berikut terdapat beberapa contoh gerakan fundamentalisme agama di Indonesia:

- ***Hizbut Tahrir***, gerakan ini merupakan organisasi atau gerakan yang mendasarkan dirinya pada pemikiran-pemikiran Islam, dimana aktivitas mereka yakni mengemban Islam sebagai sarana mengubah realitas masyarakat yang “rusak” kemudian mentransformasikannya menjadi masyarakat yang Islami, dalam hal lain hizbut tahrir juga selalu memperhatikan hukum Shara’ sebagai cara mereka menyelesaikan urusan dengan masyarakat. HT dapat dikategorikan sebagai kelompok fundamentalisme. Sejak awal berdirinya hinggapada perkembangannya saat ini khittah gerakan HT adalah politik. Bagi hizbut tahrir, politik merupakan instrumen yang sangat penting dalam mengentas persoalan keterpurukan ummat Islam dan membawanya kembali seperti pada masa kejayaannya. Politik yang dikehendaknya adalah suatu sistem yang memiliki landasan kuat dalam al-Qur’an dan al-Hadits. Salah satu aktivitas atau juga komitmen yang menonjol Hizbut tahrir dalam bidang politik yakni Hizbut Tahrir ini menentang kekufuran, keyakinan yang ‘keliru’ dengan menjelaskannya akan kekeliruannya kepada ummat dan kerusakannya serta menjelaskan hukum Islam dalam masalah tersebut. (Faidah, 2008: 3-4)

- **Front Pembela Islam** atau yang disingkat FPI merupakan organisasi sosial keagamaan di Indonesia. Aktivitas yang dilakukan FPI yakni melakukan penertiban terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap maksiat atau kegiatan yang bertentangan dengan Syari'at Agama Islam yang sering berujung pada Kekerasan. Latar belakang sosial - Politik berdirinya Front Pembela Islam yakni adanya penderitaan yang panjang yang di alami ummat Islam di Indonesia sebagai akibat adanya pelanggaran HAM yang di lakukan oleh pihak penguasa, Kegagalan aparat negara untuk menegakan hukum dan menjamin ketertiban masyarakat, Adanya kewajiban bagi setiap Muslim untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam, Adanya kewajiban bagi setiap Muslim untuk dapat menegakkan *Amar Makruf Nahi Munkar*.

Tujuan berdirinya FPI yakni untuk membantu pemerintah dalam menumpas problem sosial kemasyarakatan, seperti prostitusi, perjudian, serta transaksi miras dan narkoba. Untuk merealisasikan tujuannya, Juga dalam memaksimalkan kerja organisasi, FPI membentuk 2 struktur organisasi yakni, Jamaah FPI melaksanakan kegiatan sosial keagamaan, seperti pengajian, bakti sosial dan pendidikan. Sedangkan, laskar FPI melakukan *Pressure* atau tekanan fisik untuk penyerbuan tempat hiburan, *sweeping*, dan demonstrasi. Laskar ini lebih menyerupai militer atau milisi di bawah komando sang

ketua umum FPI. Sebagai doktrin kepada pengikut gerakan FPI bahwa pemimpin mereka adalah para haba'ib dan ulama yang merupakan cerminan orang-orang suci yang mendapat legitimasi agama. (Syaefudin, 2014: 260-262)

- **Laskar Jihad**, dibentuk tanggal 30 Januari 2000 tidak lama setelah runtuhnya Orde Baru sebagai tanggapan atas kekerasan agama antara kaum Muslimin dan Nasrani di Maluku. Laskar ini merupakan sayap paramiliter dari Forum Komunikasi Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah (FKAWJ) yang didirikan dua tahun sebelumnya. FKAWJ secara formal didirikan oleh pembentuk Laskar Jihad, yakni Ja'far Umar Thalib, ketika dia dan para pengikutnya mengadakan tabligh akbar di Solo, Jawa Tengah, 14 Februari 1998. Laskar Jihad sebagai sayap para militer FKAWJ, mencerminkan struktur formal militer Indonesia terdiri dari brigade, batalion, kompi, peleton dan regu, dan bahkan memiliki badan intelejen sendiri. Ditunjuk sebagai panglima Laskar Jihad, Ja'far Umar Thalib didukung oleh sebagian komandan lapangan, termasuk Ali Fauzi dan Abu Bakar Wahid al-Banjari (Hasan, 2005).

Adapun keberadaan Laskar Jihad adalah sebuah reaksi atas apa yang mereka persepsikan sebagai kezaliman atas kaum Muslimin di Maluku. Dalam hal ini, menurut Noorhadi, pada dasarnya Laskar Jihad percaya akan adanya konspirasi tingkat dunia yang dipimpin oleh Amerika Serikat, yang bermaksud merendahkan Islam dan kaum

Muslimin. Mereka meyakini bahwa kaum Muslimin adalah korban yang terang benderang dari konspirasi global tersebut. Pada tanggal 12 Oktober 2002, Laskar Jihad dibubarkan berdasarkan pada sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, salah seorang tokoh salafi terkemuka dari Yaman yang menjadi panutan aktivis salafi di Indonesia. Alasan pembubaran dalam fatwa tersebut karena gerakan ini telah menyimpang dari tujuan semula untuk berjihad membela kaum Muslimin di Maluku. Selain itu, Ja'far Umar Thalib juga menambahkan bahwa situasi di Maluku telah pulih sehingga Laskar Jihad tidak lagi diperlukan terlibat dalam penanganan konflik (Sholehuddin, 2013).

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Politik identitas merupakan suatu mekanisme pengelolaan atau pengorganisasian identitas politik atau identitas sosial sebagai sumber atau modal politik, sehingga identitas tersebut dapat membantu yang berkepentingan dalam mencapai tujuannya. Seiring dengan pendapat Morowitz (1998) yang menjelaskan bahwa politik identitas memberikan garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Sehingga, dalam konteks ini terdapat penekanan antara kelompok yang diakui dan kelompok yang tidak diakui. Penekanan terhadap perbedaan tersebut, menjadi strategi tersendiri bagi kelompok-kelompok fundamentalis Islam dalam mencapai tujuannya untuk memproses kasus 'penistaan agama' yang dilakukan

oleh BTP, dan mewujudkan Gubernur atau pemimpin daerah yang beragama Islam di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Agama merupakan suatu identitas, yang lazimnya akan senantiasa melekat disetiap individu, khususnya di Indonesia, mengingat bahwa setiap warga negara berkewajiban untuk melaksanakan Pancasila, terutama sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, kesadaran terhadap identitas keagamaan tersebut cenderung fluktuatif atau dinamis, seiring dengan tingkat pemahaman tentang keagamaan dari seseorang dan konsistensi dalam melaksanakan aturan agama tersebut. Pada prinsipnya, agama menjadi pandangan mendasar atau pedoman bagi manusia dalam menjalani kesehariannya, terlebih bagi umat Islam yang memiliki petunjuk atau tata cara beragama yang begitu komprehensif. Akan tetapi, sejatinya setiap agama memiliki pedoman masing-masing, yang dituliskan dalam suatu 'kitab suci', seperti halnya bagi umat Islam adalah Al-Qur'an, kemudian Al-Kitab (Injil) bagi umat Kristen, dan lain sebagainya.

Kemudian, apakah kesadaran terhadap identitas keagamaan tersebut dapat menjadi kesadaran atau identitas politik, yang digunakan sebagai dasar atau perspektif utama dalam menyeleksi kandidat atau pemimpin yang akan kita pilih? Bagi peneliti, hal tersebut sangat memungkinkan terjadi, terlebih apabila dalam suatu agama tersebut terdapat ayat atau aturan yang berkaitan dengan sikap politik penganut agama tersebut dalam memilih pemimpin atau dalam menggunakan hak politiknya. Selain itu, kesadaran identitas keagamaan tersebut dapat menjadi identitas politik, bila terdapat persinggungan antara aspek

keagamaan dan aspek politik atau kekuasaan, sehingga kedua instrumen tersebut saling mempengaruhi, dan mewujudkan sikap politik seseorang dalam merespon suatu fenomena politik. Identitas politik merupakan konstruksi pada subjek, sehingga menentukan posisi kepentingannya dalam suatu ikatan komunitas politik. Dengan demikian, subjek memiliki suatu rasa kepemilikan terhadap suatu identitas, sehingga hal tersebut menandai posisi subjek dan yang lainnya dalam suatu perbedaan. Maka dari itu, akan menjadi semakin jelas titik perbedaan tersebut apabila terdapat garis penegas yang membedakan antara satu identitas dan identitas lainnya. Terlebih apabila garis penegas dari perbedaan tersebut dimunculkan melalui konflik yang berpotensi menimbulkan *'political effect'* yang lebih besar terhadap dinamika politik di suatu daerah.

Menjelang Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, muncul pemberitaan yang begitu masif, terkait dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (BTP) di Kepulauan Seribu saat kunjungan kerja. Setelah diproses, kasus tersebut menyebabkan BTP harus mendekam dalam tahanan selama dua tahun. Fenomena tersebut menuai pelbagai dinamika, terlebih sangat mempengaruhi prediksi dari kontestasi politik Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Hal-hal yang dilakukan BTP tersebut telah menuai kecaman dari pelbagai kelompok, terlebih bagi kelompok-kelompok fundamentalis Islam, terutama FPI, HTI, dan lain sebagainya. Disisi lain, kelompok tersebut memang menunjukkan sikap kontra terhadap kepemimpinan BTP dan menginginkan pergantian kepemimpinan di periode

2017-2022. Hal-hal yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis tersebut tiada lain berasaskan pada garis pembeda, yakni perbedaan agama yang dianut oleh BTP dan mayoritas warga DKI Jakarta yang beragama Islam.

Berdasarkan 'garis pembeda' tersebut, serta kasus penistaan agama yang dilakukan oleh BTP, memunculkan pelbagai gerakan yang membangkitkan fundamentalisme Islam sebagai kekuatan politik yang sulit dibendung oleh kelompok manapun. Melihat dinamika tersebut tidak hanya menarik perhatian warga DKI Jakarta semata, melainkan seluruh umat Muslim di Indonesia, bahkan menuai berbagai kecaman dari umat Muslim di dunia. Masifnya pemberitaan terkait dengan kasus penistaan agama yang awalnya disebabkan oleh komentar BTP soal Surat Al-Maidah Ayat 51, memberikan kesadaran bagi umat Muslim, khususnya mengenai implementasi dari Surat Al-Maidah Ayat 51. Beragamnya tingkat pemahaman seorang Muslim mengenai ayat tersebut, atau bahkan sebelumnya banyak yang tidak mengetahui substansi dari ayat tersebut, kemudian telah memberikan input soal penistaan agama yang dilakukan oleh BTP. Melalui pelbagai propaganda, baik dalam dunia *'real'* atau virtual, Ummat Islam diberikan stimulan untuk menelaah ayat tersebut dan meyakini secara mendalam (fundamental) terhadap substansinya. Sehingga dengan demikian, semakin menarik partisipasi umat Islam dalam menyikapi Pilkada DKI Jakarta berdasarkan substansi dari ayat tersebut.

Berdasarkan fenomena di atas, Politik identitas dapat dimaknai sebagai gerakan politik yang terfokus pada perbedaan sebagai hal utama. Sehingga terdapat

ketegasan dalam menentukan siapa yang disertakan dan siapa yang akan ditolak. Hal itu dikarenakan garis pembatas yang menentukan dan memiliki ketentuan yang tidak dapat dirubah. Maka dari itu, status anggota dan bukan anggota akan tampak dan bersifat permanen. Dengan demikian, umumnya politik identitas dimaknai sebagai politik perbedaan. Berdasarkan pada fenomena yang menimpa BTP pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, dapat dianalisis bahwa kelompok-kelompok fundamentalis agama berhasil meningkatkan kesadaran identitas keagamaan ummat Islam, dan memberikan pemahaman yang fundamental mengenai substansi dari Surat Al-Maidah Ayat 51. Hal ini berimplikasi pada munculnya identitas politik ummat Islam yang menghayati substansi ayat tersebut, kemudian mewujudkan sikap politiknya untuk tidak memilih BTP dalam ajang kontestasi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

Istilah fundamentalis muncul di lingkungan agama Nasrani khususnya di Amerika Serikat, merujuk pada bentuk-bentuk konservatif protestanisme. Gerakan ini pada umumnya mengarah pada anti kaum modernis dengan interpretasi yang terbatas terhadap kitab Injil dan sangat menekankan etika tradisional Kristen (Denny, 1987: 117). Fundamentalisme merupakan sebuah aliran atau paham yang berpegang teguh pada dasar-dasar agama secara ketat melalui penafsiran terhadap kitab suci secara rigid dan literalis (Azra, 1993). Akan tetapi, istilah ini seakan menjadi stigma negatif bagi kelompok-kelompok Islam konservatif dan sering diposisikan dan disifati dengan hal-hal yang identik dengan pejoratif (bersifat merendahkan).

Mereka dianggap sebagai kelompok pembangkang, banyak melakukan tindak kekerasan seperti melakukan teror, intimidasi, bahkan pembunuhan dalam mencapai tujuannya.

Terlepas dari segala kontroversi, fundamentalisme Islam pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, fenomena ini telah menimbulkan gerakan-gerakan masif dengan jumlah massa yang 'luar biasa', terlebih pada aksi 'bela Islam' tanggal 2 Desember 2016 (aksi 212), yang melibatkan begitu banyak massa ummat Islam hingga dapat memenuhi area monumen nasional dan sekitarnya. Terdapat pelbagai respon dari peristiwa tersebut, baik itu yang pro maupun kontra, termasuk respon dari aparat kepolisian yang menduga bawah ada tujuan makar dari pihak-pihak yang memanfaatkan aksi tersebut.

Tidak dipungkiri bahwa di balik setiap aksi massa selalu ada potensi politik yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok politik yang berkepentingan, tujuannya tentu untuk untuk mendapat keuntungan politik menjelang Pilkada, dan hal ini juga terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Isu-isu agama yang muncul memang memberikan stigma adanya politisasi agama, namun hal itu juga sebenarnya lahir karena adanya momentum yang memunculkan aksi tersebut, yaitu adanya blunder politik yang dilakukan oleh petahana (Basuki Tjahaja Purnama) dengan mengomentari soal dari Surat Al-Maidah Ayat 51.

Bagi peneliti, fenomena aksi oleh kelompok Islam jelas dapat dianalisa dari unsur politis, karena bersinggungan dengan kekuasaan. Namun mengenai *grand design* utama yang memprakarsai penyelenggaraan gerakan-gerakan bela



Islam tersebut dibutuhkan penelitian lebih mendalam. Akan tetapi, penulis beranggapan bahwa fenomena tersebut merupakan suatu bentuk dari bangkitnya fundamentalisme Islam, atau kesadaran warga negara, khususnya yang beragama Islam, terhadap aturan keagamaan yang harus mereka taati. Sehingga misi politik dari gerakan-gerakan fundamentalis Islam yang mewacanakan pemimpin harus dari Islam di wilayah mayoritas Muslim dapat diterima oleh khalayak ummat Islam. Dengan demikian, memunculkan gerakan-gerakan signifikan yang dapat meruntuhkan rezim BTP saat itu.

Bangkitnya kesadaran identitas ke-Islaman sebagai suatu identitas politik menjadi wacana yang sukar dijelaskan secara nalar, terlebih hal tersebut merupakan aspek spiritual yang bersifat *bhatiniyyah* (terdapat dalam hati atau berkaitan dengan aspek batin seseorang) dapat dirasakan langsung oleh setiap pemeluk agama terhadap keyakinannya masing-masing. Oleh karena itu, fenomena fundamentalisme ini disertai dengan gerakan-gerakan yang di luar nalar, seperti halnya gerakan jalan dari Ciamis menuju Jakarta untuk mengikuti aksi 212, yang dipandang sebagai langkah jihad.

Para pemimpin atau politisi seringkali menggunakan politik identitas sebagai retorika politik, dengan sebutan 'putra daerah' yang memiliki kesempatan lebih dalam memperoleh kekuasaan dibandingkan dengan 'pendatang'. Sehingga politik identitas dijadikan sebagai alat politik dalam menggali simpati publik dan memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya. Namun, wacana hari ini politik identitas tidak hanya berhenti pada aspek 'kedaerahan',

melainkan kembali membangkitkan wacana fundamental, salah satu diantaranya adalah aspek keagamaan. Agama dapat menjadi sarana politik identitas dalam mewujudkan suatu kepentingan politik, sehingga penulis berpendapat bahwa agama dan politik tidak dapat dipisahkan, terlebih apabila terdapat kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh fundamentalis yang memiliki pengaruh besar terhadap dinamika politik dalam suatu wilayah tertentu.

Indonesia sebagai negara Pancasila, hendaknya dapat menyikapi dengan 'arif' fenomena politik identitas berdasarkan keagamaan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat persatuan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Pemerintah hendaknya menekankan warga negara untuk kembali pada kesepakatan umum terhadap dasar negara (Pancasila) dan Undang-Undang 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, yang secara jelas memuat poin penting terkait dengan persatuan bangsa. Sehingga ego atau politik identitas kedaerahan atau keagamaan yang terlalu tinggi hendaknya diminimalisir untuk kepentingan nasional, demi terciptanya integrasi nasional dan kondusifitas pemerintahan.

Fenomena yang diangkat dalam penelitian ini lebih condong pada konteks bangkitnya fundamentalisme Islam. Ubed Abdillah (2002) menjelaskan bahwa terdapat pola dalam gerakan politik identitas, yakni ketika terdapat perpecahan fundamental karena gerakan sosial yang menyeluruh sehingga memunculkan adanya mobilisasi secara ideologis atas aspirasi yang ada untuk menumbangkan kekuasaan. Namun dalam konteks ini, penulis mengapresiasi kesadaran demokrasi dari ummat Islam, khususnya

yang berstatus sebagai warga DKI Jakarta. Perbedaan pandangan yang fundamental, serta adanya politik identitas dalam ajang kontestasi Pilgub DKI, tidak menyebabkan konflik yang berimplikasi pada kekerasan atau konflik fisik.

Selain itu, penulis beranggapan bahwa apabila fundamentalisme dengan menggunakan keagamaan ingin dijalankan secara konsisten maka hal itu tidak boleh berhenti pada konteks perebutan kekuasaan semata atau ajang kontestasi Pilkada. Fundamentalisme berdasarkan kesadaran agama tersebut juga seharusnya dapat membangun kesadaran ummat Islam untuk turut serta mengawal pemerintahan agar tidak menyimpang, turut serta mewujudkan konsolidasi politik, demi kehidupan masyarakat yang maju, damai, adil dan sejahtera. Sehingga setiap ummat beragama dapat menjalankan kegiatannya dengan baik, satu sama lainnya saling menghargai perbedaan dalam tatanan kehidupan yang demokratis.

## 5. Simpulan

Fundamentalisme dapat muncul dalam bentuk apapun dan dimanapun ketika orang-orang melihat adanya kebutuhan untuk melawan budaya

sekuler (*godless*), bahkan ketika mereka harus menyimpang dari tradisi ortodoks untuk melakukan perlawanan. Kaum fundamentalisme di Indonesia mencoba untuk mengusung konsepsi ke-Islaman dalam setiap tindakan dan aksinya. Dengan demikian, fundamentalisme bukan sekedar sebagai aliran keagamaan namun juga sebagai aliran politik.

Pada konteks ini, fundamentalisme hadir sebagai wacana politik identitas yang menghasilkan dukungan serta partisipasi yang luar biasa dari berbagai elemen ummat Islam, bahkan di luar daerah DKI Jakarta. Gerakan-gerakan fundamental menghasilkan pemahaman terhadap identitas keagamaan yang berimplikasi pada munculnya sikap politik warga Muslim DKI, berdasarkan pemahaman substantif dari fenomena penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama di kepulauan seribu. Oleh karena itu garis pembeda atau politik perbedaan antara non Muslim dan Muslim yang layak dipilih sebagai Gubernur menjadi pengaruh penting bagi mereka yang menghayati secara fundamental substansi dari Surat Al-Maidah Ayat 51.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, U.(2002). *Politik Identitas Etnis*. Magelang: IndonesiaTera.
- Arifin, S. (2005). *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalis*. Malang: UMM Press.
- Azra, Azyumardi. (1993). "Fenomena Fundamentalisme dalam Islam" dalam *Ulumul Qur'an* No. 3 Vol. IV.
- Chandakirana, K. (1989). "Geertz dan Masalah Kesukuan". Jakarta. Prisma No. 2/1989.
- Denny, Frederick, M. (1987). *Islam and The Muslim Community*. New York: Herper & Row
- Faidah, M. (2008). *Konstruksi Ideologis Gerakan Islam Hizbut Tahrir*. E-journal Unesa.
- Hasan, N. (2005). *Laskar Jihad: Islam, Militancy and the Quest for Identity in Post New Order Indonesia*. New York: Cornell Southeast Asia Program.
- Jamhari, & Jahroni, J. (2004). *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahendra, Y. I. (1999). *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'ati Islam Pakistan*. Jakarta: Paramadina.
- Morowitz, D.L. (1998). "Demokrasi Pada Masyarakat Majemuk". Dalam Larry Diamond dan Mars F Plattner. *Nasionalisme, Konflik Etnik dan Demokrasi*. Bandung: ITB Pres.
- Ratnasari, Dwi. (2010). *Fundamentalisme Islam*. Jurnal Dakwah dan Komunikasi. Vol 4. No 1. Hal 40-57.
- Sholehuddin, M. (2013). *Ideologi Religio-Politik gerakan Salafi Laskar Jihad Indonesia*. Jurnal Politik , Vol 03 Nomor 01.
- Syaefudin, M. (2014). *Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI)*. Jurnal Ilmu Dakwah, Volume 3, Nomor 2 .
- Wuthnow, R. (1987). *Meaning adn Moral Order*. California: The University of California Press.



## **POTENSI POLITISASI ISU-ISU IDENTITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2018**

**Kadek Dwita Apriani**

*Universitas Indonesia, Depok, Indonesia,  
kadek88@gmail.com*

**Irhamna**

*Universitas Indonesia, Depok, Indonesia,  
irhamna.irham@gmail.com*

---

### **ABSTRACT**

*Identity becomes vulnerable when it comes to politicization. Identity has been politicized in many electoral momentums, specifically in highly diverse region. West Kalimantan is suited those characters. There are three major ethnic groups, Melayu, Dayak, and Tionghoa whose have lived side by side in harmony. Yet, people are being forewarned; concerns related to politicization of identity in 2018 West Kalimantan Local Election has been raised. Using quantitative method through surveys to 1000 respondents which proportionally spread across all districts in West Kalimantan, conducted in July-August 2017. This study suggests that the politicization of identity might potentially be used in 2018 West Kalimantan Local Election.*

### **Keywords**

Identity, politicization, West Kalimantan, Local Election

---

## ABSTRAK

*Identitas menjadi unsur yang rentan dipolitisasi dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Politisasi isu-isu identitas dalam sebuah momentum elektoral umumnya muncul di wilayah dengan tingkat heterogenitas tinggi. Kalimantan Barat adalah salah satu dari wilayah dengan karakter tersebut. Di provinsi ini terdapat tiga etnis besar yang hidup berdampingan, yakni Melayu, Dayak, dan Tionghoa. Kekhawatiran mengenai politisasi isu-isu identitas di Kalbar dikemukakan banyak pihak menjelang pemilukada 2018. Dengan menggunakan metode kuantitatif melalui survei terhadap 1000 responden yang tersebar secara proporsional di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat pada bulan Juli-Agustus 2017, penelitian ini menemukan bahwa potensi politisasi isu-isu identitas cukup besar dalam proses Pilkada Kalbar 2018.*

### **Kata kunci**

Identitas, politisasi, Pilkada, Kalimantan Barat

### **1. Pendahuluan**

Dinamika politik lokal di Kalimantan Barat pascareformasi menunjukkan isu identitas dan etnis yang cukup mencolok. Dayak dan Melayu menjadi dua suku yang paling besar dalam perebutan kekuasaan, dan kepentingan politik (Tanasaldy, 2007). Kondisi ini kemudian didukung oleh penyelenggaraan otonomi daerah yang kemudian memberikan dampak signifikan dalam dinamika politik lokal, dalam proses rekrutmen calon kepala daerah misalnya terdapat kecenderungan pemilihan berdasarkan identitas, dalam bentuk asal-usul daerah, etnis, dan agama. Menguatnya penggunaan politik identitas etnis dan agama dalam pemilihan kepala daerah di Kalimantan Barat telah menjadi fenomena umum (Jumadi & Yaakop, 2013).

Secara demografis, persebaran suku bangsa di Kalimantan Barat dapat dibagi dalam tiga kelompok utama: Melayu,

Dayak, dan Tionghoa. Dalam komposisi etnis di Kalbar, Melayu tetap mayoritas, jumlah etnis ini mencapai 43% dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2010). Sementara itu, etnis Dayak menempati urutan kedua dengan jumlah 26% dari total populasi Kalimantan Barat. Pada urutan ketiga secara jumlah ada etnis Tionghoa yang mencapai 8% dari total populasi, jumlah yang sama dengan etnis Jawa (Badan Pusat Statistik, 2010).

Beberapa kelompok etnik memiliki wilayah (teritori) tersendiri, misalnya Kabupaten Sambas menjadi teritori dari Melayu Sambas, dan Kabupaten Mempawah menjadi teritori dari Melayu Mempawah. Untuk etnis Dayak, Kabupaten Bengkayang menjadi teritori dari Dayak Bekati, Kabupaten Landak menjadi teritori dari Dayak Kanayatan, Sekadau untuk Dayak Mualang, dan Melawi untuk Dayak Keninjal (Kristianus, 2011). Etnis Tionghoa menguasai teritori yang penting di sekitar kawasan perkotaan dan pusat

perdagangan seperti di Kota Pontianak, dan Kota Singkawang.

Pada Pilkada 2012 yang lalu, terdapat empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur: (1) Drs. Cornelis, M.H dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M.M yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Damai Sejahtera, dan PIB; (2) H. Armyan Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan Partai Bulan Bintang; (3) H. Morkes Effendi, S.Pd., M.H., dan Ir. H. Burhanuddin A. Rasyid yang diusung oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bintang Reformasi, dan PKNU; dan (4) Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin, M.Pd.K, yang diusung oleh Partai Gerindra dan gabungan 18 partai politik (Handoko, 2012). Pilkada Kalimantan Barat 2012 dimenangkan oleh pasangan Cornelis-Christandy Sanjaya dengan perolehan suara mencapai 52,1%, yang berturut-turut diikuti oleh Morkes Effendi-Burhanuddin Rasyid (25,2%), Armyan Ali-Fathan Rasyid (15,4%), dan Tambul Husin-Barnabas Simin (7,3%).

Gubernur terpilih Cornelis merupakan putra daerah yang bersuku Dayak dan Wakil Gubernur terpilih, Christiandy Sanjaya berasal dari etnis Tionghoa. Komposisi ini menjadi kekuatan tersendiri bagi pasangan calon untuk dapat memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Barat periode 2013-2018, karena berhasil mengalahkan kelompok Melayu.

Setelah sempat reda, isu politik identitas dan pemilihan kepala daerah kembali menggeliat di Kalbar. Salah

satu yang indikasinya adalah munculnya kegaduhan dalam Aksi Bela Ulama 205 (20 Mei 2017). Aksi 205 mengambil waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan Festival Gawai Dayak 2017. Festival tersebut merupakan agenda kebudayaan tahunan Provinsi Kalimantan Barat. Festival ini pada intinya adalah upacara menyambut panen padi, yang sudah berlangsung selama 32 tahun, dan berpusat di kawasan Rumah Adat Radakng. Sementara itu, Aksi 205 merupakan kegiatan penyampaian pendapat yang berpusat di Masjid Raya Mujahidin, Pontianak. Kegiatan ini memiliki agenda untuk mendesak aparat untuk segera memproses dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur Cornelis dalam pidatonya (Baiduri, 2017). Dalam sebuah pidato di Kabupaten Landak, Gubernur Cornelis diduga menyampaikan pidato yang bernada provokatif dengan mengajak warga untuk menolak kehadiran Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, dan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnaen jika datang ke Kalimantan Barat. Sebagian kalangan menganggap bahwa pidato ini berpotensi memecah belah persatuan dan kehormatan antar etnis dan agama di Kalimantan Barat (Eddy, 2017).

Pilkada Kalimantan 2018 tidak lagi bisa diikuti oleh gubernur petahana, Cornelis, karena sudah melewati dua kali masa jabatan. Meskipun demikian, kursi gubernur Kalimantan Barat berpotensi kembali diperebutkan oleh dua etnis terbesar, Melayu dan Dayak. Terdapat dua bakal calon gubernur yang cukup kuat untuk bertarung dalam Pilgub Kalbar 2018 menurut hasil survei beberapa lembaga survei yang menyelenggarakan

surveinya di Kalbar sejak awal tahun 2017. Dua bakal calon tersebut adalah: Karolin Margaret Natassa, dan Sutarmidji. Karolin merupakan anak dari Gubernur Cornelis dan saat ini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Landak dengan latar belakang etnis Dayak dan beragama Katolik. Di sisi lain ada nama Sutarmidji, Walikota Pontianak, yang berlatar belakang Melayu-Muslimin.

Dengan sejarah konflik dan peta politik seperti yang digambarkan di atas, muncul kekhawatiran banyak pihak akan potensi politisasi isu-isu identitas di Kalimantan Barat menjelang pemilukada 2018 mendatang. Hal tersebut membutuhkan kajian pendahuluan yang baik sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengantisipasi potensi tersebut.

Dari uraian di atas penelitian ini akan menjawab pertanyaan: *bagaimana potensi pemanfaatan isu politik identitas menjelang Pemilukada Kalimantan Barat 2018?*. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan terhadap potensi konflik politik, dan mengantisipasi terjadinya konflik politik. Penelitian ini juga akan memberikan pembuktian ilmiah atas kekhawatiran berbagai pihak terhadap potensi politisasi isu identitas dalam Pemilukada Kalimantan Barat 2018.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif berjenis deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah untuk memberi gambaran tentang persepsi masyarakat Kalimantan Barat mengenai isu-isu politik identitas menjelang pemilukada 2018, bukan mencari hubungan sebab akibat antar variabel. Pengumpulan data utama dilakukan dengan wawancara terstruktur terhadap responden dengan menggunakan

kuesioner. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 1.000 orang sehingga tingkat kepercayaan dalam riset ini adalah 95% dengan *Margin of Error (MoE)* 3% (de Vaus, 2006). Pengambilan sampel pada survei ini dilakukan dengan *multistage random sampling*, dengan memperhatikan proporsi penduduk di 14 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat. Di masing-masing kabupaten diambil beberapa desa/kelurahan secara acak sesuai proporsi penduduk di seluruh kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat. Di masing-masing desa diambil 5 RT/kampung dengan acak sederhana. Kemudian di masing-masing RT/kampung diambil 2 KK dengan acak sederhana, lalu di tiap KK diambil 1 responden dengan sistem *Kish Grid*. Proporsi gender dalam penelitian ini juga dijaga agar 50:50 dengan mekanisme nomor kuesioner ganjil untuk laki-laki dan genap untuk responden perempuan. Tahapan-tahapan dalam *Multistage Random Sampling* yang dilakukan terhadap populasi penduduk di masing-masing provinsi digambarkan dalam skema di bawah ini.



**Gambar 1.** Metode Pengambilan Sampel Sumber: Diolah oleh Penulis.

Responden dalam penelitian ini diwawancarai dengan tatap muka (*face to face*). Pengambilan data dilakukan pada bulan Juli tahun 2017.



### 3. Perspektif Teori

Dalam mengkaji potensi pemanfaatan isu-isu identitas dalam momentum elektoral seperti pemilu, teori yang akan digunakan adalah teori perilaku memilih (*voting behavior*) khususnya pendekatan sosiologis karena pendekatan ini menekankan bagaimana peran kelompok sosial dalam pertimbangan pemilih saat menentukan pilihan politiknya.

Sebelum membahas mengenai perilaku memilih, terlebih dahulu harus dipahami mengenai *voting* itu sendiri. Kegiatan *voting* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kegiatan memilih yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya memilih barang (Evans, 2004). Ada satu hal yang harus dicatat dari pilihan tersebut, ia tidak hanya berimplikasi pada individu, melainkan memiliki efek kolektif. Inilah yang menjadi pembeda dasar antara *voting* dan *choice*. Jika kita memilih barang di pasar untuk kita beli dan bawa pulang, lalu kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan, maka efeknya akan kita nikmati sendiri. Hal yang demikian tidak terjadi dalam *voting*. Di dalam teori perilaku memilih terdapat tiga pendekatan utama yaitu pendekatan sosiologis atau sosial struktural; pendekatan psikologis dan pendekatan pilihan rasional. Dalam studi ini, pendekatan yang digunakan hanya satu pendekatan yang yakni pendekatan sosiologis.

Pendekatan sosiologis dalam perilaku memilih menyebutkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi pilihan masyarakat dalam pemilu adalah karakteristik dan pengelompokan sosial. Perilaku memilih seseorang berkenaan dengan kelompok sosial darimana individu itu berasal (Roth,

2008). Hal itu berarti karakteristik sosial menentukan kecenderungan politik seseorang. Pengelompokan sosial yang dimaksud disini adalah usia, gender, agama, etnis, pekerjaan, kelas sosial ekonomi, kedaerahan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok-kelompok formal dan informal yang diikuti. Kelompok-kelompok sosial ini dipandang berpengaruh besar dalam keputusan memilih karena kelompok-kelompok tersebut berperan dalam pembentukan sikap, persepsi dan orientasi seseorang.

Pendekatan sosiologis dalam perilaku memilih menyebutkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi pilihan masyarakat adalah karakteristik dan pengelompokan sosial. Dieter Roth menyebutkan bahwa perilaku memilih seseorang berkenaan dengan kelompok sosial dari mana individu itu berasal (Roth, 2008). Hal itu berarti karakteristik sosial menentukan kecenderungan politik seseorang. Pengelompokan sosial yang dimaksud disini adalah usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, kelas sosial ekonomi, kedaerahan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok-kelompok formal dan informal. Kelompok-kelompok sosial ini dipandang berpengaruh besar dalam keputusan memilih karena kelompok-kelompok tersebut berperan dalam pembentukan sikap, persepsi dan orientasi seseorang. Penelitian tentang perilaku memilih di negara yang mengalami transisi dilakukan di Philipina oleh Steven Rood, dan di salah satu negara di kawasan Afrika, Malawi. Dari hasil penelitian yang berbeda tersebut dapat ditarik satu kesimpulan yang memiliki kemiripan. Perilaku memilih di negara yang sedang

mengalami transisi tidak dipengaruhi secara signifikan oleh isu kebijakan dan orientasi partai, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor isu yang berhubungan dengan kandidat dan juga ikatan-ikatan seperti etnis, daerah asal dan hubungan klientelistik dalam struktur sosial masyarakatnya (Rood, 1991).

Dalam pemilihan kandidat perorangan di Philipina, seperti pemilihan presiden, faktor yang paling kuat mempengaruhi pilihan politik warganya adalah faktor kandidat. Faktor lain yang harus dilihat adalah etnis dari kandidat yang bersangkutan dan struktur patron klien yang masih kental dalam masyarakatnya. Masyarakat lebih suka memilih kandidat yang berasal dari etnis yang sama dengan mereka dan dapat berkomunikasi dengan bahasa etnis yang bersangkutan (Rood, 1991). Sedangkan di Malawi ditemukan fakta bahwa masyarakat menentukan pilihan politiknya berdasarkan faktor etnis dan daerah asal mereka karena masyarakat mengidentifikasi diri mereka sesuai dengan kekuatan politik masa lalu yang mereka hadirkan kembali dalam perebutan kekuasaan melalui pemilu (Rood, 1991).

Penelitian mengenai perilaku memilih di Indonesia yang pernah dilakukan Afan Gaffar, menekankan pentingnya karakteristik sosial, khususnya orientasi sosio-religius dalam melihat perilaku pemilih di Pulau Jawa (Gaffar, 1992). Penelitian lainnya mengenai perilaku memilih di Indonesia dilakukan dengan melihat pemilu 1999. Hasilnya menyebutkan bahwa ikatan sosial terutama faktor etnis penting untuk diperhatikan saat kita ingin mengamati perilaku memilih masyarakat Indonesia (King, 2003). Pentingnya ikatan sosial

seperti etnis dalam mempengaruhi pilihan politik rakyat juga dikemukakan oleh Benny Subianto yang meneliti Pilkada di enam kabupaten di Kalimantan Barat. Faktor ini berpengaruh karena loyalitas masyarakat terhadap etnisnya masih tinggi, dan mereka memandang bahwa etnis yang sama berarti memiliki nilai budaya yang sama, karenanya perilaku sosial politik dipandang sebagai cermin identitas (Sulistiyanto & Erb, 2009).

Faktor sosiologis atau kelompok sosial dan pengaruhnya terhadap perilaku memilih masyarakat Indonesia diteliti oleh Saiful Mujani dan kawan-kawan dengan menganalisis data empiris yang dihasilkan melalui survei nasional pada tahun 2004 dan 2009. Temuan Mujani memperlihatkan bahwa variabel sosiologis yang berpengaruh secara signifikan pada pilihan politik masyarakat Indonesia dalam Pemilu dan Pilpres tahun 2004 dan 2009 ada tiga, yaitu agama, kedaerahan, dan tingkat pendidikan (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2011).

- **Konsep Identitas**

Identitas dapat ditafsirkan sebagai sebuah perasaan keindividualan secara sosial yang berbentuk narasi atau persepsi tentang diri kita sebagai individu atau bagian dari kolektivitas. Dalam konsep yang dikemukakan oleh Yuval-Davis (Soeseno, 2011), individu merupakan subyek yang bersifat pasif dalam proses pembentukan identitas. Sebaliknya, Epstein menganggap bahwa individu adalah subyek yang aktif dalam pembentukan identitas, individu terlibat aktif dan melakukan inkorporasi dengan pihak-pihak lain sehingga membentuk identitas masing-masing.

Globalisasi yang terjadi juga memiliki pengaruh terhadap pembentukan identitas seseorang atau kelompok. Bagaimana kemudian dengan dunia yang terkesan tidak memiliki batas membentuk identitas-identitas baru bagi individu. Mereka tidak lagi memiliki identitas sebagai bagian dari sebuah komunitas atau kelompok tertentu, tetapi mereka juga memperkenalkan diri mereka sebagai warga dunia (*global citizenship*). Munculnya organisasi internasional atau perusahaan multinasional menjadi faktor pendorong kearah terbentuknya identitas tunggal sebagai warga dunia, mereka kemudian tidak sungkan lagi untuk mengatakan bahwa dia adalah warga dunia, bukan warga negara dimana dia berasal.

Identitas merupakan sumber pemaknaan bagi aktor itu sendiri dan oleh mereka sendiri, yang dikonstruksikan melalui proses individuasi. Meskipun juga identitas dapat pula berasal dari institusi yang dominan, yang mana mereka menjadi sebuah identitas hanya ketika dan jika aktor-aktor sosial menginternalisasi mereka, dan mengkonstruksikan pemaknaan seperti nilai dan norma melalui proses internalisasi ini. Identitas merupakan sumber pemaknaan yang dimiliki oleh individu ataupun entitas yang sifatnya lebih kuat dibandingkan peran atau *role* karena proses dari *self-construction* dan *individuation* yang terkandung didalamnya.

Manuel Castells (2004) dalam bukunya *The Power of Identity*, menjelaskan bahwa identitas dapat dibagi menjadi tiga: *resistance identity*, *legitimizing identity*, *projector identity*. *Resistance identity* dihasilkan oleh aktor-aktor yang berada dalam posisi dan kondisi yang lemah

atas pengaruh dari stigma-stigma dari pihak yang melakukan dominasi yang kemudian membangun pertahanan dan perlawanan. 1) *Resistance identity* kemudian mengarahkan ke pembentukan komunitas yang kuat dan menjadi dominan dalam institusi masyarakat sehingga bertransformasi ke dalam bentuk *legitimizing identity*. 2) *Legitimizing identity* diperkenalkan oleh institusi yang dominan dari masyarakat untuk memperluas dan merasionalisasikan dominasi aktor-aktor sosial, bentuk identitas ini dapat sejalan dengan teori-teori mengenai nasionalisme, secara singkat *legitimizing identity* lekat dengan otoritas dan dominasi. 3) *Project Identity* merupakan pembentukan identitas ketika aktor-aktor membangun sebuah identitas baru yang mendefisikan ulang posisi mereka dalam masyarakat, berasal dari suatu bentuk pertahanan atau perlawanan yang biasanya mengkonstruksi kelompok identitas dan kemudian menjadi dominan dalam masyarakat (Castells, 2004).

Lijphart (1984) mengemukakan istilah *consociational democracy* untuk menggambarkan kondisi demokrasi yang diformulasikan untuk mengatasi masyarakat yang majemuk (pluralisme budaya). Model ini juga dikenal dengan istilah *consensus democracy* (Kellas, 1998). Dalam bentuk idealnya, *consociational democracy* memiliki beberapa pelebagaan institusi yang penting: koalisi besar, sistem pemilu proporsional, hak veto yang bersifat timbal-balik (mutual), dan otonomi bagi setiap segmen. Koalisi besar (*grand coalition*) adalah bentuk akomodasi untuk elit, mereka diberikan kesempatan untuk menjadi perwakilan dari segmen-segmen yang ada untuk kemudian duduk

bersama merumuskan masalah. Bentuk kedua, yaitu sistem perwakilan yang proporsional, dapat menjadi jawaban dari kelompok non-elit untuk bisa memberikan kontribusi mereka. Menurut penulis, hak veto dan otonomi menjadi *win-win solution* bagi setiap segmen atau kelompok dalam upaya menjamin kepentingan mereka dapat diakomodasi dalam proses pengambilan kebijakan. Masalah dalam *consociationalism* biasanya ada karena dorongan dari internal dan eksternal, dimana terdapat elit yang merasa tidak diakomodasi. Faktor kepemimpinan memainkan peran kunci disini.

Horowitz dalam bukunya *Ethnic Groups in Conflict* (Kellas, 1998) menjelaskan bahwa dalam mencari sistem politik yang dapat meredam konflik etnis, Horowitz menemukan kegagalan dari *consociationalism* dalam bentuk asumsi *a priori* tentang pembahsan secara konstitusional terhadap konflik etnis. Dia kemudian menawarkan 'lima mekanisme dalam meredam konflik', yaitu; pertama, melakukan pemisahan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; kedua, memberikan perhatian yang lebih terhadap konflik intraetnis dibandingkan konflik internetnis; ketiga, membentuk kebijakan yang memberikan insentif terhadap kerjasama interetnis; keempat, membentuk kebijakan yang lebih mengutamakan pembentukan koalisi berdasarkan pengaruh, dibandingkan dengan etnisitas; kelima, menurunkan disparitas antar kelompok sehingga rasa ketidakpuasan dapat menurun.

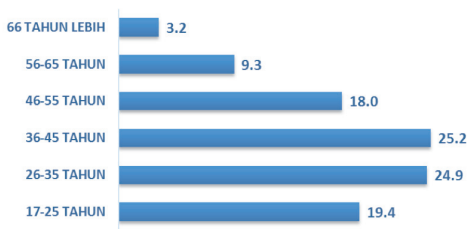
Dalam konteks Indonesia, terdapat salah satu bentuk politik akomodatif

dalam pluralisme budaya yang dibahas secara amat baik oleh Jamie S. Davidson dan David Henley (2007) dalam buku mereka *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Development of Adat from Colonialism to Indigenism*. Buku tersebut menjelaskan kebangkitan kembali masyarakat adat nusantara dan keinginan mereka untuk dapat dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan kebijakan. Kejatuhan rezim sentralistik Orde Baru, dan pemberlakuan praktik desentralisasi melalui otonomi daerah menjadi ruang yang dimafaatkan dengan sangat baik oleh kelompok adat untuk mengembalikan klaim atas hak-hak mereka yang selama rezim Orde Baru dirampas. Manifestasi dari gerakan adat ini salah satu bentuk nyatanya adalah berkembangnya wacana 'putra daerah' yang harus menjadi pemimpin pada daerah-daerah otonomi (Davidson & Henley, 2007)

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Sampel yang diambil adalah penelitian ini dapat dikatakan representatif. Hal ini terlihat dalam sebaran demografi responden dari hasil survei yang dilakukan. Perimbangan gender laki-laki berbanding perempuan tetap terjaga 50:50. Sebaran usia responden memperlihatkan bahwa pemilih terbanyak berada pada rentang usia 36-45 tahun (25,2%), diikuti oleh penduduk berusia 26-35 tahun (24,9%). Secara lebih detail dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:

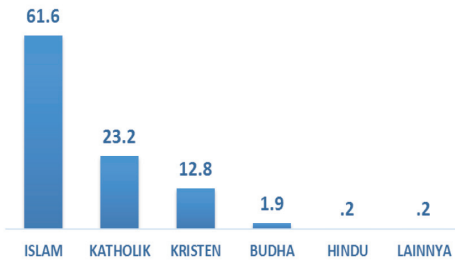
**Grafik 1. Sebaran Usia Responden**



*Sumber: Diolah oleh Penulis.*

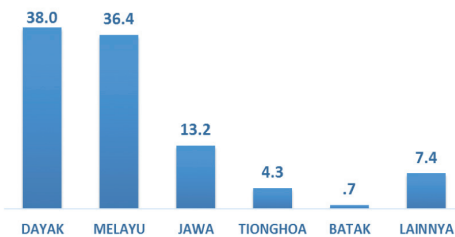
Untuk komposisi agama dan suku bangsa responden dalam penelitian ini dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:

**Grafik 2. Sebaran Responden Berdasarkan Agama**



*Sumber: Diolah oleh Penulis*

**Grafik 3. Sebaran Responden Berdasarkan Suku**



*Sumber: Diolah oleh Penulis.*

Data demografis di atas telah memperlihatkan keberagaman masyarakat Kalbar yang terepresentasi dalam responden penelitian ini.

Berikutnya, hasil survei ini menemukan beberapa fakta menarik tentang pemilih di Kalbar dan potensi isu-isu identitas menjelang momentum pemilu pada 2018 yang dipotret melalui beberapa temuan angka untuk indikator berikut:

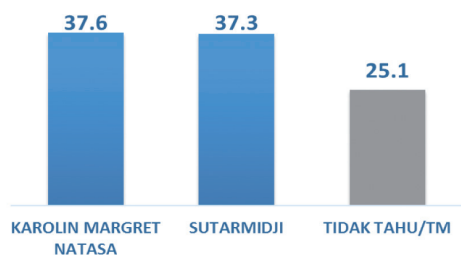
- Sebanyak 10% responden tidak nyaman bertetangga dengan keluarga yang berbeda agama dengan mereka;
- Kurang dari 50% (49,1%) masyarakat yang mengaku tidak mempermasalahkan latar belakang dan identitas keagamaan dari calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah;
- Lebih dari 25% responden menyatakan secara eksplisit bahwa mereka lebih menginginkan Gubernur Kalimantan Barat adalah seorang Muslim, dan Wakil Gubernur Non-Muslim. Sebaliknya, ada 10,8% responden menginginkan Gubernur Kalimantan Barat Non-Muslim, dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat adalah Muslim. Hal ini berarti bahwa preferensi pilihan politik warga Kalbar salah satunya masih bergantung pada faktor identitas agama kandidat;
- Hanya 49,3% responden yang menyatakan tidak mempermasalahkan latar belakang dan identitas kesukuan dari pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Sebanyak 20,6% responden menginginkan agar Gubernur dijabat oleh suku Melayu. Sebanyak 10,7% responden menginginkan agar Gubernur dijabat oleh suku Dayak. Kecenderungan tentang latar belakang identitas kesukuan terlihat mirip dengan latar belakang agama kandidat di mata pemilih Kalbar.

Beberapa temuan di atas merupakan indikator yang dapat digunakan dalam melihat bagaimana masyarakat melihat identitas sebagai sesuatu yang harus terrepresentasi dalam politik elektoral.

Hingga penelitian ini dilaksanakan, memang belum terdapat pasangan calon yang secara resmi mendapatkan rekomendasi dari partai politik, namun dalam survei yang dilakukan terdapat simulasi dua nama yang diduga merupakan kandidat terkuat dan memiliki peluang paling besar memperoleh rekomendasi dari beberapa parpol, yakni Karolin Margaret Natassa dan Sutarmidji. Dua nama ini mewakili dua kelompok etnis besar, Dayak, dan Melayu, seperti yang telah dijelaskan di bagian terdahulu.

Latar belakang etnis dan agama kedua kandidat dalam simulasi elektabilitas ini dapat digunakan dalam melihat preferensi pemilih berdasarkan suku dan agama pemilih dengan menggunakan teknik tabulasi silang. Survei ini menemukan angka elektabilitas simulasi dua nama calon gubernur Kalbar pada bulan Juli 2017 seperti terlihat dalam grafik dibawah ini.

**Grafik 4. Simulasi Elektabilitas Dua Nama**



*Sumber: Diolah oleh Penulis.*

Grafik di atas menunjukkan bahwa perolehan suara kedua tokoh yang digadang-gadang akan maju dalam

pemilukada 2018 tersebut sangat berimbang. Selisih antar keduanya hanya 0,3% dalam *margin of error* 3%, namun tetap ada pemilih sebanyak 25% yang belum menentukan pilihannya. Hal ini wajar karena pengambilan data lapangan pada penelitian ini sebelum ada calon yang definitif.

Berikutnya dilakukan tabulasi silang antara variabel kandidat pilihan dengan agama pemilih; kandidat pilihan dengan suku pemilih; dan kandidat pilihan dengan kabupaten/kota tempat tinggal pemilih. Hasil tabulasi silang tersebut dapat dilihat dalam tabel 1, tabel 2, dan tabel 3 berikut ini.

**Tabel 1. Tabulasi Silang Variabel Agama**

AGAMA	KANDIDAT PILIHAN: SIMULASI 2 NAMA		
	KAROLIN MARGRET NATASSA	SUTARMIDJI	TIDAK TAHU/TIDAK JAWAB
ISLAM	14.2%	55.1%	30.7%
KRISTEN	70.6%	11.1%	18.3%
KATHOLIK	80.3%	7.9%	11.8%
BUDHA	26.3%	15.8%	57.9%
HINDU	50.0%	50.0%	0.0%
LAINNYA	50.0%	0.0%	50.0%

*Sumber: Diolah oleh Penulis.*

Dalam Tabel 1 terlihat bahwa responden yang beragama Islam memiliki kecenderungan memilih Sutarmidji (55,1%) yang berlatar belakang muslim, sementara itu mayoritas responden yang beragama Kristen dan Katolik (70,6% dan 80,3%) memilih Karolin yang berlatar belakang non-muslim. Data pada tabel 1 ini menjelaskan bahwa pemilih masih menjadikan kesamaan agama sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihan politiknya dalam momentum elektoral, meski dalam

data yang disajikan sebelumnya dalam bentuk frekuensi, jumlah mereka yang menginginkan pemimpin dengan agama tertentu kurang dari 40%, namun data tabulasi silang di atas memperlihatkan kecenderungan yang lebih jelas.

Tabulasi silang berikutnya yang tergambar dalam tabel 2 di bawah ini adalah tabulasi silang antara variabel suku dan preferensi pilihan bakal calon kepala daerah simulasi 2 nama.

**Tabel 2.** *Tabulasi Silang Variabel Suku*

SUKU	KANDIDAT PILIHAN: SIMULASI 2 NAMA		
	KAROLIN MARGRET NATASHA	SUTARMIDJI	TIDAK TAHU/TIDAK JAWAB
DAYAK	79.2%	7.1%	13.4%
MELAYU	12.7%	54.6%	32.4%
JAWA	19.7%	52.0%	27.6%
BATAK	28.6%	71.4%	0.0%
TIONGHOA	36.6%	22.0%	41.5%
LAINNYA	7.0%	71.8%	21.1%

*Sumber: Diolah oleh Penulis*

Data yang tersaji dalam tabel 2 memperlihatkan kecenderungan yang hampir sama dengan Tabel 1, yaitu preferensi pemilih dalam menentukan kandidat pilihannya masih dipengaruhi oleh kesamaan latar belakang identitas etnis/suku antara kandidat dan diri pemilih. Sebanyak 79,2% responden yang bersuku Dayak akan memilih Karolin yang juga merupakan orang Dayak sebagai gubernur Kalbar mendatang. Sementara itu, sebanyak 54,6% orang Melayu akan memilih Sutarmidji yang notabena dianggap merepresentasikan kelompok etnis ini. Suku Jawa yang memiliki identifikasi agama yang sama dengan suku Melayu (sama-sama Islam) juga cenderung memilih Sutarmidji. Sementara itu, data juga memperlihatkan bahwa

etnis terbesar ketiga, Tionghoa hampir separuhnya belum menentukan pilihan mereka.

Dalam tabulasi silang selanjutnya terlihat sentimen asal wilayah yang juga cukup kuat dapat dilihat sebagai salah satu identitas yang mungkin dimanfaatkan menjelang pemilukada Kalbar mendatang.

**Tabel 3.** *Tabulasi Silang Variabel Daerah Asal*

KABUPATEN	KANDIDAT PILIHAN: SIMULASI 2 NAMA		
	KAROLIN MARGRET NATASHA	SUTARMIDJI	TIDAK TAHU/TIDAK JAWAB
BENGKAYANG	48.3%	25.0%	26.7%
KAPUAS HULU	54.0%	16.0%	30.0%
KAYONG UTARA	4.8%	14.3%	81.0%
KETAPANG	28.1%	42.7%	29.2%
KOTA PONTIANAK	8.5%	76.9%	14.6%
KOTA SINGKAWANG	16.0%	30.0%	54.0%
KUBU RAYA	1.8%	77.3%	20.0%
LANDAK	90.0%	7.5%	2.5%
MELAWI	57.5%	2.5%	40.0%
MEMPAWAH	40.0%	34.0%	26.0%
SAMBAS	25.7%	42.2%	31.2%
SANGGAU	67.8%	13.3%	18.9%
SEKADAU	42.5%	27.5%	27.5%
SINTANG	68.6%	17.1%	14.3%

*Sumber: Diolah oleh Penulis*

Dalam Tabel 3 terlihat bahwa pemilih masih mempertimbangkan daerah asal sebagai dasar menentukan pilihan politik dalam pemilukada. Data menunjukkan, sebanyak 76,9% responden di Kota Pontianak akan memilih Sutarmidji, walikota pontianak saat ini sebagai Gubernur, dan 90% responden di Kabupaten Landak akan memilih Karolin yang merupakan bupati Landak saat ini. Daerah atau teritori yang menjadi wilayah pengaruh suku Dayak seperti: Bengkayang, Kapuas Hulu, Melawi, Sekadau dan Sanggau juga menunjukkan kecenderungan untuk memilih Karolin. Sementara itu, pada daerah yang menjadi

wilayah pengaruh suku Melayu seperti Sambas, dan Kubu Raya menunjukkan kecenderungan untuk memilih Sutarmidji. Data pada tabel 3 ini memberi penguatan pada data pada tabel 1 dan 2 di atas.

Berbagai temuan data di atas memperlihatkan bahwa teori perilaku memilih pendekatan sosiologis yang menyebutkan faktor paling berpengaruh dalam pilihan masyarakat dalam pemilu adalah karakteristik dan pengelompokan sosial, dapat terlihat di Kalimantan Barat. Pengelompokan sosial yang penting diperhatikan menjelang pemilukada Kalbar 2018 adalah suku/etnis, agama, dan asal wilayah.

Pertarungan identitas yang menjadi pengamatan adalah Melayu-Muslim dengan Dayak-Kristen/Katolik yang kemudian berpotensi untuk dipolitisasi menjelang pemilihan kepala daerah. Sentimen kesukuan yang bercampur dengan sentimen keagamaan menjadi hal yang perlu diwaspadai oleh Badan Pengawas Pemilu. Politisasi isu identitas dapat merugikan pasangan calon yang menjadi korban dari *framing* lawan politiknya.

Mengacu kepada konsep identitas yang dijelaskan pada awal tulisan ini, bahwa sentimen kedaerahan (orang asli daerah) masih menjadi fenomena umum di Kalimantan Barat. Asal daerah masih menjadi preferensi dalam memilih kepala daerah. Kecenderungan warga di masing-masing kabupaten asal untuk memilih bakal calon gubernur yang berasal dari daerah yang sama masih sangat tinggi. Tingginya kecenderungan menggunakan isu-isu identitas mengindikasikan bahwa ikatan dan kolektivitas dari masing-masing kelompok masih kuat. Dalam satu sisi, menguatnya identitas dapat berdampak

positif pada pelestarian dan keberlanjutan dari identitas tersebut, tetapi jika melewati titik keseimbangannya, identitas akan membuka ruang konflik antaridentitas. Momentum Pilkada 2018 memiliki potensi pergeseran titik keseimbangan dalam konsep identitas. Hal ini dibuktikan melalui data yang berhasil dihimpun, bahwa lebih dari separuh (50,9%) menjadikan asal daerah, agama, dan suku sebagai bahan pertimbangan dalam memilih calon kepala daerah. Kondisi ini sedikit berbeda sejak otonomi daerah dimulai. Perbedaan yang paling prinsip adalah sentimen kedaerahan dan identitas yang dibawa menjadi semakin lokal. Jika dulu pada masa awal otonomi daerah tuntutannya adalah kepala daerah yang merupakan orang asli daerah tersebut, maka sekarang konteksnya menjadi lebih sempit, yaitu mereka yang berasal dari kabupaten/kota yang sama. Penguatan identitas kelokalan ini yang kemudian perlu untuk diperhatikan secara seksama. Ketakutan akan tercerabutnya identitas karena peleburan batas-batas melalui globalisasi menjadi kurang relevan ketika berhadapan dengan kebangkitan kembali sentimen identitas yang lebih lokal.

Penjelasan Lijphart (1984) tentang *consociational democracy* menjadi relevan untuk mengakomodasi perbedaan dalam pluralisme budaya yang ada di Kalimantan Barat. Heterogenitas yang tinggi, serta pluralisme budaya yang telah terjalin sejak lama perlu untuk terus dibina. Persaingan yang terjadi antara tiga kelompok etnis terbesar ini perlu dicarikan solusi yang terbaik, dimana kepentingan dari seluruh pihak dapat terakomodasi dengan baik.

Pilihan kebijakan dalam meredam terjadinya konflik interetnis di Kalimantan



Barat dapat mengacu kepada dua dari lima aspek yang dijelaskan oleh Horowitz (dalam Kellas, 1998) yaitu:

- Memberikan insentif atas kerjasama interetnis. Kondisi ini akan mendorong terbentuknya kerjasama interetnis sehingga mereka lebih mengutamakan tujuan bersama daripada kepentingan golongan.
- Menurunkan disparitas interetnis. Kesetaraan akses dan distribusi sumber daya yang merata menjadi kunci penting dalam menjaga hubungan interetnis agar tidak terjadi saling cemburu yang dapat berujung kepada konflik.

Lebih lanjut, jika mengacu kepada Castells (2004) maka identitas yang sekarang yang dimiliki perlu dibentuk sebuah *project identity*, tentang pembentukan identitas baru yang akomodatif. Tantangannya adalah membentuk identitas Kalimantan Barat, bukan memperkuat identitas kelokalan, Dayak, Melayu, atau Tionghoa dan Jawa. Tetapi, bagaimana dengan ragam identitas yang dimiliki tersebut masyarakat Kalimantan Barat memiliki kebanggaan atas identitas baru mereka yang lebih akomodatif, tanpa mengurangi kadar kebanggaan mereka atas identitas asal. Kalimantan Barat dapat menjadi laboratorium mini dalam melihat eksistensi kebhinekaan, hidup berdampingan dalam damai dan harmoni meski memiliki banyak perbedaan.

## 5. Simpulan

Secara umum, temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya potensi penggunaan isu identitas dalam pelaksanaan Pilkada Kalimantan Barat 2018. Masyarakat Kalimantan Barat masih tergolong sebagai pemilih tradisional yg mengedepankan faktor sosiologis. Ikatan kedaerahan, agama, dan suku masih menjadi pertimbangan utama lebih dari separuh masyarakat Kalimantan Barat dalam menentukan pilihan politiknya.

Politik identitas dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian serius berbagai kalangan. Penguatan identitas lokal menjadi pisau bermata dua yang harus dikelola dengan baik. Kewaspadaan memang perlu ditingkatkan menjelang tahun politik datang, tetapi tidak berarti harus terkungkung dalam paranoia dan segala bentuk ketakutan yang tidak beralasan. Masih terdapat variabel lain yang belum dijelaskan dalam penelitian yang singkat ini, dan secara resmi belum ada pasangan calon yang mendaftar sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Seperti yang dijelaskan pada bagian awal, temuan dari penelitian ini setidaknya mampu memberikan peringatan dini dan pemetaan potensi konflik politik yang mungkin akan terjadi. Bawaslu sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan pemilu perlu untuk merumuskan persiapan yang matang dalam menghadapi potensi penggunaan politisasi isu identitas dalam Pilkada Kalimantan Barat 2018.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2010). *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Baiduri, N. I. (2017, Mei 20). *Aksi Bela Ulama 205 Kisruh, Pontianak Berstatus Siaga*. Diakses pada Oktober 24, 2017, dari Tempo.Co: <https://nasional.tempo.co/read/877179/aksi-bela-ulama-205-kisruh-pontianak-berstatus-siaga>
- Castells, M. (2004). *The Power of Identity, The Information Age: Economy, Society, and Culture Volume II*. Cambridge: Blackwell .
- Davidson, J. S., & Henley, D. (2007). *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Development of Adat from Colonialism to Indigenism*. New York: Routledge.
- de Vaus, D. (2006). *Research Design in Social Research*. London: SAGE Publication.
- Eddy, G. (2017, Mei 21). *Kapolda Janji Proses Hukum Bernada Provokasi Gubernur Kalbar*. Diakses dari Seputar Indonesia: <https://daerah.sindonews.com/read/1206904/174/kapolda-janji-proses-hukum-pidato-bernada-provokasi-gubernur-kalbar-1495358386>
- Evans, J. A. (2004). *Voting and Voters: An Introduction*. London: SAGE Publications.
- Gaffar, A. (1992). *Javanese Voters: A Case Study of Election Under a Hegemonic Party-System*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Handoko, A. (2012, Agustus 5). *Cornelis-Christandy Dapat Nomor Urut Satu*. Diakses pada Oktober 29, 2017, dari Kompas.com: <http://regional.kompas.com/read/2012/08/06/15485347/Cornelis-Christandy.Dapat.Nomor.Urut.1>
- Jumadi, & Yaakop, M. (2013). Keterwakilan Etnis dalam Kepemimpinan Politik Pasca Orde Baru. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Vol. 2 (No.11)*, 81-90.
- Kellas, J. G. (1998). *The Politics of Nationalism and Ethnicity*. London: Macmillan Press.
- King, D. Y. (2003). *Half-Hearted Reform: Electoral Institution and Struggle for Democracy in Indonesia*. Westport: Praeger Publisher.
- Kristianus. (2011). Nasionalisme Etnik di Kalimantan Barat. *Masyarakat Indonesia, Vol.XXXVII (No.2)*, 147-175.
- Mujani, S., Liddle, R., & Ambardi, K. (2011). *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Mizan.
- Rood, S. (1991). Perspective on the Electorals Behaviour of Baguio City (Philliphines): Voters in Transititon Era. *Journal of South East Asian Studies, Vol.22 (No.1)*, 86-87.
- Roth, D. (2008). *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori, Instrumen, dan Metode*. Jakarta: Friedrich-Naumann Stiftung.
- Soeseno, N. (2011). *Kewarganegaraan: Tafsir, Tradisi, dan Isu-Isu Kontemporer*. Depok: Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Sulistiyanto, P., & Erb, M. (2009). *Deepening Democracy in Indonesia: Direct Election for Local Leaders*. Singapore: ISEAS.
- Tanasaldy, T. (2007). Politik Identitas Etnis di Kalimantan Barat. In H. S. Nordholt, & G. van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia* (pp. 461-490). Jakarta: Yayasan Obor dan KITLV-Jakarta.

## **JAWARA DAN PEMILU: PERAN JAWARA SEBAGAI IDENTITAS POLITIK DI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BANTEN**

**Saepudin**

*Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, saepudin.  
albantani88@gmail.com*

**Joni Firmansyah**

*Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, Indonesia,  
jonifirmansyah2050@gmail.com*

---

### **ABSTRACT**

*This study aims to find out how the identity of jawara in Banten society so that it has influence in local politics. The influence jawara is increasing in social, economic, and political fields during the reform era that open community participation. This research methodology used qualitative method with descriptive-analysis approach. The findings and conclusions are jawara become identity that have influence because have magical power and experience social mobility so that dominating of economy and also influence politics to defend their interest. Their abilities are also supported by the patron-client relationship between the jawara and some jawaras have been institutionalized and rooted from the center to the regions. While jawara relationship with the ruler is more driven by the relationship of mutualism symbiosis because jawara needs the support of power to maintain their interests. While the ruler need their support to be re-elected in the local elections. Jawara can be a supporter and vote getter because it has a mass base. So the jawara can be decisive in Banten because of their network spread in political parties, legislative and executive institutions.*

### **Keywords**

Local Election, Election, Jawara's Role, Power

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana identitas jawara dalam masyarakat Banten sehingga mempunyai pengaruh dalam politik lokal. Pengaruh jawara semakin terasa dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik ketika era reformasi yang membuka partisipasi masyarakat. Metodologi penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Temuan dan kesimpulannya adalah jawara menjadi identitas yang mempunyai pengaruh karena mempunyai kekuatan magis dan mengalami mobilitas sosial sehingga menguasai bidang ekonomi dan turut juga mempengaruhi politik untuk memepertahankan kepentingan mereka. Kemampuan mereka juga ditunjang oleh hubungan patron-klien diantara jawara dan beberapa jawara terlembagakan menjadi organisasi dan mengakar dari pusat sampai daerah. Sedangkan hubungan jawara dengan penguasa lebih didorong oleh hubungan simbiosis mutualisme karena jawara membutuhkan dukungan kekuasaan untuk memepertahankan kepentingan mereka. Sedangkan penguasa membutuhkan dukungan mereka untuk terpilih kembali dalam pilkada. Jawara bisa menjadi supporter dan vote getter karena mempunyai basis massa. Kemudian jawara bisa menjadi penentu kebijakan di Banten karena jaringan mereka yang menyebar di partai politik, lembaga legislatif maupun eksekutif.*

### **Kata Kunci**

Pilkada, Pemilu, Peran Jawara, Kekuasaan

---

### **1. Pendahuluan**

Dengan jatuhnya rezim Suharto yang berkuasa selama 32 tahun memberikan dampak kepada perubahan sistem dan tatanan politik Indonesia. Era reformasi sebagai hasil dari perubahan itu diharapkan membawa Indonesia kepada pemerintahan yang lebih adil, demokratis, dan sejahtera. Perubahan kekuasaan juga mempengaruhi hubungan struktur kekuasaan pusat dengan daerah yaitu dengan diberlakukannya otonomi daerah. Ide dasar dari otonomi daerah adalah; pertama, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik; kedua, memelihara hubungan yang

serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan (Leo Agustino, 2009: 26). Kemudian demokratisasi di Indonesia ditandai dengan dilakukannya pemilihan umum secara langsung yang bebas, jujur, dan adil sebagai bentuk perwujudan hak-hak asasi.

Dengan adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung sehingga mengubah pola pemilihan yang sebelumnya dilakukan oleh elit dengan perwakilannya di DPRD (elite vote) ke model pemilhan yang dipilih

langsung oleh masyarakat (popular vote). Ada beberapa kelebihan pilkada langsung diantaranya political equality, local accountability, dan local response yang diharapkan munculnya partisipasi masyarakat dan adanya peningkatan efisiensi pemerintahan lokal (Amirudin dan A. Zaini Bisri, 2006). Namun, dengan adanya desentralisasi berupa otonomi daerah yang diharapkan kekuasaan bisa disistribusikan secara adil dan merata tidak berkorelasi positif dengan penguatan demokrasi. Hal ini ditandai dengan lahirnya kekuatan orang kuat lokal di berbagai negara berkembang dan di Indonesia.

Di Banten dengan tumbangnya rezim Orde Baru, justru semakin menguatkan peran jawara dalam bidang sosial, politik dan ekonomi. Dominasi itu dapat dimengerti karena ketika Suharto berkuasa jawara (selain kyai) adalah salah satu kekuatan lokal yang dikooptasi pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya. Peran jawara sebagai identitas kekuatan politik lokal sudah dimulai semenjak zaman kolonialisme, dimana jawara selalu terlibat dalam pemberontakan-pemberontakan menentang Belanda. Sekarang di era reformasi jawara banyak menguasai sumber ekonomi dan politik karena banyak terlibat dalam Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), dan Gabungan Pengusaha Nasional Seluruh Indonesia (GAPENSI). Sedangkan dalam perpolitikan lokal, mereka mendominasi dan menempatkan orang-orangnya di pemerintahan baik di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Banten sebenarnya daerah yang didominasi oleh dua subkultur yaitu kyai dan jawara yang mempunyai pengaruh

dalam politik lokal baik formal maupun informal. Pada awalnya jawara dan kyai adalah satu entitas yang tidak bisa dipisahkan, namun dengan dinamika dan situasi yang berubah khususnya ketika Orde Baru, dimana kyai semakin termajinalkan dalam politik dan perannya bergeser kepada peran informal, sedangkan peran formal dalam pemerintahan banyak didominasi oleh kalangan jawara

Pada pemilihan kepada daerah setelah reformasi baik yang masih dilakukan oleh DPRD maupun pemilihan secara langsung, jawara selalu terlibat dalam dinamika memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2001 yang dimenangkan oleh pasangan Djoko-Atut memperlihatkan pengaruh jawara dalam memenangkan pasangan tersebut. Ketika pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, ternyata peran jawara tidak hanya berpengaruh untuk salah satu kandidat saja, tetapi mereka mempunyai pengaruh terhadap semua kandidat sebagai salah satu faktor untuk mendulang suara. Dukungan jawara selalu diberikan kepada setiap pasangan kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur baik dalam pilkada tahun 2006, 2011, dan 2017. Hal ini memperlihatkan kalau jawara sebagai identitas lokal Banten yang mempunyai pengaruh untuk mempengaruhi preferensi masyarakat dalam menentukan sikapnya dalam politik terutama pilkada.

Berdasarkan pemaparan di atas, jawara merupakan salah satu subkultur sosial di Banten yang selalu terlibat dalam politik lokal dan mempengaruhi perubahan sosial masyarakat khususnya dalam kontestasi pemenangan kepala daerah. Oleh karena itu penelitian ini

akan mengkaji dan menjawab bagaimana keterlibatan jawara sebagai kekuatan politik dalam pemilu kepada daerah Banten?

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Menurut Lawrence Neuman, pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya dengan metode induktif. Namun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan data-data kuantitatif yang terkait dengan subjek ataupun masalah penelitian, untuk memperkuat data-data yang terkumpul selama penelitian (Lawrence Neuman, 2000: 88-91).

## 3. Perspektif Teori

### 3.1 Local Strongman

Joel Migdal memberikan definisi mengenai “orang kuat lokal” sebagai pemimpin nonformal negara seperti tuan tanah, tengkulak, pengusaha, kepala suku, panglima perang, bos, petani kaya, pemimpin klan, za’im, effendi, agha, cacique dan kulaks, yang membangun organisasi sosialnya yang berbentuk jejaring dalam rangka menjalankan kontrol sosial atas masyarakat untuk menguasai keseluruhan populasi yang mendiami wilayah tertentu. Para “orang kuat lokal” melakukan berbagai kegiatan seperti pemberian kredit, pemberian akses rakyat kepada tanah, perlindungan keamanan, pemerasan dan tindakan lainnya. Mereka juga menerapkan hadiah, hukuman dan

simbol sebagai bentuk kontrol sosial atas masyarakat. “Orang kuat lokal” beroperasi di negara pascakolonial dari benua Asia dan Afrika yang masih lemah melakukan kontrol sosial atas masyarakatnya terutama di tingkat lokal. Kontrol sosial terutama dilakukan untuk mengatur relasi sosial di dalam masyarakat, melakukan penetrasi di dalam masyarakat, mengambil sumber daya yang ada di dalam masyarakat dan menggunakan sumber daya yang ada di dalam masyarakat (Joel S. Migdal, 1988: 3-41).

Dalam sebuah arena politik lokal, “orang kuat lokal” bersama birokrat di tingkat lokal yang menjalankan kebijakan pemerintah dan politisi lokal yang terdiri dari partai politik dan pemimpin formal di tingkat lokal, membentuk segitiga akomodasi yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Mereka membangun apa yang disebut Joel Migdal sebagai jejaring pertukaran sosial ekonomi dan politik. “Orang kuat lokal” melakukan tawar menawar dengan birokrat dan politisi yang menghasilkan kompromi atau kompetisi. “Orang kuat lokal” menawarkan stabilitas lokal yang ditukar dengan jaminan tidak mengganggu kekuasaan mereka yang telah berlangsung. Bahkan mereka menawar untuk dapat terlibat langsung memengaruhi keputusan penting mengenai alokasi sumber daya dan aplikasi aturan-aturan kebijakan negara dengan cara menempatkan anggota keluarga mereka pada sejumlah jabatan penting demi menjamin alokasi sumber daya berjalan sesuai dengan aturan mereka sendiri (Joel S. Migdal, 1988: 238-258).

### 3.2 Teori Patron-Klien

James C. Scott, memberikan definisi patron-klien sebagai hubungan timbal balik di antara dua peran yang dapat diartikan sebagai sebuah kasus khusus yang melibatkan kekawanan secara luas dimana individu yang satu memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) yang menggunakan pengaruh dan sumber-sumber yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan-keuntungan kepada individu yang lain yang memiliki status yang lebih rendah (klien), dimana klien mempunyai kewajiban membalas dengan memberikan dukungan dan bantuan secara umum, termasuk pelayanan-pelayanan pribadi kepada patron (James C. Scott : 92). Hubungan pertukaran antara patron dan klien adalah hubungan yang tidak seimbang yang mencerminkan perbedaan status. Hubungan tersebut yang kemudian menimbulkan perasaan hutang budi klien kepada patron dan kemudian membalas jasa patron. Selain itu hubungannya bisa bersifat personal yang konsekuensinya menciptakan loyalitas, kepercayaan, dan kasih sayang dalam hubungan diantara mereka.

Bentuk hubungan patron-klien bisa berbentuk bola gugus (patron-client cluster) dan pola piramida (patron-client pyramid). Pola gugus adalah bentuk hubungan seorang patron dengan beberapa klien, sedang pola piramida adalah gabungan dari beberapa gugus patron-klien yang dipimpin seorang patron sebagai patron tertinggi. Dalam patron-klien piramida, seorang klien dari patron tertinggi adalah juga seorang patron dari beberapa orang klien. Dengan demikian ada beberapa patron kecil yang menjadi klien patron tertinggi

dan mempunyai beberapa klien sendiri (Maswadi Rauf, 2001: 99). Maswadi Rauf berpendapat bahwa seorang patron dalam kelompok patron-klien karena kepemilikan sumber-sumber kebutuhan hidup. Faktor penting yang menyebabkan seseorang menjadi patron dalam kelompok patron-klien adalah ketergantungan para klien secara materil kepada patron. Sebagai akibatnya adalah bahwa ketergantungan itu menyebabkan para klien menggantungkan sumber-sumber penghasilannya kepada patron. Para klien dan keluarganya memperoleh pekerjaan dan penghasilan dari resources yang diberikan oleh patron (Maswadi Rauf, 2001: 102).

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Identifikasi Jawa sebagai Kekuatan Politik Lokal Banten

Istilah jawa sendiri dalam sejarahnya mempunyai berbagai macam versi karena tidak adanya bukti sejarah yang mencatat secara terperinci tentang jawa. Hal ini disebabkan jawa sendiri lahir dari rakyat biasa, bukan dari golongan atas seperti sultan, raja, kaum bangsawan, maupun pemimpin lainnya yang sering dicatat dalam sejarah. Sejarah jawa menurut para peneliti, umumnya bisa ditelusuri dengan pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan masyarakat Banten terhadap kolonialisme Belanda sebagai bentuk protes terhadap penjajahan yang menimbulkan penderitaan rakyat.

Menurut Sartono Kartodirdjo, golongan jawa pada umumnya adalah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan sering melakukan tindakan kriminal (Sartono Kartodirdjo, 2015: 56). Sementara menurut Michael C. Williams, istilah jawa sendiri merujuk

kepada seseorang yang tidak hanya siap menentang hukum-hukum dan segala macam aturan-aturan legal yang ada, namun juga melawan siapapun demi meraih tujuan mereka. Golongan ini terdapat di pedesaan Banten yang sarat akan intrik dan sampai sekarang masih berkembang (Michael C. Williams, 2003: 54). Jawara adalah istilah di Banten untuk orang-orang yang memiliki kepandaian bermain silat dan memiliki keterampilan-keterampilan tertentu. Berbeda dengan perampok dan pencuri, mereka adalah figur yang mampu menjaga keselamatan dan keamanan desa, sehingga masyarakat menghormati keberadaan mereka. Pada umumnya jawara sangat patuh kepada ulama karena semangat dalam jiwa mereka diperoleh dari ulama. Tetapi ada sebagian yang berperilaku negatif, namun biasanya itu bisa diatasi oleh rekan-rekan mereka sendiri.

Pemaknaan yang cenderung positif terhadap jawara disampaikan oleh Tihami, dimana jawara menjadi bagian dari orang-orang yang pernah dididik di pesantren. Jawara sesungguhnya murid kiai yang mendalami ilmu-ilmu agama di pesantren. Selain itu, mereka juga mendalami ilmu-ilmu kanuragan dari kiai yang pada akhirnya menjadi orientasi pilihan yang dikembangkan. Namun citra jawara di zaman sekarang cenderung negatif, dimana sebagian jawara lebih suka mengidentifikasi diri mereka dengan sebutan pendekar.

Pada zaman sekarang eksistensi jawara masih diakui di Banten, walaupun sudah disebutkan sebelumnya jawara cenderung berkonotasi negatif. Jawara adalah seseorang atau kelompok masyarakat di Banten yang mempunyai keunggulan secara fisik, dan untuk

menunjang keunggulan tersebut mereka membutuhkan magi walaupun dalam bentuk yang paling mudah, seperti jimat, rajah dan sebagainya yang diperoleh dominan dari kiai. Walaupun pada zaman sekarang, jawara dalam arti fisik dengan ciri-ciri tersebut sudah tidak ada, yang ada hanya dalam arti simbolik dengan kecenderungan menentukan beberapa ciri-ciri saja, yaitu mengandalkan keberanian dan kekuatan fisik, agresif, terbuka (blak-blakan) dan sompral (Tihami, 1992: 13). Sumber kekuasaan jawara secara tradisional bisa dibedakan dengan sumber kekuasaan jawara ketika mengalami mobilitas sosial dimulai ketika Orde Baru yang mempunyai kepentingan mempertahankan kekuasaannya dengan dukungan jawara. Kekuasaan jawara secara tradisional karena mereka mempunyai magi yang dapat dipercaya mempunyai dan memberikan keuntungan dalam kehidupan sehari-hari. Sumber kekuasaan jawara yang berkaitan dengan magi tidak bisa dilepaskan dari kyai yang menurunkan ilmunya kepada santi dan jawara, walaupun secara proporsi ada perbedaan ilmu yang diturunkan kepada santri dan jawara.

Jawara menjadi *local strongman* karena kemampuan mereka untuk memanipulasi ketakutan magis yang kemudian mengalami mobilitas sosial dalam bidang sumber daya ekonomi. Dengan penguasaan sumber daya ekonomi tersebut membuat mereka mempunyai pengaruh dalam politik lokal Banten sebagai identitas yang akan diikuti oleh masyarakat.

Menurut Mohammad Hudaeri, peran-peran sosial jawara adalah sebagai berikut (Mohammad Hudaeri, 2002) :



- **Jaro**  
Jaro atau biasa disebut dengan kepala desa yang memimpin sebuah kelurahan. Pada zaman kesultanan jaro diangkat oleh sultan dengan tugas utamanya adalah mengurus kepentingan kesultanan, seperti memungut upeti dan mengerahkan tenaga kerja untuk kerja bakti. Dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, jaro dibantu oleh pejabat lainnya seperti carik (sekretaris jaro), jagakersa (bagian keamanan), pancalang (pengatur surat), amil (pemungut zakat dan pajak), merbot atau modin (pengurus masalah keagamaan dan masjid).
- **Guru Silat**  
Pada masa pra-Islam telah dikenal istilah perguron atau padepokan di daerah sekitar Gunung Karang, Pandeglang. Dalam masyarakat Banten dikenal berbagai macam perguron atau organisasi bela diri, seperti Terumbu, Bandrong, Paku Banten, Jalak Rawi, Cimande, Si Pecut dan sebagainya. Setiap peguron mempunyai karakteristik dalam jurus dan sejarah kelahirannya.
- **Guru Ilmu Batin (*Magis*)**  
Untuk menjadi seorang jawara yang terkenal harus ditunjang dengan kemampuan bela diri yang baik serta memiliki ilmu batin atau magis, yakni kemampuan untuk memanipulasi kekuatan supranatural dan untuk memenuhi kebutuhan praktisnya, seperti kebal dari berbagai senjata tajam, tahan api, juru ramal, pengusir jin dan setan, pengendali roh dan pengobatan, seperti patah tulang dan tukang pijit. Bentuk-bentuk ilmu yang sering dipergunakan

para jawara adalah brajamusti (kemampuan untuk melakukan pukulan dahsyat), ziyad (mengendali sesuatu dari jauh), jimat atau rajah untuk mencari kewibawaan, kekayaan atau dicintai seseorang, putter gilling (untuk memutar kembali atau menemukan kembali orang yang hilang atau kabur), elmu (untuk menaklukkan binatang yang berbisa atau berbahaya) dan sebagainya.

- **Pemain Debus**  
Peran jawara yang masih dekat dengan kesaktian adalah permainan debus. Permainan debus ini banyak dilakukan oleh para jawara, yang dianggap sudah memiliki kesaktian yang cukup. Jadi tidak semua jawara dapat melakukan permainan debus, karena bagi yang tidak mampu justru akan mendatangkan bencana atau kecelakaan. Di Banten ada beberapa macam debus, yakni debus al-madad, surosowan dan langitan. Dinamakan debus al-madad (artinya meminta bantuan dan pertolongan) karena para pemainnya setiap kali melakukan aksinya selalu mengucapkan kata-kata al-madad, yang seolah menggambarkan bahwa tindakan ini didasarkan atas pertolongan dari Allah SWT. Debus al-madad merupakan debus yang paling berat karena untuk melakukan permainan ini khalifahnya (pemimpin grup) harus melakukan amalan yang sangat panjang dan berat. Amalan-amalan khalifah debus ini diambil dari terekat Rifa'iyah atau Qodariyah.
- **Khodim Kyai**  
Jawara yang sebenarnya adalah khodim kiai. Peran sebagai khodim kiai maksudnya berperan sesuai

yang diajarkan kiai, yakni membela kebenaran, berpihak kepada masyarakat yang lemah, berperilaku santun dan tidak sombong dan sejumlah aturan normatif lainnya. Peran-peran yang ideal itu semakin kurang dilakukan oleh para jawara di tengah kepekaan kehidupan yang materialistik.

Jika Joel Migdal memberikan definisi mengenai orang kuat lokal sebagai pemimpin non formal yang membangun organisasi sosialnya yang berbentuk jejaring dalam rangka menjalankan kontrol sosial atas masyarakat untuk menguasai keseluruhan populasi yang mendiami wilayah tersebut. Maka, di Banten sendiri jawara bisa disebut sebagai orang kuat lokal karena pengaruh mereka dapat melakukan kontrol sosial di dalam masyarakat selain melakukan kontrol politik karena berhasil menempatkan orang-orangnya baik di dalam lembaga legislatif maupun eksekutif dan menguasai berbagai sumber ekonomi lainnya. Tetapi orang kuat lokal di Banten bukan sama sebagai pemimpin non formal tetapi jawara sendiri setelah masa reformasi justru menyebar ke berbagai partai politik sehingga menempatkan orang-orangnya untuk menduduki jabatan tertentu. Pada awalnya, jawara sendiri lebih banyak menempati sebagai pemimpin informal, namun keadaan itu berubah karena jawara mengalami mobilitas sosial terutama ketika Orde Baru dan dikooptasi pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya dan banyak dari jawara menempati posisi pemimpin formal dalam pemerintahan.

Banyak dari jawara membentuk sebuah organisasi yang mempunyai struktur dari pusat sampai daerah

seperti organisasi Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir (TTKGDH), Terumbu, Bandrong, Haji Salim, Ulim Makao, dan masih banyak lagi organisasi jawara di Banten (Facal, 2016). Terdapat organisasi jawara yang melakukan kegiatannya dengan menguasai berbagai tempat untuk memberikan keamanan di wilayah tersebut. Bahkan dari mereka menjadi jasa keamanan di sebuah acara atau peristiwa tertentu.

Di dalam politik jawara bersama birokrat lokal melakukan simbiosis mutualisme karena adanya kepentingan bersama yang saling menguntungkan satu sama lain. Birokrat lokal membutuhkan jawara untuk mempertahankan kekuasaan dan memberikan dukungan kepadanya terutama pada saat pemilihan kepala daerah. Sedangkan jawara membutuhkan birokrat lokal untuk mempertahankan sumber ekonomi mereka dan menawarkan stabilitas sosial dan memberikan keamanan kepada penguasa. Proses pertukaran tersebut apa yang disebut Joel Migdal sebagai jejaring pertukaran sosial ekonomi dan politik.

#### **4.2 Eksistensi Jawara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah**

Sedangkan peran jawara pada masa reformasi bisa dilihat pada saat Pilkada Banten tahun 2001 yang masih dipilih oleh DPRD. Dalam pemilihan ini jawara mempunyai pengaruh untuk memenangkan kandidat yang mereka usung. Dalam pilkada tersebut terdapat anak jawara terkenal yang akan maju menjadi Wakil Gubernur Banten yaitu Ratu Atut Chosiyah. Sebelumnya Ratu Atut Chosiyah lebih banyak menjalankan bisnis perusahaan orang tuanya yaitu PT. Sinar Ciomas Group. Menurut Boyke

Pribadi pengajar Universitas Tirtayasa (Untirta), "Golkar mendukung Atut tidak terlepas dari peran besar ayahnya, Tokoh Jawa. Ia adalah tokoh yang dianggap memiliki banyak jasa terhadap Golkar" (Lili Romli, 2007: 143). Hal ini dapat dimengerti karena tokoh jawa tersebut menjadi pendukung Orde Baru dan ikut mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah ketika itu.

Dukungan jawa terhadap Ratu Atut Chosiyah bisa terlihat dari adanya dukungan organisasi Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia (PPPSBBI) yang disampaikan pada tanggal 18 September 2001. PPPSBBI sendiri diketuai oleh tokoh jawa yang tidak lain orang tua Ratu Atut Chosiyah. Dukungan PPPSBBI berupa adanya surat yang ditunjukkan langsung kepada Panitia Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Adanya surat tersebut mengindikasikan beberapa hal diantaranya. Pertama, surat dukungan tersebut secara eksplisit telah memberikan sinyal tentang keberpihakan jawa terhadap calon wakil Gubernur Ratu Atut Chosiyah, dan siapapun calon gubernur yang akan berpasangan dengan yang bersangkutan. Kedua, surat dukungan tersebut juga merefleksikan salah satu bentuk awal dari keterlibatan para jawa dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Lili Romli, 2007: 151).

Keterlibatan jawa dalam pilkada Banten 2001 terlihat dengan keterlibatan dalam bentuk mobilisasi massa. Para jawa juga melakukan intimidasi atas calon dan para pendukung pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur tertentu. Selanjutnya dalam bentuk pengamanan dalam pemilihan dengan mengerahkan massanya untuk mengamankan gedung

DPRD. Sebagai bentuk konkret dukungan tokoh jawa terhadap pasangan yang didukungnya, ia duduk di tepat duduk undangan VIP. Selain itu dukungan jawa tidak terlepas dari motivasi untuk menguasai sumber daya ekonomi (Lili Romli, 2007: 151-153).

Kemudian dalam pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2006 yang secara langsung dilakukan oleh masyarakat, jawa ikut terlibat kembali dalam dukung-mendukung pasangan gubernur dan wakil gubernur. Dalam pilkada tersebut terdapat empat pasang calon yang ditetapkan KPUD yaitu Tb. Tryana Sjam'un-Benyamin Davnie, Ratu Atut Chosiyah-HM. Masduki, Irsyad Djuweli-Mas Achmad Daniri, dan terakhir Zulkiflimansyah-Marissa Haque. Setiap pasangan kandidat didukung oleh jawa, baik dari jawa yang memang telah terorganisir dalam sebuah organisasi atau jawa yang memang mempunyai kemampuan personal untuk diikuti. Tabel di bawah ini memperlihatkan dukungan jawa kepada setiap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pilkada Banten 2006.

asangan Tryana Sjam'un-Benjamin Davnie didukung diantaranya oleh jawa TTKKDH yang merupakan salah satu organisasi jawa yang mempunyai jaringan luas di Banten dan mengakar. Secara jawa perorangan didukung oleh Buya Karis, Apih Juli yang sebelumnya anggota dari Relawan Banten Bersatu (RBB), H. Suraka sebagai jawa yang banyak malang melintang di Jakarta. Pasangan Ratu Atut Chosiyah juga didukung oleh TTKKDH terutama para dedengkot (pini sepuh). Selain itu pasangan ini didukung oleh PPPSBBI yang merupakan organisasi pendekar pimpinan Tokoh

Jawara. Pasangan Zulkiflimansyah-Marissa Haque dan Irsyad Juseli-A Daniri tidak begitu banyak didukung jawara seperti pasangan yang lain. Diantara pasangan yang mendukung Zulkiflimansyah-Marisa Haque adalah Sudirman, selain itu para jawara yang berafiliasi kepada PDIP juga mendukung kampanye Marissa (Lili Romli, 2007: 179-188).

Dalam Pilkada Banten 2017, terdapat dua kandidat yang bertarung yaitu pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy dan pasangan Rano Karno-Embey Mulya Syarief. Wahidin Halim adalah mantan Wali Kota Tangerang dua periode yang dinilai berhasil memajukan Kota Tangerang oleh masyarakat. Indikasi ini bisa dilihat dari kemenagannya yang telak di Kota Tangerang ketika kontestasi Pilkada Banten 2017. Sedangkan Rano Karno merupakan petahana yang menggantikan Ratu Atut Chosiyah karena tersandung kasus hukum.

Hal yang menarik dari pertarungan Pilkada Banten 2017 adalah unsur jawara dalam penetapan calon Wakil Gubernur Banten. Andika Hazrumy adalah anak dari Ratu Atut Chosiyah dan anak dari Alm. Chasan Sohib yang merupakan jawara yang disegani di Banten. Walaupun Chasan Sohib sudah meninggal, tetapi Andika Hazrumy bisa memanfaatkan jejaring yang sudah dibentuk sejak awal keluarganya berkiprah di dunia politik yang memanfaatkan organisasi jawara. (Witantra & Nesia). Sedangkan Embay Mulya Syarief yang lebih dikenal dengan jawara putih. (Mahyadi, 2016). Selaint itu terdapat organisasi jawara di Banten yang selalu terlibat dalam Pilkada Banten untuk ikut andil dalam memenangkan salah satu calon. Di Pilkada Banten 2017, organisasi Jawara TTKKDH adalah organisasi yang ikut

mendeklarasikan diri untuk mendukung baik itu pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy maupun pasangan Rano Karno-Embey Mulya Syarief.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Jawara merupakan suatu entitas politik yang banyak mempengaruhi peta perpolitikan di Banten. Keterlibatan kelompok ini di dalam politik, banyak terlihat dari eksistensi mereka pada pemilihan umum di mana peran mereka cukup dominan. Pada Pemilukada Banten tahun 2017, peran Jawara sebagai suatu kekuatan politik tidak bisa diabaikan. Beberapa organisasi Jawara ikut terlibat yang terbagi ke dalam beberapa kubu peserta pemilukada. Keikutsertaan Jawara di dalam pemilukada tersebut dapat dianalisis ke dalam beberapa hal. *Pertama*, adanya simbiosis mutualisme antara Jawara dan kandidat politik pada suatu pemilu. Simbiosis yang saling menguntungkan ini merupakan bentuk konsensus dari perspektif patron-klien di antara mereka. Biasanya patron-klien ditandai oleh adanya pihak yang lebih berkuasa (patron), terhadap pihak yang membutuhkan sehingga muncul hutang budi bagi pihak lainnya (klien). Tetapi, di dalam melihat peran Jawara ini, posisi antara Jawara dan kandidat politik sama rata atau seimbang. Tidak ada pihak-pihak yang superior atau mendominasi, melainkan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Jawara membutuhkan ranah eksistensi, baik dalam bentuk status sosial maupun kebutuhan ekonomi, sementara kandidat membutuhkan dukungan elit lokal sebagai penguat modal politik dan vote getter di dalam pemilu.

*Kedua*, kehadiran Jawara ini dapat dilihat sebagai suatu peran politik yang

berfungsi sebagai supporter dan voter di dalam pemilu. Mereka memiliki basis massa, memiliki simpatisan serta kultur politik yang telah terbina dengan cukup lama sehingga terlibat di dalam pemilu merupakan tradisi politik bagi mereka. Melalui kehadiran mereka yang banyak di ruang publik, Jawa Barat dapat dimanfaatkan sebagai penyampai pesan politik untuk mempengaruhi preferensi politik publik. Hal ini pernah terlihat dari peran Jawa Barat di era Orde Baru dimana Jawa Barat bersama dengan Kyai hadir sebagai mesin politik untuk memperkuat dukungan publik kepada Golkar sebagai partai pemerintah. Hasilnya cukup signifikan, yaitu sepanjang pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu menjadi pemenang pemilu di Banten (Lili Romli: 197)

*Ketiga*, Jawa Barat hadir sebagai kekuatan politik lokal yang menjadi salah satu penentu arah kebijakan di Banten. Hal ini dapat ditelusuri dari pergantian rezim yang terjadi di Indonesia. Jika sebelumnya Jawa Barat terkooptasi ke dalam satu partai politik binaan pemerintah, yaitu Golkar, pasca Orde Baru runtuh, eksistensi Jawa Barat terpecah ke dalam beberapa partai binaan di era reformasi. Oleh sebab itu, Jawa Barat tidak lagi menjadi satu identitas tunggal, melainkan menyebar ke dalam beberapa organisasi massa dan partai politik yang berfungsi sebagai kelompok penekan (*pressure group*) dan kelompok kepentingan (*interest group*). Kehadiran mereka pada ruang publik yang baru, memberikan kesempatan bagi mereka untuk hadir dan berperan langsung di dalam setiap perumusan kebijakan. Terjadi perubahan peran Jawa Barat yang sebelumnya bersifat klientalisme terhadap hegemoni Orde

Baru, di era reformasi mereka hadir secara equal atau sama rata. Sehingga kehadiran mereka pada agenda-agenda politik menjadi jauh lebih berpengaruh dibandingkan pada era Orde Baru.

Meluasnya peran dan eksistensi Jawa Barat di dalam pemilu inilah yang membentuk identitas politik bagi kalangan tersebut. Mereka memiliki kesempatan dan kekuatan untuk mengintervensi, mempengaruhi hingga mengambilalih pemerintahan melalui dinasti-dinasti politik yang mengakar. Melalui agenda politik dan pemerintahan ini, Jawa Barat memiliki kesempatan untuk merambah pengaruhnya pada bidang lainnya, yaitu pada bidang usaha atau bisnis dan bidang-bidang yang dinilai menguntungkan. Legitimasi inilah yang kerap menjadi pertimbangan mendasar bagi Jawa Barat untuk terjun ke dalam ranah politik. Karena apabila mereka mampu memenangkan kandidat yang mereka usung, maka akses dan jaringan akan mudah untuk mereka peroleh.

Sejalan dengan fenomena eksistensi Jawa Barat di dalam setiap pemilu yang terselenggara di Banten, muncul perubahan peran yang terjadi sebagaimana landasan teori patron-klien yang telah dijelaskan sebelumnya. Peran Jawa Barat yang semula menjadi klien bagi penguasa Orde Baru, berubah menjadi hubungan timbal balik yang setara di antara keduanya, yaitu antara Jawa Barat dan kandidat politik atau pemegang kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi tidak menghapus oligarki Jawa Barat, melainkan memberikannya jalan untuk menyesuaikan diri terhadap sistem demokrasi yang berlaku.

James C. Scott menjelaskan patron-klien sebagai hubungan timbal balik di

antara dua peran yang dapat diartikan sebagai sebuah kasus khusus yang melibatkan kekawanan secara luas dimana individu memiliki status ekonomi yang lebih tinggi (patron) untuk mempengaruhi status yang lebih rendah (klien) dan klien mempunyai kewajiban untuk membalas jasa kepada patron. Jawara Banten hubungan patron-klien yang terjadi memang ada yang berdasarkan materi, namun jika ditelusuri hubungan tersebut tidak selamanya berdasarkan materi. Sebagai contoh di TTKKDH terdapat istilah yang disebut dengan pertalekan atau sumpah setia, dimana anggota harus taat dan patuh kepada ketua. Di dalam sebuah organisasi jawara hubungan parton-klien berbentuk pola piramida (*patron-client pyramid*) karena pemimpin mempunyai pengaruh yang harus diikuti oleh setiap anggota. Namun pola ini menjadi simbiosis mutualisme ketika berinteraksi dengan penguasa lokal di Banten.

## 5. Simpulan

Jawara sebagai identitas politik di Banten mempunyai pengaruh dalam mempengaruhi preferensi masyarakat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Banten. Identitas mereka sebagai orang kuat lokal karena mereka mempunyai kelebihan dibandingkan masyarakat pada umumnya. Kelebihan jawara pada mulanya berupa manipulasi kekuatan magis, dan mengalami mobilitas sosial pada masa Orde Baru dengan dikuasainya sumber-sumber ekonomi dan politik oleh mereka. Kekuatan jawara yang pada mulanya terpecah belah, kemudian disatukan dalam satu kekuatan terutama oleh Tokoh

Jawara dalam organisasi PPPSBBI. Selain PPPSBBI terdapat organisasi jawara lain yang mempunyai struktur dan mengakar di masyarakat Banten. Oleh karena itu jawara menjadi orang kuat lokal karena mempunyai ilmu magis dan kemampuan dalam sumber daya ekonomi yang merambah ke dominasi politik.

Hubungan jawara dengan jawara pada dasarnya dibangun dengan hubungan patron-klien karena ada ketergantungan ekonomi. Namun, hubungan tersebut tidak selamanya dipengaruhi oleh materi, karena ada faktor tradisional yang turut mempengaruhi hubungan antar jawara. Sedangkan hubungan jawara dengan penguasa lebih didorong oleh simbiosis mutualisme diantara mereka, dimana penguasa membutuhkan dukungan jawara untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan sedangkan jawara sendiri membutuhkan penguasa untuk mempertahankan sumber-sumber ekonomi mereka. Untuk itu dalam setiap pilkada, identitas jawara akan selalu dijadikan rebutan oleh setiap kandidat pasangan untuk menarik dukungan dari masyarakat karena jawara mempunyai pengaruh untuk menentukan pilihan masyarakat Banten.

Di dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah ada beberapa hal yang bisa dianalisis dari jawara. *Pertama*, adanya simbiosis mutualisme antara jawara dan penguasa lokal. *Kedua*, sebagai *supporter* dan *vote getter* dalam pilkada karena memiliki basis massa. *Ketiga*, jawara bisa menentukan arah kebijakan di Banten karena jaringan mereka menyebar ke partai politik, legislatif maupun eksekutif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo (2011). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Amirudin dan A. Zaini Bisri (2006). *Pilkada Langsung Problem dan Prospek Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada 2005*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hudaeri, Mohammad. (2002). *Tasbih dan Golok: Studi Tentang Kedudukan, Peran dan Jaringan Kyai dan Jawara di Banten*, Serang: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Kartodirdjo, Sartono. (1984). *Pemberontakan Petani Banten 1838*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Migdal, Joel S. (1988). *Strong Societies and Weak States : State-Society Relations and State Capabilities in the Third World*, Princeton: Princeton University Press
- Neuman, Lawrence (2000). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*, Boston: Boston Allyn and Bacon
- Rauf, Maswadi. (2001). *Konsensus dan Konflik Politik*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas,
- Romli. L. (2007). *Jawara dan Penguasaan Politik Lokal di Provinsi Banten (2001-2006)* (Disertasi), Depok, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Tihami. (1992). *Kyai dan Jawara di Banten: Studi Tentang Agama, Magi dan Kepemimpinan di Desa Pasanggrahan Serang Banten* (Tesis), Depok, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- William, Michael C. (2003). *Arit dan Bulan Sabit: Pemberontakan Komunis 1926 di Banten*, Yogyakarta: Syarikat





## **ISU IDENTITAS AGAMA DAN PERILAKU MEMILIH WARGA: PELAKSANAAN PILKADA DKI JAKARTA PUTARAN I TAHUN 2017 DI RUMAH SUSUN TANAH ABANG**

**Insan Praditya Anugrah**

*Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, Indonesia,  
insanradit@gmail.com*

---

### **ABSTRACT**

*This paper examines of how religious issues In Jakarta Governor Election influence the voting behavior of people in Rumah Susun Tanah Abang. This paper using theory of politics of identity by Eisenberg and Will Kymlicka. In their perspectives politics of identity divided into two category, normative view of politics of identity and empirical view of politics of identity. The empirical view is the suitable one, that see the politization of collective identity by elites such as religion identity. Besides the theory of identity this paper also using theory of lifetime socialization prosscess by Almond dan Powell. This paper also relate the Political Socialization with voting behavior approaches. In this theory, there are three approach that explain that determine voting behaviour 1) Sociological approach, stated that social class, religion, subculture and ethnicity are the factors that determine voting behaviour 2) Psychological approach that focus on party oorientation and candidate orientation issue that determine voting behaviour and 3) Rational choice focus on cost and benefit consideration of what voterg get if they chose a candidate. According to those concepts, this paper will analyze of how votng behaviour works in Rumah Susun Tanah Abang*

### **Keywords**

Pilkada, Election, Voting Behaviour, Political Socialization

---

## ABSTRAK

*Tulisan ini membahas mengenai bagaimana isu agama di Pilkada DKI Jakarta memiliki pengaruh terhadap perilaku memilih warga Rumah Susun Tanah Abang. Makalah ini memakai teori politik identitas yang dikemukakan oleh Eisenberg dan Kymlicka. Dalam pemaparan mereka, politik identitas terbagi dua yakni politik identitas normatif dan politik identitas empirik. Adapun yang akan dipakai untuk membaca fenomena ini adalah politik identitas empirik, yang melihat bahwa didalam proses politik dan sosial, yang terjadi adalah politisasi identitas kolektif tertentu, dalam hal ini agama oleh para elit-elit politik. Selain perspektif identitas, tulisan ini juga menggunakan konsep sosialisasi politik sebagai proses sepanjang hayat yang diutarakan oleh Almond dan Powell. Sosialisasi politik ini terkait dengan konsep teori perilaku pemilih (voting behavior). Dalam teori ini, terdapat tiga pendekatan yang dapat menerangkan mengenai perilaku pemilih diantaranya adalah 1) Pendekatan Sosiologis, yang menyatakan bahwa kelas sosial, agama, subkultur dan asal etnik merupakan hal yang menentukan perilaku memilih 2) Pendekatan Psikologis fokus kepada identifikasi partai, orientasi dan isu orientasi kandidat dan 3) Pendekatan Rasional fokus kepada pertimbangan biaya dan keuntungan apa yang pemilih dapatkan apabila memilih salah satu kandidat. Berdasarkan konsep-konsep tersebut, penulis akan menganalisis bagaimana perilaku memilih warga masyarakat di Rumah Susun Tanah Abang.*

### Kata Kunci

Pilkada, Pemilu, Perilaku Memilih, Sosialisasi Politik

---

### 1. Pendahuluan

Pasca tumbangnya rejim Orde Baru oleh mahasiswa dan aktivis pada 1998, Indonesia memasuki era demokratisasi. Pemilihan umum merupakan salah satu hal yang terpenting dalam pelaksanaan demokrasi. Pada tahun 1999 dilaksanakan pemilu yang diikuti oleh banyak partai politik, namun masih belum memilih kepala Negara. Pemilihan umum secara langsung dan demokratis baru diluncurkan pada tahun 2004. Tahun 2004 menjadi bersejarah karena untuk pertamakalinya pemilihan umum melibatkan seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Pemilihan umum Presiden dilakukan dua putaran yakni pada tanggal 5 Juli 2004 untuk putaran pertama dan tanggal 20 September 2004 untuk putaran kedua

Selain Pemilu (Pemilihan Umum), terdapat pula Pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang penyelenggaraannya secara langsung digelar di Indonesia pertama kali pada bulan Juni tahun 2005. Dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah, dari tahap awal hingga akhir, mulai saat pasangan kandidat melakukan deklarasi, pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, penetapan calon, pengumuman harta

kekayaan, pengambilan nomor urut, kampanye, pemaparan visi-misi, debat kandidat, minggu tenang hingga hari pencoblosan selalu saja ada dinamika yang berkembang, seperti masalah daftar pemilih tetap, kampanye negative hingga kampanye hitam terkait isu suku, ras dan politisasi agama.

Menjelang Pilkada DKI 2017, politik identitas menjadi salah satu instrument elit untuk memenangi kontestasi pilkada (Hakim, 2017). Di Pilkada DKI ini tersebar seruan di masyarakat muslim untuk tidak memilih pemimpin non-muslim, dengan merujuk kepada Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51 yang berisi hal tersebut. Bagi para pesaing politiknya, tentunya ini merupakan kampanye hitam yang ditujukan untuk menghancurkan elektabilitas Basuki Tjahaja purnama yang sulit ditandingi. Sayangnya, hal ini ditanggapi oleh cagub nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama dengan pernyataan yang kontra-produktif memberikan pidato di kepulauan seribu. Dalam kesempatan tersebut Basuki melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016 datang untuk meninjau program pemberdayaan budi daya kerapu. Menurutnya, program itu akan tetap dilanjutkan meski dia nanti tak terpilih lagi menjadi gubernur di pilgub Februari 2017, sehingga warga tidak harus memilihnya hanya semata-mata hanya ingin program itu terus dilanjutkan, namun disela-sela pidato Basuki menyinggung surat Al-Maidah 51 yang menurutnya dipakai sebagai alat politik.

Pernyataan ini membuat kegaduhan di masyarakat, yang terjadi justru isu agama justru semakin besar dan berkembang menjadi dugaan penistaan agama yang malah merugikan posisi Basuki secara

politik. Masalah penistaan agama dan menjadi sebuah bola salju yang semakin besar dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang selama ini menjadi lawan politik, seperti Front Pembela Islam (FPI). FPI bahkan kemudian menjadi motor utama gerakan-gerakan aksi bela Islam, mulai dari aksi 4 November 2016, gerakan 2 Desember 2016 dan sebagainya.

## 2. Permasalahan

Di Jakarta Pusat, daerah Tanah Abang merupakan salah satu wilayah dengan basis Islam terkuat di Jakarta, sebagaimana diketahui bahwa Front Pembela Islam (FPI) yang merupakan Ormas yang paling mengecam pernyataan Basuki Tjahaja Purnama bermarkas di Peramburan, Tanah Abang.

Untuk itu penting untuk mengamati proses pemilihan umum di salah satu daerah di Tanah Abang, diantaranya adalah Rumah Susun Tanah Abang terkait bagaimana sosialisasi politik masyarakat yang ditentukan oleh kondisi sosial keagamaan merespon isu politik identitas terkait agama di Pilkada DKI Jakarta 2017 ini.

Seiring dengan permasalahan isu penistaan agama tersebut, menarik untuk mengetahui perilaku memilih masyarakat di salah satu pemukiman di Tanah Abang, dalam hal ini penulis memutuskan untuk meneliti Rumah Susun Tanah Abang. Adapun alasan pemilihan lokasi Rumah Susun Tanah Abang adalah karena warga Rumah Susun Tanah Abang berasal dari segala lapisan etnis di Indonesia dan berpendidikan hingga Perguruan Tinggi, namun disisi lain mereka berada di lingkungan dimana para tokoh masyarakat lokal Tanah Abang beridentitas Betawi-Islam masih memiliki pengaruh yang kuat.

Salah satu tokoh masyarakat di Tanah Abang adalah Abraham Lunggana yang merupakan pejabat DPRD yang memiliki visi yang berseberangan dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Adapun fokus permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana perilaku memilih masyarakat di Rumah Susun Tanah Abang di Pilkada DKI Jakarta 2017 seiring dengan isu penistaan agama tersebut.

### 3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini, penulis mengumpulkan data dengan cara turun lapangan langsung serta membaca literature teoritis dari berbagai buku maupun jurnal. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa warga maupun pengurus RT/RW di Rumah Susun Tanah Abang terkait. Untuk memvalidasi data, penulis melakukan verifikasi dengan membandingkan masing-masing sumber baik dari literature buku, jurnal, media online maupun sumber wawancara, serta hasil observasi lapangan langsung untuk membandingkan apakah informasi yang didapat sesuai maupun saling mendukung satu dengan lainnya. Apabila terdapat ketidaksesuaian maupun indikasi subjektifitas yang terlalu besar dalam informasi tersebut, maka informasi tersebut tidak dimasukkan kedalam tulisan ini.

### 4. Perspektif Teori

Dalam menjelaskan masalah ini, akan digunakan teori mengenai politik identitas dan teori mengenai perilaku memilih. Terkait pengertian politik

identitas, kita dapat melihatnya dari dua sudut pandang yakni pendekatan normatif dan sudut pandang empirik (Eisenberg & Kymlicka, 2011). Politik identitas berdasarkan sudut pandang normatif adalah sebuah pandangan yang berusaha menjelaskan bagaimana tuntutan atas pengakuan dan penerimaan identitas berhubungan dengan prinsip-prinsip seperti keadilan, kebebasan, hak asasi manusia dan kewarganegaraan yang demokratis. Adapun pengertian di atas seringkali disebut sebagai etika tuntutan identitas.

Pengertian kedua adalah pengertian politik identitas dari sudut pandang empirik, yang melihat bahwa didalam proses politik dan sosial, yang terjadi adalah politisasi atas kelompok-kelompok identitas. Pendekatan ini melihat bagaimana elit melakukan mobilisasi dari gerakan politik berbasis identitas. Pendekatan ini melihat bagaimana mobilisasi elit akan menentukan tujuan dan taktik dari masyarakat di akar rumput untuk menuntut hak-hak mereka terkait identitas yang dianggap belum terpenuhi (Eisenberg & Kymlicka, 2011).

Dalam tulisan ini, yang akan dijelaskan adalah politik identitas, dari pendekatan empirik dalam melihat politik identitas dalam Pilkada DKI Jakarta. Dalam melihat isu identitas dari pengertian politik identitas secara empirik ini, dalam pulgub DKI Jakarta 2017 yakni identitas agama Islam. Identitas agama Islam disini dimanfaatkan oleh elit politik untuk merugikan calon Gubernur tertentu dikarenakan terdapat tafsir surat Al-Maidah ayat 51 untuk tidak memilih pemimpin yang bukan muslim. Selain itu, reaksi gubernur Basuki yang ditanggapi negative oleh sebagian public sebagai

penistaan terhadap agama Islam semakin menguatkan kuatnya politik identitas yang membawa keuntungan kepada para elit pengusung calon Gubernur yang beragama Islam.

Ubed Abdilah (2012) menyatakan bahwa para sarjana sejak era Yunani sepakat bahwa karakteristik agama memiliki ciri khas dipandang sebagai hal sesuatu yang tanpa cacat, dipelihara dan dilindungi karena terkait erat dengan hubungan manusia dengan sang pencipta. Karena ciri yang melekat tersebut lah kemudian politik identitas yakni sentiment permusuhan antar pemeluk agama tidak terhindarkan, karena masing-masing merasa agama mereka paling benar dan dipercaya berasal dari Tuhan yang menciptakan manusia dan kehidupan ini. Menurut Almond dan Powell (1996) mendefinisikan sosialisasi politik sebagai proses dimana individu memperoleh kepercayaan, nilai-nilai dan sikap-sikap terkait sistem politik tertentu. Sosialisasi politik sendiri diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dan prosesnya berlangsung sepanjang hayat. Hal-hal yang mempengaruhi sosialisasi ini tentunya yang dialami sepanjang hidup seperti masa kecil, pernikahan, kematian, mengurus anak, era krisis dan pekerjaan. Penyatuan dan perpecahan juga terjadi karena pengaruh sosialisasi tadi.

Kelompok-kelompok sosial yang memiliki sumber berita sendiri, serta budaya politik sendiri yang berbeda dengan masyarakat secara umum. Adapun agen-agen sosialisasi ini seperti keluarga, sekolah, lembaga keagamaan, teman-teman dekat, kelas sosial dan gender, media, kelompok kepentingan, partai politik serta persentuhan langsung dengan struktur pemerintahan.

Kecenderungan pada budaya politik kontemporer pada saat ini adalah sekuler dan menganut modernisme, manusia percaya dapat mengendalikan alam (tidak lagi memandang segala fenomena merupakan kehendak Tuhan). Kecenderungan berikutnya adalah postmodernisme, dimana masyarakat yang telah lahir di era mapan cenderung tidak lagi memikirkan bagaimana cara mencapai dan mempertahankan kemakmuran, mereka lebih peduli dengan isu-isu seperti pluralisme, persamaan hak, anti (dampak negatif globalisasi), kebebasan berekspresi, dll.

Demokratisasi juga menjadi kecenderungan arah budaya politik dewasa ini, masyarakat semakin kritis dan mempertanyakan legitimasi Negara serta kepercayaan mereka kepada pemerintah. Dalam demokrasi pula, masyarakat semakin memperhatikan hal-hal seperti prinsip menentukan nasib sendiri serta menginginkan kebebasan lebih di akses internet, berbicara dan akses terhadap berbagai media. Pada intinya, budaya politik dan sosialisasi ini adalah fenomena yang dinamis, terus berubah sejalan dengan perkembangan zaman.

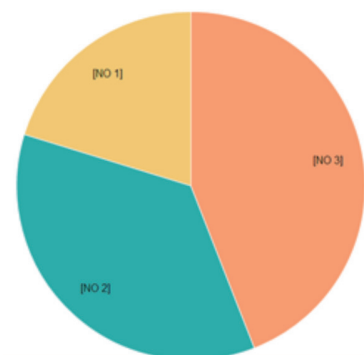
Sosialisasi politik ini kemudian terkait dengan perilaku memilih masyarakat, teori perilaku pemilih (*voting behavior*). Dalam teori ini, terdapat tiga pendekatan yang dapat menerangkan mengenai perilaku pemilih diantaranya adalah 1) Pendekatan Sosiologis, yang menyatakan bahwa kelas sosial, agama, subkultur dan asal etnik merupakan hal yang menentukan perilaku memilih 2) Pendekatan Psikologis fokus kepada identifikasi partai, orientasi dan isu orientasi kandidat dan 3) Pendekatan Rasional fokus kepada pertimbangan biaya dan keuntungan apa yang pemilih

dapatkan apabila memilih salah satu kandidat (Attunes,2010) .

Analisis dari pendekatan sosiologis mengaitkan perilaku memilih dengan struktur dan pengelompokan sosial-masyarakatnya baik secara formal maupun informal. Hal ini berarti analisis didasarkan pada lingkungan sekitar masyarakat seperti kelas sosial, afiliasi keagamaan, keluarga, profesi kelompok etnik dan subkultur politik tertentu dimana masyarakat tersebut menjadi bagian didalamnya. Didalam pengelompokan sosial baik informal maupun formal inilah masyarakat mendapatkan informasi-informasi dan preferensi politik untuk menentukan pilihannya.

### 5. Hasil Pemantauan Teknis

Pilkada DKI Jakarta 2017 Putaran I di Kecamatan Tanah Abang dimenangkan oleh pasangan Annies Baswedan-Sandiaga Uno, dengan 46,84% yakni sebesar 40.394 sara disusul pasangan Basuki-Djarot sebesar 33,68% atau sebesar 29.046 suara dan Agus-Silvy sebesar 19,48% atau sebesar 16.797 suara.



**Gambar 1.** Perolehan Suara Pilkada DKI Jakarta Putaran 1 Kecamatan Tanah Abang

**Sumber:** KPU RI, 2017

Rumah Susun Tanah Abang merupakan bagian dari kelurahan Kebon Kacang, di kecamatan Tanah Abang. Di kelurahan Kebon Kacang tersebut, hasil Pilkada Putaran 1 menunjukkan kemenangan pasangan Anies-Sandi dengan 44,1% atau sebesar 5.910 suara, disusul pasangan Basuki-Djarot dengan 35,7% atau sebesar 4.788 suara dan pasangan Agus-Silvy dengan perolehan 20,2% atau sebesar 2.714 suara. Hasil kelurahan Kebon Kacang tersebut diperoleh dari 28 jumlah TPS yang ada didalamnya.

Dari 28 TPS yang ada di kelurahan Kebon kacang, 4 diantaranya merupakan TPS yang berada di Rumah Susun Tanah Abang, yakni TPS 25,26 27 dan 28. Dengan masing-masing warga Blok A Rumah Susun Tanah Abang memilih di TPS 25 dan 26 sedangkan warga Blok B Rumah Susun Tanah Abang menyalurkan hak pilih di TPS 27 dan 28. Karena dalam situs Komisi Pemilihan Umum, publikasi suara hanya sampai pada tingkat kelurahan Kebon kacang, maka penulis melakukan pengolahan perolehan suara para calon khusus Rumah Susun Tanah Abang pada Pilkada DKI Jakarta putaran I.

Jalannya pemilihan sendiri berlangsung dengan aman dan relatif terkendali. Proses di setiap TPS dikawal dari awal hingga akhir oleh seorang dari TNI dan seorang dari POLRI. Masing-masing petugas TNI dan POLRI terlihat turut mencatat hasil pemungutan suara final yang tertera pada formulir C1 di masing-masing TPS. Pada setiap TPS, terdapat tiga orang saksi dari masing-masing pasangan calon yang berada didalam, juga terdapat beberapa orang berpakaian preman yang berada di sekitar TPS dan menanyakan asal-usul orang-orang yang berdiri untuk menonton diluar TPS.

Dalam satu lokasi TPS terdapat pula seorang tenaga survey lepas dari Lembaga Survei Indonesia, yang diketahui masih merupakan mahasiswa aktif salah satu perguruan tinggi Negeri di Jakarta. Terdapat pula tiga orang berbaju kotak-kotak berdiri diluar TPS, yang diketahui sebagai simpatisan pasangan calon nomor urut 2, yakni pasangan Basuki-Djarot. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menemukan bahwa di TPS 25 petugas TPS yang bertugas menerima pemilih diketahui bernama Syahril sempat membisikkan kepada beberapa pemilih muslim untuk memusatkan suara di pasangan tertentu, hal ini kemungkinan untuk menghindari kemenangan pasangan calon nomor urut 2 Basuki-Djarot. Sebagaimana diketahui dari wawancara peneliti dengan beberapa tokoh masyarakat di rumah susun Tanah Abang.

Pada proses pemungutan suara, terlihat bahwa masa di sekitar TPS mayoritas mendukung pasangan nomor urut 3, bahkan sempat ketika nomor 3 disebut sempat ada yang mengucapkan takbir, di sisi lain pasangan calon nomor urut 2 tampak tidak diharapkan menang.

Meskipun begitu, Hal ini mengisyaratkan jumlah *silent voters* yang signifikan memilih pasangan nomor urut dua namun tidak ingin mengutarakannya secara terang-terangan.



**Gambar 2.** Hasil Pengolahan Data Perolehan Suara Pilkada DKI Jakarta Putaran 1 Rumah Susun Tanah Abang  
*Sumber: Diolah Dari KPU RI, 2017*

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa khusus perolehan keseluruhan suara di Rumah Susun Tanah Abang, Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Syaiful Hidayat menang dengan perolehan suara 715, disusul Anies baswedan-Sandiaga Uno dengan 705 suara, peringkat ketiga adalah pasangan Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni dengan 164 suara.



**Gambar 3.** Anggota Polri dan Anggota TNI Mengkonfirmasi Perolehan Suara Kepada Ketua TPS

Hasil ini menarik karena dari empat TPS yang ada tersebut, Basuki Tjahaja Purnama kalah tipis di tiga TPS yakni TPS 25, TPS 27 dan TPS 28. Di TPS 25 pasangan Anies baswedan-Sandiaga Uno dengan 201 suara, disusul pasangan Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Syaiful Hidayat memperoleh suara 184 serta pasangan Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni dengan 49 suara. Di TPS 27 pasangan Anies baswedan-Sandiaga Uno menang tipis dengan 172 suara, Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Syaiful Hidayat memperoleh suara 168, serta pasangan Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni dengan 45 suara.

Di TPS 28 pasangan Anies baswedan-Sandiaga Uno menang tipis dengan 161 suara, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat memperoleh suara 159, serta pasangan Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni dengan 25 suara. Meskipun begitu, di TPS 26 Basuki memperoleh kemenangan dengan jarak yang relatif besar dibandingkan suara terbanyak berikutnya, yakni pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat mendapatkan 204 suara, disusul pasangan Anies baswedan-Sandiaga Uno dengan 171 suara serta pasangan Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni dengan 46 suara.

Di TPS 26 inilah Basuki-Djarot unggul hingga 33 suara dibandingkan pasangan Anies-Sandi, sedangkan kekalahan Basuki pada tiga TPS lainnya dari pasangan Anies-Sandi hanya 23 suara, dan Basuki pun menang 10 suara atas pesaing terdekatnya Anies-Sandi di Rumah Susun Tanah Abang. Terdapat pula seorang tenaga survey lepas dari Lembaga Survei Indonesia, yang diketahui masih merupakan mahasiswa aktif salah satu

perguruan tinggi Negeri di Jakarta. Terdapat pula 3 orang berbaju kotak-kotak berdiri diluar TPS, yang diketahui sebagai simpatisan pasangan calon nomor urut 2 Basuki-Djarot.

Salah satu petugas KPPS yang bertugas menerima pemilih sempat membisikkan kepada beberapa pemilih muslim untuk memusatkan suara di pasangan tertentu, hal ini kemungkinan untuk menghindari kemenangan pasangan calon nomor urut 2 Basuki-Djarot terpilih.

## **6. Isu Identitas Agama Di Rumah Susun Tanah Abang**

Pada proses pemungutan suara, begitu terasa atmosfer bahwa mayoritas masyarakat mendukung pasangan nomor urut 3, calon nomor urut 3 dianggap sebagai representasi muslim dibandingkan calon nomor urut 1, sedangkan calon nomor urut 2 dianggap sebagai representasi pemimpin non-muslim yang harus dihindari. Hampir setiap kali suara untuk kandidat nomor 3 disebut sempat ada yang mengucapkan takbir, di sisi lain pasangan calon nomor urut 2 tampak tidak diharapkan menang.. Meskipun begitu, jumlah perolehan suara di Rumah Susun Tanah Abang dimana pasangan nomor urut dua justru menang mengisyaratkan terdapat banyak jumlah *silent voters* yang memilih pasangan nomor urut 2 namun tidak ingin mengutarakannya secara terang-terangan, karena wacana mayoritas yang ada di lingkungan sekitar bersifat negatif. Selain karena dengung tafsir perintah surat Al-Maidah ayat 51 yang mengharuskan seluruh muslim memilih pemimpin muslim. Sentimen negatif terhadap calon nomor urut 2 pun ditambah dengan



reaksinya di Kepulauan Seribu yang dinilai menistakan agama Islam.

Hasil ini mendorong peneliti untuk melakukan wawancara dengan beberapa warga Rumah Susun Tanah Abang terkait orientasi memilih mereka. Hasilnya, wawancara dengan para tokoh masyarakat dan ketua RW didapatkan informasi bahwa kebanyakan warga Rumah Susun Tanah Abang didalam forum-forum keagamaan di masjid maupun musyawarah warga telah sepakat menyatakan untuk tidak mendukung pasangan calon nomor urut 2 karena menurut mereka seruan di surat Al-Maidah sudah jelas secara literal menjelaskan bahwa kaum muslim tidak boleh memilih pemimpin dari kalangan non-muslim.

Menarik ketika penulis menemukan terdapat narasumber yang berargumen bahwa hingga etnisitas Tionghoa juga menjadi pertimbangan untuk tidak memilih pasangan Calon nomor urut 2. Menurutny selain Islam pemimpin juga seharusnya merupakan orang “pribumi”, dan bahaya memberikan kekuasaan kepada etnis Tionghoa karena dicurigai memiliki keterkaitan dengan Negara RRC yang komunis untuk menguasai Indonesia secara perlahan.

Terdapat pula ungkapan warga yang menyebutkan bahwa kebangkitan orang Tionghoa di Indonesia sama saja dengan kebangkitan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dinyatakan terlarang pada masa Orde Baru. Tampak bahwa isu identitas dalam perilaku memilih di Pilkada DKI ini tidak berhenti pada isu agama saja tetapi juga banyak hal lain. Temuan ini seperti halnya penjelasan Ubed Abdilah (2012) yang menyatakan bahwa agama Islam di Negara-negara yang sebelumnya terjajah lebih mudah

diterima dan melekat dengan kalangan “pribumi”. Hal ini berbeda dengan agama Kristen yang diidentifikasi sebagai agama penjajah. Dalam hal ini, semakin mudah politik identitas “non-pribumi” dan “non-muslim” melekat dalam citra Gubernur Pertahana, Basuki Tjahaja Purnama.

Dari hasil wawancara penulis menemukan bahwa, kalangan warga masyarakat yang sudah pensiun mendapatkan sosialisasi politiknya dari institusi keagamaan yaitu masjid setempat serta memiliki waktu lebih banyak untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan RT maupun RW maupun pengajian di masjid setempat.

Oleh karena itu mereka yang mendapatkan sosialisasi politik dari dalam lingkungan Rumah Susun dan masjid setempat inilah yang bersepakat untuk tidak memilih pemimpin muslim, selain karena perintah kitab suci hal ini juga disebabkan oleh rasa kekecewaan kolektif terhadap pernyataan Gubernur Basuki di Kepulauan Seribu. Hal ini senada dengan ungkapan peneliti LIPI Sri Yanuarti bahwa terjadi penggiringan opini yang *massive* di rumah ibadah (Masjid) terkait politik identitas untuk tidak memilih calon Gubernur tertentu (Hakim, 2017)

Sementara itu warga masyarakat yang masih produktif, aktif bekerja di ibukota baik di swasta maupun pemerintahan, sering bersentuhan dengan birokrasi pemerintahan mendapatkan sosialisasi politik dari lingkungan kerja maupun lingkungan lain diluar Rumah Susun. Masyarakat yang masih produktif ini memiliki perilaku memilih dengan pertimbangan yang cenderung rasional yakni apakah calon gubernur kemudahan akses birokrasi dan perbaikan infrastruktur

atau tidak, karena selama ini hal tersebut terkait erat dengan kelancaran pekerjaan mereka.

Sementara itu, warga masyarakat usia relatif muda namun tidak produktif bekerja cenderung memiliki perilaku memilih yang sama yakni mempertimbangkan masalah agama meskipun mengakui kinerja pertahana yang baik. Rasa ketersinggungan terhadap ucapan pasangan calon nomor urut 2 terhadap surat Al-Maidah di kepulauan seribu juga menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan.

Generasi yang relatif muda, memiliki pekerjaan (profesi) tanpa disadari cenderung menganut nilai-nilai postmodernisme yang kritis terhadap informasi yang provokatif, mengedepankan pluralisme dan kebebasan berekspresi bagi siapa saja tanpa memandang etnis. Sosialisasi ini yang didapatkan di lingkungan pekerjaan karena mereka bergaul dan berkoordinasi dengan banyak orang dari berbagai kalangan, agama maupun etnisitas.

## 7. Simpulan

Reformasi telah membuka gerbang bagi Indonesia untuk berdemokrasi, pemilihan kepala daerah dilangsungkan sebagai wujud dari komitmen pemerintahan dewasa ini untuk memeratakan demokrasi ke seluruh pelosok tanah air mulai dari pemilihan walikota hingga Presiden pun dilaksanakan langsung. Isu agama pada Pilkada DKI Jakarta menjadi satu-satunya isu yang dapat dimainkan lawan politik dan hal ini terbukti membuat Gubernur Basuki terpancing untuk mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontra produktif dan merugikan dirinya sendiri.

Sebagai salah satu pemukiman yang ada di wilayah basis Islam Tanah Abang. Identitas agama terbukti merupakan hal yang begitu sensitif dan menjadi alat bagi elit untuk memperoleh keuntungan politik melalui penyebaran isu-isu terkait politik identitas. Hasilnya isu agama memang memiliki pengaruh besar, karena tercipta sentiment di masyarakat untuk tidak memilih pasangan nomor urut dua dengan pertimbangan non-muslim.

Selain pertimbangan non-muslim, unsur etnisitas Tionghoa sebagai etnis "non-pribumi" juga dikaitkan dan menjadi isu yang campurkan dalam kampanye politik identitas untuk tidak memilih pasangan nomor urut dua. Dapat dilihat pula bahwa identitas agama Islam meskipun bukan agama asli Indonesia namun memiliki kedekatan emosional dengan identitas "pribumi", sedangkan agama lain (Kristen) justru cenderung tidak diasosiasikan dengan "pribumi".

Sosialisasi politik masyarakat Rumah Susun Tanah Abang terbukti dipengaruhi oleh sikap lingkungan sekitar yang lebih besar yakni Tanah Abang, sehingga para pengurus RT/RW serta warga yang aktif di lingkungan Rumah Susun memiliki pandangan politik yang sama yang dibentuk di masjid dan forum-forum bersama warga, mereka dengan jelas memilih pemimpin yang muslim dibandingkan pemimpin yang non-muslim terutama sejak kasus di Kepulauan seribu yang dinilai sebagai tindakan penistaan agama dari Gubernur Basuki.

Meskipun begitu kemenangan Basuki Tjahaja Purnama di pemukiman ini ditengah wacana kolektif menolak pemimpin non muslim, yang bahkan begitu terlihat di hari pencoblosan mengindikasikan terdapat banyak silent

voters dan mereka yang tidak ikut didalam pembentukan wacana di forum-forum warga serta tidak hanya mendapatkan sosialisasi politik dari dalam Rumah Susun Tanah Abang tetapi juga lingkungan tempat kerja dan lingkungan lainnya karena usia mereka yang masih produktif. Mereka yang ikut dalam forum-forum warga dan pembentukan perilaku memilih di Masjid cenderung akan mengedepankan orientasi muslim sebagai pemimpin, bahkan beberapa mengaitkan dengan sentiment etnis, seperti bahayanya apabila memberikan kekuasaan eksekutif

berlebihan kepada etnis Tionghoa, bahkan ada yang mengaitkannya dengan kebangkitan PKI.

Sementara itu mereka yang produktif dan mendapatkan sosialisasi politik dari luar lingkup pemukiman akan mengetahui fakta—fakta lapangan mengenai kinerja dan perkembangan kerja Gubernur, sehingga pertimbangan agama sebagai faktor sosiologis untuk memilih seorang pemimpin dikesampingkan dan pertimbangan rasional mengenai apa yang didapat penduduk DKI dengan kinerja Gubernur menjadi lebih penting.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah S, U, (2012). Politik Identitas Etnis : Pergulatan Tanda Tanpa Identitas.
- Almon,G,A. & Powell, G, B. (1996). *Comparative Politics Today : A World View*. Harper Collins College Publisher.
- Anonim .(2017,Maret 17)Politisasi Agama Menodai Demokrasi. Beritasatu.com/ Diakses dari
- Attunes, R, (2010). Theoretocal Models of Voting Behavior. Jurnal Exedra No.4, Data Komisi Pemilihan Umum, (2017)
- Diakses Dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/03/15201311/peneliti.lipi.dampak.politik.identitas.pilkada.dki.jadi.persoalan.besar>
- Eisenberg ,A. & Kymlicka, W. (2011). *Identity Politics In The Public Realm : Bringing Institutions Back In*. Toronto : UBC Press.
- Faqih, F,. (2017, Maret 24). Reaksi Ahok dapat dukungan di wilayah Markas FPI. Diakses Dari <https://www.merdeka.com/jakarta/reaksi-ahok-dapat-dukungan-di-wilayah-markas-fpi.html>
- Hakim,R,N,. (2017, Mei 3) Peneliti LIPI: Dampak Politik Identitas Pilkada DKI Jadi Persoalan Besar. hlm. 146-156
- <http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/5235-politisasi-agama-menodai-demokrasi.html> <https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/image/c1/25823/25879/28>
- May 20, hlm. 1
- Penulis KPU. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Diakses dari <http://www.kpu-tangerangkota.go.id/p/pemilihan-umum-kepala-daerah-dan-wakil.html>
- Tim Penulis BBC. (2016, November 2016). Pidato di Kepulauan Seribu dan hari-hari hingga Ahok menjadi tersangka. Diakses Dari <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601>
- Vaughn, B,.(2005). Indonesian Election. Congress Research Service-The Library of Congress
- Wawancara pada 15 Februari 2015 dengan Andi Awaluddin (51 Tahun), Tokoh Masyarakat dan Ketua Rukun Warga RW 010 Rumah Susun Tanah Abang
- Wawancara pada 15 Februari 2015 dengan Anonim (26 Tahun), Warga Rumah Susun Tanah Abang, berprofesi sebagai pengusaha bidang jasa.
- Wawancara pada 15 Februari 2015 dengan Endang Ruchimat (67 Tahun), Tokoh Masyarakat dan Mantan Sekretaris RW 010 Rumah Susun Tanah Abang.
- Wawancara pada 15 Februari 2015 dengan Sayadi Aru Lio (31 Tahun), Warga Rumah Susun Tanah Abang, berprofesi Karyawan Swasta.
- Wawancara pada 15 Februari 2015 dengan Thamrin Datuk Tumanggung (72 Tahun), Tokoh Masyarakat dan Pembina Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Tanah Abang

**ANALISIS KELEMBAGAAN BARU PENANGANAN MUATAN KEBENCIAN  
BERBASIS POLITIK IDENTITAS DI INTERNET DI INDONESIA:  
SEBUAH KAJIAN AWAL**

**Isto Widodo**

*Voxpol Research and Consulting, Jakarta*

---

**ABSTRACT**

*This paper objective is to explores how Indonesia handle hate speech based on identity politics. I use Theory of New Institutionalism in Economic Sociology (NIES) by Victor Nee and operate it in qualitative method by document studies. There are three main findings: (1) inclusivity of online communication is not always results positive condition for national development and democracy in Indonesia; (2) Indonesia is on the right track to overcome negative impacts of the online communication inclusivity on political identity based hate speech. Indonesia attempt effort to make single identity for netizen based on real identity; (3) Indonesia has not gain optimal condition in such effort for it is need adequate time to be institutionalized. As this paper is based on institutionalism, it doesn't reach structural aspect of the problems. Again, as it is just preliminary studies, further studies is needed.*

**Keyword:** Political Identitiy, Hate Speech, New Institutionalism In Economic Sociology

---

**ABSTRAK**

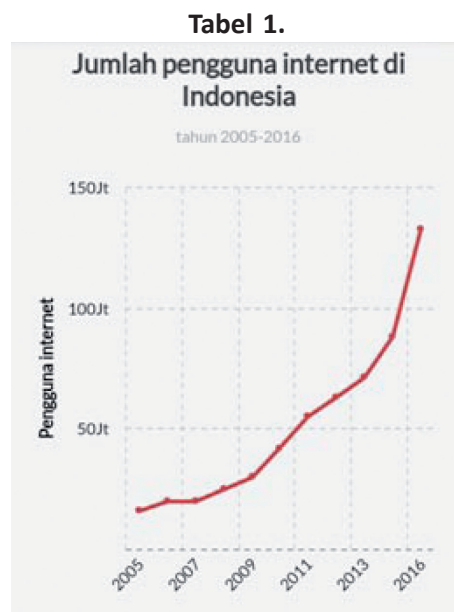
*Makalah ini bertujuan untuk mengeskplorasi penanganan muatan kebencian berbasis politik identitas di internet oleh otoritas pemerintah Indonesia. Kerangka teori yang digunakan adalah Teori Kelembagaan Baru dalam Sosiologi Ekonomi (New Institutionalism in Economic Sociology/NIES) menurut Victor Nee. Metode yang*

*digunakan adalah metode studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan beberapa hal sebagai berikut: (1) Inklusifitas komunikasi di internet tidak selalu berdampak baik bagi demokrasi dan pembangunan nasional Indonesia (2) upaya pemerintah sudah berada dalam jalur yang tepat dilihat dari perspektif kelembagaan baru. Upaya untuk menyelaraskan identitas maya dan identitas riil serta upaya mengembalikan kendali institusi atas aktor adalah langkah yang memang dibutuhkan; (3) Belum optimalnya langkah tersebut disebabkan belum tercapainya internalisasi dan institusionalisasi yang dibutuhkan. Penelitian ini memakai kerangka institusionalisme sehingga tidak menjangkau aspek-aspek structural dan relasi kekuasaan diantara para aktor. Penelitian ini juga hanya merupakan penelitian awal dan terbatas pada data-data awal yang sifatnya sekunder. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperdalam kajian mengenai topik ini.*

**Kata Kunci:** muatan kebencian, politik identitas, Kelembagaan Baru dalam Sosiologi Ekonomi

## 1. Pendahuluan (Font-12, Bold)

Secara historis, ada beberapa fase revolusi media komunikasi dimana penemuan internet adalah fase paling mutakhir dari revolusi media komunikasi ini. Saat ini, internet telah menjadi media komunikasi yang makin umum digunakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Inovasi dalam hal piranti keras (*hardware*) dan piranti lunak (*software*) memperluas akses penggunaan internet dengan harga yang makin terjangkau. Terjadi lonjakan akses internet selama dua dekade ini di seluruh dunia termasuk di Indonesia.



**Sumber:** <https://lokadata.beritagar.id/topik/teknologi?page=11>

Dari tabel terlihat bahwa terjadi lonjakan akses internet di Indonesia. Pada tahun 2005 akses internet baru dinikmati oleh sekitar 16 juta pengguna.

Pada tahun 2016 jumlahnya menjadi 132 juta pengguna internet di Indonesia. Akses terbanyak dilakukan dengan piranti telepon genggam.

Perubahan penggunaan media komunikasi ini berimbas secara luas terhadap pola dan perilaku komunikasi secara keseluruhan. Demikian pula dengan penggunaan media komunikasi berbasis internet. Penelitian yang dilakukan oleh Mc.Grath misalnya menunjukkan bahwa komunikasi di media sosial berpengaruh pada interaksi antar individu di rumah tangga. Sementara itu, Mathias Kamp et al dalam *Assessing The Impact Of Social Media on Political Communication and Civic Engagement in Uganda* menunjukkan bahwa penggunaan internet juga mengubah pola komunikasi politik di Uganda. Secara keseluruhan memang terdapat indikasi bahwa perubahan media komunikasi berdampak pula pada relasi sosial baik dalam tataran mikro, meso maupun makro.

Dari berbagai penelitian, didapatkan data bahwa ada empat karakter khas dari komunikasi di internet: *pertama*, inklusifitas dimana semua orang bisa menjadi produsen dan distributor sekaligus konsumen dari berita, wacana, opini bahkan propaganda; *Kedua*, karakter lintas batas atau bahkan sering disebut tak terbatas (*borderless*); *Ketiga* karakter cepat dan bahkan saat itu juga (*real time*); *Keempat*, terdiskursusnya otoritas dan nilai tradisional dalam berkomunikasi. Bagi otoritas politik dan pembuat kebijakan, atau bahkan institusi sosial, karakter-karakter tersebut menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang belum pernah dihadapi sebelumnya dalam komunikasi dengan media konvensional. Salah satu konsekuensi dari pola dan

perilaku komunikasi di internet yang dihadapi masyarakat dan otoritas kebijakan di Indonesia adalah maraknya muatan kebencian berbasis politik identitas. Ada beberapa konteks yang turut mempengaruhi kemunculan dan berkembangnya ujaran kebencian tersebut, yaitu: *pertama*, konteks sosial masyarakat Indonesia sendiri yang sangat plural. *Kedua*, konteks demokrasi, otonomi daerah dan pemilihan umum eksekutif secara langsung. Alih-alih membuka deliberasi seluas-luasnya, kontestasi elektoral ini justru kemudian sering membawa pada segregasi sosial yang cukup tajam.

Dalam kerangka itu, produksi dan distribusi ujaran kebencian berbasis politik identitas menjadi fenomena masif di internet. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai cara untuk meminimalisasi hal ini dengan berbagai instrument institusional. Hasilnya menurut klaim Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), jumlah ujaran kebencian telah menurun menjadi sekitar 30% di pertengahan akhir 2017. Namun pada tahun 2018 dan 2019 perilaku produksi dan distribusi ujaran kebencian, fitnah dan hoax diperkirakan akan meningkat kembali berkaitan dengan akan diadakannya Pemilu 2019.

Dengan uraian masalah seperti itu, penelitian ini mengajukan pertanyaan: (1) dalam perspektif kelembagaan baru, bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap muatan kebencian berbasis politik identitas ini? (2) Apa kelemahan dari penanganan terhadap ujaran kebencian berbasis politik Identitas yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data kajian dokumen. Penelitian kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya (Somantri R. G., 2005). Metode ini dilandasi oleh pradigma interpretatif-naturalistik. Menurut Somantri, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berusaha mencari pola dan generalisasi, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara mendalam mengenai sebuah fenomena (*ibid.*,59).

Penelitian dokumen adalah salah satu terapan teknik pengambilan data dalam metode ualitatif. Jenis data yang didapat dari penelitian dokumen untuk konteks terbaru bisa berjenis data primer maupun sekunder. Contoh data primer dalam teknik studi dokumen adalah dari rekaman suara, rekaman video dan risalah atau notulensi. Sedangkan jenis data sekunder dari studi dokumen bisa berupa laporan, berita, analisis maupun komentar dari fenomena atau pernyataan sumber primer. Penelitian ini memakai perspektif institusionalis dan bersifat sebagai studi awal (*preliminary studies*) sehingga data dari dokumen cukup untuk memberikan data-data yang diperlukan.

Dokumen yang dikaji berupa dokumen tercetak maupun dokumen digital berupa berita, paparan, makalah, video dan infografis. Sebagaimana tujuan dan pertanyaan penelitian, dokumen yang akan dikaji adalah tentang: kerangka institusional tentang larangan ujaran kebencian dan politik identitas, pola kerja produsen dan distributor ujaran kebencian serta data tentang penegakan etika, norma dan nilai-nilai komunikasi oleh institusi sosial, asosiasi profesi dan

lain-lain. Dari data-data itu diharapkan dapat diketahui bagaimana institusi menetapkan kerangka komunikasi dan sejauhmana aktor lain mendukung dan mengikuti kerangka yang sudah ditetapkan.

## 3. Teori New Institutionalism in Economic Sociology (NIES)

NIES menurut Victor Nee adalah Teori yang melihat bahwa institusi berperan dalam menentukan batasan pilihan-pilihan tindakan individu untuk mengejar kepentingannya. (Nee, 2005). Institusi merupakan struktur sosial yang menyediakan pedoman tindakan bersama dengan cara mengatur kepentingan masing-masing orang dan bagaimana mencapainya serta menjadi landasan hubungan antar mereka (*ibid*, 2005: 40). Institusi dengan demikian juga menyediakan struktur insentif bagi para aktor untuk bertindak.

Dalam Pendekatan Kelembagaan, individu sebagai aktor ekonomi bukanlah entitas atomic yang terlepas dari struktur sosialnya, namun pada saat yang sama ia juga punya otonomi relatif terhadap institusi sehingga tidak selalu patuh sepenuhnya pada institusi itu. Tingkah laku individu atau aktor selalu melekat pada fakta relasi sosial. Dalam tulisannya Paul Ingram dan Karen Clay meringkas Teori Kelembagaan baru ini dengan satu kalimat ringkas yaitu, "*choice within constraint*" (pilihan dalam batasan) (Clay, 2000. 26). Sedangkan Nee berkata, "*actors are motivated by interest and preferences, often formed and sustained within such groups* (aktor dimotivasi oleh kepentingan dan preferensi yang sering dibentuk dan dijaga dalam sebuah kelompok) (Nee, *The New Institutionalism*



*in Economics and Sociology. Forthcoming: Handbook for Economic Sociology, eds, 2003).*”

Institusi terdiri dari elemen formal dan informal. Elemen formal seperti norma, aturan dan konvensi. Sedangkan elemen informal adalah kepercayaan, nilai dan kebiasaan. Baik elemen formal maupun elemen informal ini saling terhubung. Keduanya, menjadi dasar tindakan individu-individu dalam melakukan tindakan untuk mencapai kepentingan mereka. Sebagai landasan tindakan yang bukan saja meliputi aspek kognitif-teknis-mekanis tetapi juga aspek filosofis-ideologis maupun aspek afektif, institusi menjadi entitas yang dominan. Perubahan terhadap institusi akan berarti juga perubahan terhadap relasi antar aktor dan pilihan tindakan yang rasional bagi para aktor.

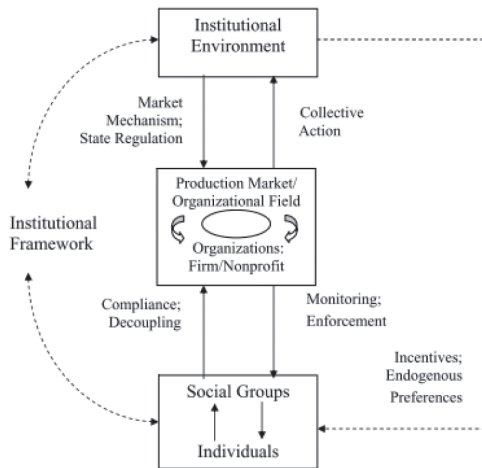
Menurut Ingram dan Clay, Teori Kelembagaan baru ini berakar dari asumsi pendekatan perilaku (*behavioral assumptions*). Sejalan dengan itu Anil Hira and Ron Hira melihat bahwa Kelembagaan Baru ini adalah format teori yang berusaha mempertahankan pendekatan Pilihan Rasional (Anil Hira and Ron Hira, Apr., 2000). Sedangkan Victor Nee menilai teori ini menlandaskan diri pada metode sosiologi yang dirumuskan oleh Emile Durkheim.

Dengan melihat asumsi NIES di atas, NIES beroperasi pada dua dimensi yaitu lingkungan kelembagaan (*institutional environment*) dan pengaturan kelembagaan (*institutional arrangement*). Williamson dalam Yustika mendefinisikan lingkungan institusional sebagai seperangkat struktur aturan politik, sosial dan hukum yang memapankan kegiatan produksi, pertukaran (transaksi) dan distribusi (Yustika, 2013).

Sedangkan pengaturan institusional adalah kesepakatan unit ekonomi untuk mengelola dan mencari jalan agar hubungan antar unit tersebut dalam sebuah kesepakatan. Dalam pengaturan institusional ada alokasi hak-hak kepemilikan kepada kelompok, individu maupun pemerintah. Alokasi ini diatur melalui kesepakatan lembaga apakah akan dilakukan melalui pasar, pengaturan publik atau model kontrak dengan hirarki.

Dalam kaitannya dengan pilihan tindakan yang dilakukan oleh individu, NIES berangkat dari konsep kemelekatan (*embeddedness*). Yang dimaksud dengan kemelekatan adalah bagaimana individu melekat kepada struktur dan relasi sosial yang berlangsung dalam jaringan individu dari para aktor. Williamson dalam hal ini melihat keterlekatan itu dalam perspektif yang lebih formal dan administratif. Ia melihat bahwa hubungan sosial dalam relasi hierarkis memunculkan perkembangan ekonomi. Menurut Granovetter, relasi tidak hanya bisa dilihat dalam tataran legal yang berkaitan dengan otoritas tersebut. ia berpendapat bahwa faktor kepercayaan (*trust*) dan solidaritas berperan penting dalam ketermelekatan individu pada lingkungan sosial serta relasi dengan individu yang lain. Dengan demikian, berbeda dengan Williamson, Granovetter membagi dua kelekatan yaitu kelekatan relasional dan kelekatan struktural. Kelekatan relasional meliputi bidang yang luas dan dibentuk oleh relasi lintas struktur. Sedangkan kelekatan structural dibentuk oleh struktur yang lebih hirarkis dan berkaitan dengan lingkup otoritas.

Selanjutnya, Nee membuat model NIES sebagai berikut:



**Gambar 1.** Model New Institutionalism in Economic Sociology  
**Sumber:** Victor Nee, *The New Institutionalism in Economics and Sociology*, hal 36.

Model tersebut mengilustrasikan bagaimana institusi memberikan kerangka bagi tindakan aktor untuk menghasilkan keluaran bersama. Institusi memberikan insentif dan membentuk preferensi. Kepada institusi level meso, institusi makro memberikan aturan dan pada saat yang sama ada mekanisme pasar yang berpengaruh. Kepada aktor di tingkat mikro, institusi meso melakukan pengawasan dan penegakan aturan (*enforcement*). Aktor mikro akan memenuhi hal itu.

Jika terjadi ketidakpuasan oleh aktor mikro, menurut model itu, aktor akan menyalurkan ketidakpuasan itu melalui institusi meso. Institusi meso inilah yang akan menjadi sarana tindakan bersama (*collectif action*) untuk mengubah kerangka institusi yang telah ditetapkan institusi makro.

## 4. Pembahasan

### 4.1. Faktor Lingkungan: Isu SARA di Indonesia Pasca Orde Baru

Masalah suku, agama, ras dan antar golongan (disingkat SARA) adalah masalah krusial dalam pembangunan nasional (*national building*) di Indonesia disebabkan oleh pluralitas masyarakat Indonesia sendiri. Menurut data kementerian dalam negeri terdapat 1340 suku bangsa yang tergabung dalam 300 kelompok etnik, 6 agama besar dan ratusan kepercayaan (agama) lokal dan lebih dari 700 bahasa (BPS, 2015). Sangat beragamnya komposisi masyarakat itu dengan sendirinya akan menjadi potensi pengelompokan pada momen-momen tertentu seperti dalam pemilukada langsung maupun pemilu nasional.

Terdapat fenomena unik dalam hal politik identitas sejak era Reformasi hingga saat ini. Dalam hal kedua kesatuan identitas tersebut terdapat pasang surut. Pada awal Reformasi pengelompokan berdasarkan suku dan agama tidak terlalu menimbulkan friksi antar kelompok. Hal ini dapat diduga terjadi karena dua hal: *pertama*, karena terdapat fragmentasi yang memecah pengelompokan identitas tersebut dalam berbagai partai politik. Anies Baswedan mencatat bahwa terdapat euforia Islamisme setelah Orde Baru tumbang (Baswedan, 2004). Namun fragmentasi partai memecah konsentrasi euforia islamisme itu. Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik. Dari jumlah itu terdapat 15 partai politik yang memakai nama dan basis organisasi Islam, 2 partai Katolik dan 1 partai berbasis organisasi serta pemilih Kristen. Identitas Islam dan Muslim dalam 15 partai itupun terbagi dalam berbagai sub identitas, utamanya adalah partai Islam berbasis

pembaharuan dan revivalisme Islam serta partai Islam yang nasionalis.

Penggunaan identitas agama muncul cukup kentara pada saat pemilihan presiden di MPR. Isu yang dimainkan waktu itu adalah isu soal boleh tidaknya kepala negara perempuan. Akibat dari mengemukanya isu ini Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih menjadi presiden mengalahkan Megawati Soekarnoputri. Setelah itu, politik identitas agama terutama yang berkaitan dengan isu revivalisme nilai Islam kurang menonjol. Hal ini ditandai dengan menurunnya perolehan partai berbasis identitas ini yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan Sejahtera. Bahkan meskipun PKS meningkat perolehan suaranya pada Pemilu 2009 isu identitas berbasis agama kurang mengemuka.

Sedangkan dalam hal politik identitas berdasarkan identitas etnik dan kesukuan, friksi dan konflik banyak terjadi sejak diberlakukannya pemilukada secara langsung. Namun dalam perkembangannya terdapat pergeseran isu. Semula isunya berkaitan dengan putra daerah; artinya, mereka yang berhak menjadi kepala daerah adalah orang yang punya etnisitas atau berasal dari suku yang terdapat di daerah tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, isunya bergeser menjadi friksi internal antar suku-suku di daerah tersebut. Hal ini misalnya terdapat di Nusa Tenggara Barat dimana suku Sumba dan Bojo bersaing dengan suku-suku di Pulau Lombok. Selain itu terdapat juga fenomena akomodasi terhadap suku-suku pendatang. Hal ini misalnya terjadi di Sumatera Utara dan Lampung dimana suku Jawa yang sebenarnya pendatang justru mayoritas. Sampai saat ini politik identitas berbasis suku dan etnis masih terjadi.

Kedua, kebangkitan politik identitas berbasis agama pada awal Reformasi mungkin juga disebabkan oleh belum terlalu kuatnya proses santrinisasi di Indonesia pasca Orde Baru. Santrinisasi sendiri sebenarnya terminologi yang problematik. Ia berasal dari konsep kategorisasi masyarakat Jawa seperti yang disebutkan oleh Clifford Geertz yang menunjukkan kategori Santri, Abangan dan priyayi dalam struktur masyarakat Jawa (Geertz, 1976). Santrinisasi berarti meningkatnya kesadaran dan bangkitnya revivalisme nilai Islam dari semula masyarakat yang lebih 'abangan' atau nasionalis. Selain istilah santrinisasi istilah lain yang bisa digunakan barangkali adalah meluasnya pengaruh muslim urban modernis maupun revivalis. Pada intinya keduanya merujuk pada deskripsi perubahan sosial politik yang sama yaitu meningkatnya jumlah dan kesadaran kelompok Islam di Indonesia.

*Ketiga*, belum masifnya politik identitas berbasis identitas agama dapat diduga karena tiadanya momentum yang berkelanjutan cukup kuat untuk membingkai kemunculannya. Isu presiden perempuan mungkin adalah isu yang sempat muncul, namun kemudian tidak mempunyai efek keberlanjutan. Ini berbeda dengan politik identitas yang terjadi mulai tahun 2010 hingga saat ini. Pada periode waktu ini kemunculan Joko Widodo yang diframing oleh kelompok tertentu sebagai 'musuh Islam', 'PKI', "liberal' dan berbagai stigma lainnya yang diidentikkan dengan sebagai 'lawan Islam dan muslim' menjaga isu identitas berbasis agama terus-menerus terjadi hingga saat ini.

Selain faktor kemunculan Jokowi sebagai penanda masifnya penggunaan

ujaran kebencian dan politik identitas di Indonesia, terjaganya isu ini juga disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan persebaran berita dan opini secara masif dalam waktu yang singkat. Ini adalah alat yang sangat efektif untuk melakukan propaganda dan mobilisasi.

Kemajuan teknologi informasi juga disebut telah menimbulkan *culture shock* dan perubahan pola relasi sosial dimana hirarki dan otoritas sosial tradisional didekonstruksi. Untuk kasus Indonesia, dengan literasi yang rendah, proses seleksi terhadap informasi dan opini yang beredar seringkali tidak berjalan dengan semestinya. Pendapat para ahli agama, misalnya, sering dikalahkan oleh opini awam. Berita di media mainstream sering kalah dari berita dengan standar jurnalisme yang tidak jelas. Hal serupa berlaku untuk topik-topik dan bidang lain.

Kemajuan teknologi informasi meskipun memungkinkan hubungan real time antara pihak-pihak yang berkomunikasi ternyata juga rentan terhadap distorsi komunikasi. Bahasa-bahasa tulisan misalnya sering menjadi sarana untuk melakukan distorsi ini. Bukan hanya dilakukan oleh orang awam, distorsi ini juga sering ditemui pada tulisan-tulisan di media arus utama.

Kesemua faktor itu menjadi masalah serius dalam menata komunikasi di dunia maya. Salah satu modus yang dipakai untuk menjaga politik identitas ini adalah dengan kampanye hitam dimana ujaran kebencian menjadi bagian di dalamnya. Ujaran kebencian, yang dapat dimasukkan dalam kategorisasi framing negatif memang penting untuk melakukan stigmatisasi terhadap lawan

politik. Stigmatisasi ini, dalam perspektif sosiologis, berguna untuk memberikan petunjuk bagi para pengikut mengenai siapa yang masuk dalam kelompok “kita” dan “mereka”. Semakin intens sebuah stigmatisasi maka akan semakin intens juga pembelahan masyarakat. Dalam sudut pandang seperti itu ujaran kebencian sangat berbahaya bagi proses demokrasi maupun dalam pembangunan nasional, terutama untuk konteks Indonesia. Dalam upaya konsolidasi demokrasi, ujaran kebencian akan menjadi cara seleksi yang tidak sehat bagi proses elektoral maupun dalam kebijakan publik. Ujaran kebencian akan menyingkirkan kemungkinan munculnya pilihan terbaik dalam proses demokrasi dan pemerintahan. Sedangkan dalam perspektif pembangunan bangsa, ujaran kebencian berbasis politik identitas akan menimbulkan pembelahan-pembelahan dan merusak integrasi bangsa.

#### **4.2. Insentif dan Disinsentif**

Menurut Teori NIES, aktor-aktor berperilaku berdasarkan motivasi, preferensi dan batasan yang diberikan oleh insitusi. Institusi membentuk pasar dan memberikan kerangka berupa elemen formal dan elemen non formal. Dengan mengemukakan terlebih dahulu kerangka institusi ini, dapat dianalisis apakah pola penanganan dampaknya sudah berada pada jalur yang tepat atau belum.

Kerangka institusi pertama dalam kasus ini adalah demokrasi Indonesia. Demokrasi menjadi arena baru bagi perebutan pengaruh dan tarik ulur politik dengan memanfaatkan opini rakyat. Setiap politikus dan partai politik berusaha mendapatkan legitimasi publik dengan melakukan dua hal: (1) pencitraan

(political imaging); (2) propaganda negatif. Pencitraan politik dilakukan untuk memberikan kesan positif bagi publik dengan imbal balik popularitas dan elektabilitas. Sedangkan propaganda negatif dilakukan untuk melakukan hal yang sebaliknya pada competitor atau lawan politik. Imbal balik dari propaganda negatif ini adalah stigma negatif dan delegitimasi citra dan kebijakan yang dibuat oleh lawan politik.

Demokrasi juga berarti kebebasan berpendapat. Indonesia pasca Orde Baru mengadopsi kebebasan berpendapat ini. Menurut *Freedom House*, dalam hal kebebasan sipil dan hak politik Indonesia termasuk dalam kategori negara yang bebas (*Freedom in The World: Indonesia, 2017*). Publik Indonesia punya kebebasan untuk berkomentar, mengevaluasi dan menilai politikus, pemerintah maupun kebijakannya. Dalam konteks penggunaan media online, publik Indonesia juga dikenal sangat cerewet (*Minat Baca Rendah, Tapi Cerewet Banget! Itulah Netizen Indonesia?*, 2017). Hal tersebut mengindikasikan bahwa publik Indonesia memang relatif sangat bebas mengeluarkan pendapat.

Insentif yang berkaitan dengan demokrasi adalah kompetisi yang bebas. Meskipun kebebasan ini diragukan berkaitan dengan politicking yang dilakukan baik oleh aktor individu, lembaga politik maupun lembaga negara itu sendiri, namun kompetisi wacana di Indonesia relatif sangat bebas. Kekuatan-kekuatan politik di Indonesia tidak hanya mengandalkan media arus utama. Kemajuan teknologi memungkinkan media-media alternatif termasuk media sosial untuk memproduksi dan

mendistribusikan gagasan, opini dan propaganda.

Insentif selanjutnya yang diberikan oleh institusi adalah sistem ekonomi yang cenderung bebas. Sistem ekonomi pasar bebas memberikan dampak positif bagi makin mudahnya kepemilikan dan akses komunikasi bagi masyarakat. Dengan kepemilikan dan akses terhadap piranti lunak maupun keras komunikasi ini, publik sendiri bisa memproduksi dan mendistribusikan gagasan, opini dan wacana. Namun pada saat yang sama, kebebasan ini juga menghasilkan tantangan bagi negara untuk mengantisipasi dampak negatifnya. Dampak negatif yang kemudian timbul salah satunya di lingkup media dimana muncul sangat banyak media baru dengan pengawasan yang tidak memadai.

Dalam berbagai insentif itu aktor-aktor mengejar kepentingan mereka masing-masing. Pada tingkat mikro, setidaknya ada enam jenis aktor yang terlibat, antara lain: politikus, partai politik, individu anggota masyarakat, organisasi massa (ormas) media dan buzzer. Menurut Teori NIES, setiap aktor mengejar kepentingan masing-masing berdasarkan struktur insentif yang diberikan oleh institusi. Dalam hal ini dapat dijelaskan kepentingan aktor-aktor yang terlibat dalam upaya pembentukan komunikasi politik yang bebas dari ucapan kebencian berbasis isu SARA sebagai berikut:

Aktor pertama yaitu politikus mempunyai tujuan utama dari politikus secara umum adalah memperoleh modal sosial, modal politik dan modal ekonomi untuk kemudian dimanfaatkan dalam kontestasi politik demi meraih jabatan publik, privilege maupun konsesi

sumberdaya lainnya. Jadi, modal sosial, modal politik dan modal ekonomi adalah tujuan antara; sedangkan tujuan utamanya adalah jabatan publik, privilege dan konsesi sumberdaya. Dalam konteks Indonesia, tujuan ini disediakan oleh institusi. Secara normatif, semua politikus yang berhasil memenangkan kandidasi akan memperoleh jabatan-jabatan politik yang diperebutkan; misalnya menjadi seorang bupati, gubernur atau anggota legislatif. Pada jabatan publik tersebut melekat hak-hak otoritatif dan konsesi untuk mengelola sumberdaya-sumberdaya publik. Selanjutnya, untuk konteks Indonesia, para pejabat publik biasanya juga punya semacam privilege dan *prominence*. Privilege berupa akses-akses kepada saluran dan sumberdaya yang tidak dimiliki oleh selain pejabat publik. Sedangkan *prominence* biasanya berkaitan dengan status sosial. Seorang pejabat biasanya dianggap punya status sosial yang tinggi dan mendapat penghormatan dari masyarakat. Secara umum, masyarakat Indonesia sangat menghormati pejabat publik berkaitan dengan budaya yang masih sangat terpengaruh budaya feodalistik. Bagi para politikus, ini adalah insentif. Struktur insentif ini untuk konteks Indonesia juga tidak hanya disediakan secara formal. *Prominence* seperti disebutkan di atas termasuk insentif yang diberikan secara informal. Selain itu, insentif ekonomi juga bisa didapatkan melalui insentif nonformal. Misalnya, meskipun sang kandidat tidak memenangkan kandidasi, namun suara yang ia dapat bisa dikonversi menjadi keuntungan ekonomi. Hal ini umum terjadi di pemilihan anggota legislatif dimana untuk kepentingan aktor tertentu, jumlah suara yang didapat oleh

kandidat yang kalah bisa ditransaksikan dengan calon pemenang. Perolehan seperti ini bisa dimungkinkan dalam sistem pemilihan umum proporsional dan kurangnya kerangka institusi untuk menjangkau pelanggaran ini.

Aktor kedua, partai politik mempunyai tujuan yang hampir serupa dengan politikus. Mereka mengejar tujuan yang insentifnya dibentuk oleh institusi. Partai politik yang berhasil mengirim wakilnya menjadi anggota legislatif atau menduduki jabatan eksekutif akan memperoleh sejumlah konsesi, akses terhadap pengaturan alokasi dan distribusi sumberdaya serta sejumlah privilege.

Aktor keempat yaitu Individu anggota masyarakat. Afiliasi individu terhadap ideologi maupun kelompok yang dianggap punya satu nilai dan kepercayaan adalah sebuah kewajiban dalam perspektif sosiologi. Dalam analisis kebijakan publik yang dipengaruhi oleh perspektif sosiologi, individu-individu yang punya kesamaan kepercayaan dan nilai bersama akan membentuk jaring-jaring kebijakan. Begitu pula dalam Teori Perilaku Pemilih perspektif Sosiologi menyatakan bahwa pilihan seseorang ditentukan oleh kelompok sosial dimana individu tersebut berasal. Individu yang bersangkutan akan memilih kandidat atau berperilaku sesuai dengan nilai dan keyakinan yang ia miliki. Dalam konteks ini, komunikasi politik yang dilakukan individu anggota masyarakat baik berupa sosialisasi, kampanye maupun propaganda didasari oleh kepentingannya agar ideologi, nilai dan kepercayaan yang ia miliki dikenali, diterima, diadopsi atau bahkan jika mungkin mendominasi dalam pemilihan kandidat pejabat publik maupun dalam kebijakan publik.

Aktor keempat yaitu ormas atau civil society dalam arti yang lebih luas merupakan kumpulan individu-individu yang bersifat partisipatoris dan mempunyai kemandirian baik terhadap masyarakat politik maupun terhadap masyarakat ekonomi. Ada dua jenis CSO, yaitu CSO yang berbasis pada ideologi dan CSO yang bergerak berdasarkan isu tertentu. CSO yang bergerak berbasis ideologi berkepentingan agar ideologi yang dianut bisa diterima, diakomodasi atau bahkan bisa mendominasi kebijakan publik. Sedangkan CSO yang berlandaskan pada isu tertentu akan berjuang agar isu yang dimaksud bisa menjadi kebijakan. Misalnya, isu ekologi dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Aktor kelima adalah media massa sering dibicarakan berkaitan dengan hubungannya dengan demokrasi dan dengan kepemilikan modal. Di satu sisi, media dianggap menjadi sarana komunikasi politik yang dituntut netral. Namun di sisi lain, media sebagai sebuah perusahaan juga dihadapkan pada tuntutan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini terdapat tarik ulur yang intens antara aspek etik dengan aspek pragmatis.

Aktor terakhir adalah buzzer yang berbeda dengan media. Buzzer pada dasarnya memang sebuah perusahaan/ lembaga/kelompok individu yang mencari keuntungan sepenuhnya dengan memanfaatkan kompetisi dan kontestasi. Mereka bekerja berdasarkan pesanan untuk melakukan sorotan besar-besaran (*blow up*) terhadap sebuah isu atau tokoh tertentu. Selama ini tidak ada batasan etik terhadap buzzer dan karenanya, Buzzer paling berpeluang untuk melakukan pelanggaran komunikasi politik.

Kerangka institusi baik elemen formal maupun elemen non formal selain berperan membentuk struktur insentif juga menjadi batasan atau menjadi disinsentif bagi perilaku aktor. Dalam perspektif pilihan rasional, tindakan aktor akan ditujukan semaksimal mungkin bagi kepentingan dirinya. Kerangka institusi membatasi itu sehingga pilihan-pilihan yang tersedia tergantung dari bagaimana insentif/disinsentif yang disediakan oleh institusi.

Ada beberapa kerangka disinsentif bagi tindakan aktor yang sebebaskan-bebasnya dalam hal komunikasi politik yang berkaitan dengan SARA di Indonesia. Kerangka pertama berupa elemen non formal yaitu kebiasaan, nilai dan konvensi antara lain berupa penghormatan terhadap otoritas keilmuan, nilai kejujuran, penghormatan terhadap persatuan dan keberagaman, penghormatan terhadap pendapat orang lain, consensus kebangsaan dan sebagainya.

Secara partikuler, masing-masing kelompok sosial dan profesi sebenarnya punya nilai-nilai sendiri. Nilai-nilai itu terlembaga dalam masing-masing kelompok. Pada kelompok sosial yang memakai landasan atau mengatasnamakan agama misalnya ada banyak nilai-nilai baik yang seharusnya membatasi tindakan sekehendak hati, termasuk dalam berkomunikasi. Demikian pula dengan nilai-nilai adat, budaya dan lain-lain. Asosiasi profesi yang berkaitan dengan media bahkan telah memiliki nilai-nilai yang sudah terkodifikasi, misalnya kode etik jurnalistik.

Sedangkan disinsentif yang berupa elemen formal terdiri dari aturan-aturan hukum (*state regulation*) terdiri dari

perundang-undangan dalam hukum pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Surat Edaran Kapolri.

### 4.3 Perilaku Aktor

Hubungan antara perilaku aktor dengan insentif maupun disinsentif itu dapat diilustrasikan dengan bagan sebagai berikut:



Bagan tersebut menunjukkan bahwa perilaku aktor sangat ditentukan oleh bagaimana kondisi insentif dan disinsentif itu. Komunikasi yang baik-dalam hal ini tanpa muatan kebencian berbasis politik identitas-sangat ditentukan dari perpaduan insentif dan disinsentif tersebut. Dalam kasus ini, insentif lebih cenderung mengarahkan pada komunikasi yang bebas tanpa batasan elemen formal dan elemen non formal. Dengan insentif tersebut, aktor cenderung mengejar kepentingannya sendiri atas nama kebebasan dan kompetisi yang bebas. Selain itu, insentif yang berupa kemajuan teknologi mengarahkan pada kreasi dan distribusi wacana, opini, berita dan gagasan yang bebas sesuai keinginan individu tanpa batasan tradisional yang ketat. Sebaliknya, disinsentif cenderung mengarahkan pola komunikasi yang memperhatikan batasan-batasan tradisional yang lebih sesuai untuk pengaturan komunikasi tanpa muatan kebencian berbasis politik identitas.

Data menunjukkan bahwa sampai saat ini perilaku komunikasi dengan muatan kebencian berbasis politik identitas masih sering dilakukan. Meskipun demikian, diklaim oleh Polri jumlahnya telah menurun hingga 30% pada awal tahun 2017. Dengan memakai bagan di atas dapat dilihat bahwa hal itu merupakan hasil dari menguatnya disinsentif yang diberlakukan oleh negara dengan aparat-aparatnya.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan perubahan kerangka institusi penanganan muatan kebencian berbasis politik identitas di internet:

#### a. sebelum tahun 2016

Disinsentif	Ada/belum	Penegakan (enforcement)
Pasal 335 ayat (1) UU KUHP	Sudah	Belum masif
UU No. 40 Tahun 2008	Sudah ada	Belum massif
UU ITE	Sudah ada	Belum masif
Surat Edaran (SE) No. 6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian	Baru ada tahun 2015	Tahap sosialisasi
Identitas tunggal	Belum ada	-
Fatwa MUI tentang larangan hoax, fitnah dan kebencian	Belum ada (baru ada pada pertengahan 2016)	-
Nilai-nilai social dan kebangsaan	Sudah ada	Melemah



b. tahun 2016 dan 2017

Disinsentif	Ada/belum	Penegakan (enforcement)
Pasal 335 ayat (1) UU KUHP	Sudah	Massif
UU No. 40 Tahun 2008	Sudah ada	Sosialisasi gencar
UU ITE	Sudah ada	Massif
Identitas tunggal	Baru dimulai	-
Fatwa MUI tentang larangan hoax, fitnah dan kebencian	Ada	Kurang sosialisasi, cenderung diabaikan
Nilai-nilai social dan kebangsaan	Sudah ada	Melemah

Dilihat dari dua tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa masalahnya ada pada penegakan (*enforcement*). Secara teknis, *enforcement* elemen formal itu dijalankan melalui beberapa tahapan, yaitu sosialisasi, dan penegakan hukum (*enforcement*). Sosialisasi dilakukan baik dalam aspek formal maupun informal. Aspek formal dilakukan untuk mendorong literasi dan kepatuhan hukum dalam berkomunikasi di internet. Sedangkan sosialisasi elemen informal dilakukan untuk membentuk nilai khususnya dalam berkomunikasi dan umumnya dalam kehidupan bernegara. Sosialisasi dalam hal ini adalah sosialisasi nilai-nilai keberagaman yang dilakukan baik dengan cara langsung (*offline*) maupun di dunia maya (*online*). Sosialisasi berupa kampanye keberagaman sangat massif setelah terjadi berbagai demo terhadap Ahok pada tahun 2016.

Fungsi *enforcement* dilakukan baik melalui teguran, pemblokiran hingga pemidanaan. Hal ini diterapkan baik

kepada situs/web, akun maupun pada penyedia platform komunikasi seperti aplikasi *Telegram*. Dalam melaksanakan fungsi ini partisipasi masyarakat dibuka, khususnya dalam hal pengaduan konten. Untuk muatan SARA sendiri, pada Bulan Januari 2017 saja jumlah aduan mencapai 5.142 (Islami, 2017)

Untuk mencapai maksud pembentukan kerangka kelembagaan dalam penanganan muatan kebencian itu pemerintah bukan hanya melibatkan institusi meso dari internal lembaga negara/pemerintah saja, tetapi juga *civil society*. Pemerintah misalnya mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai mitra. MUI kemudian mengeluarkan fatwa (himbauan) haram untuk perilaku pembuatan dan penyebaran (Waluyo, 2017). Selain MUI lembaga agama yang juga didorong perannya adalah Nahdlatul Ulama, GP Ansor dan juga dari kalangan agama selain Islam.

Namun penegakan elemen formal dan non formal itu belum dilakukan secara massif dan integrative sebelum tahun 2016. *Enforcement* masih berjalan secara reaktif dan kerangka yang mapan belum diadopsi. Hal ini menyebabkan aktor merasa tidak punya kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Akhirnya, sebagaimana dikatakan oleh NIES, aktor cenderung untuk mengambil tindakan dari yang ditetapkan institusi (*decoupling*).

Dari berbagai penelitian yang kemudian dilihat dalam kasus Indonesia, nampaknya karakter inklusifitas komunikasi di dunia internet bisa berdampak ganda bagi masyarakat. Untuk konteks kasus ini, sifat inklusifitas pembuatan berita dan opini di internet mengakibatkan kurangnya kontrol institusi-institusi formal maupun non

formal serta makro maupun meso terhadap individu. Sebagaimana pada kasus media dan profesi jurnalis, terdapat petunjuk bahwa institusi resmi kehilangan sebagian otoritas untuk mengendalikan aktor di tingkat mikro. Pola ini mengikuti argumen Kenichi Ohmae tentang globalisasi dimana batasan-batasan tradisional menjadi makin kurang berarti (Ohmae, 1995).

Pada tahun 2016 penegakan mulai massif digencarkan. Hal ini terus berlanjut pada tahun 2017. Maka, tidak heran jika terjadi penurunan jumlah muatan kebencian berbasis politik identitas pada 2017. Namun, sifatnya yang masih baru, belum konsisten dan masih mencoba mencari bentuk yang mapan diperkirakan akan memungkinkan titik balik pada tahun 2018 dan 2019. Selain itu, elemen non formal baik nilai sosial maupun kebangsaan nampak belum menunjukkan penguatan yang signifikan.

Langkah pemerintah untuk memberlakukan identitas tunggal patut diapresiasi karena akan menyelaraskan identitas dunia maya dan identitas riil. Usaha-usaha lain yang harus diperkuat adalah sosialisasi nilai-nilai sosial dan kebangsaan. Perhatian khusus patut diperhatikan pada penguatan sosialisasi berbasis nilai agama. Hal ini didasarkan pada survey Gallup yang menyatakan bahwa Indonesia ada di antara 8 negara yang warganya mendukung superioritas agama (Wadrianto, 2017).

## 5. Kesimpulan

Ditemukan paradox dalam penelitian ini. Inklusifitas di dunia maya berdampak negatif dalam mewujudkan demokratisasi dan komunikasi yang interaktif namun juga berpotensi untuk menjadi sarana

pelanggaran hukum dan norma sosial. Inklusifitas mengakibatkan melunturnya kendali institusi makro, meso maupun mikro atas aktor. Hal ini membuat aktor tidak lagi bisa selalu diharapkan untuk menghasilkan pola komunikasi yang sehat, khususnya komunikasi yang tidak bermuatan kebencian berbasis politik identitas.

Secara umum pemerintah Indonesia dalam perspektif kelembagaan baru sudah melakukan langkah yang tepat. Pemerintah Indonesia berusaha memperkuat kendali institusi atas perilaku aktor baik dengan membangkitkan kembali (reinforce) elemen formal maupun informal. Upaya pemerintah untuk menyelaraskan identitas dunia maya dengan identitas riil dunia nyata juga merupakan langkah yang tepat.

Bahwa langkah-langkah itu belum menghasilkan keluaran yang optimal dalam mengeliminasi muatan kebencian berdasar politik identitas dapat diduga merupakan hasil dari dua hal: pertama, langkah-langkah pemerintah itu belum efektif karena sinergi antar internal pemerintah maupun dengan institusi meso di luar pemerintah belum sepenuhnya terbangun; kedua, diperlukan lebih banyak waktu lagi untuk menginternalisasi nilai dan norma menjadi kebiasaan dan budaya; Ketiga, terdapat faktor oposan dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah. Faktor oposan yang dimaksud adalah kemajuan teknologi informasi itu sendiri yang mengakibatkan berbagai inovasi yang memungkinkan kembali tidak efektifnya kerangka institusi yang dibangun. Tingkat inovasi berbasis teknologi inovasi berkembang cepat sedangkan adaptasi sistem dan birokrasi pemerintahan dalam menangani hal itu lebih terbatas geraknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anil Hira and Ron Hira. (Apr., 2000). The New Institutionalism: Contradictory Notions of Change . *The American Journal of Economics and Sociology*, Vol. 59, No. 2 , pp.267-282.
- Baswedan, A. R. ( 2004, September/October). Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory. *Asian Survey Vol. 44 No. 5* , pp. 669-690.
- BPS. (2015, April 11). Retrieved November 6, 2017, from <https://www.bps.go.id/KegiatanLain/view/id/127>
- Clay, P. I. ( 2000. 26). The Choice Within Constraints: New Institutionalism and Its Impact for Sociology. *Annu. Rev. Sociol.* , 525–46.
- Geertz, C. (1976). *Religions of Java*. Chicago: Chicago Unifrsity Press.
- Islami, N. (2017). <https://kominfo.go.id>. Retrieved November 6, 2017, from Kemkominfo Rilis Aduan Konten untuk Tampung Laporan Masyarakat Terkait Hoaks: [https://kominfo.go.id/content/detail/10335/kemkominfo-rilis-aduan-konten-untuk-tampung-laporan-masyarakat-terkait-hoaks/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/10335/kemkominfo-rilis-aduan-konten-untuk-tampung-laporan-masyarakat-terkait-hoaks/0/sorotan_media)
- JP, R. P. (2017, August 28). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170826121903-20-237431/paslon-penyebar-kebencian-di-pemilu-bisa-didiskualifikasi/>. Retrieved November 6, 2017, from <https://www.cnnindonesia.com>: <https://www.cnnindonesia.com>
- Nee, V. (2005). The New Institutionalism in Economics and Sociology. *CSES Working Paper Series* , 1-72.
- Nee, V. (2003). *The New Institutionalism in Economics and Sociology. Forthcoming: Handbook for Economic Sociology*, eds. Princeton: Princeton Unifrsity Press.
- Somantri, G. R. (Desember 2005). MEMAHAMI METODE KUALITATIF. *Jurnal Makara* , 57-65.
- Somantri, R. G. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. *Jurnal Makara* , 57-65.
- Wadrianto, G. K. (2017, April 2016). Retrieved November 6, 2017, from <http://internasional.kompas.com/read/2017/06/02/20485791/survei.dunia.soal.superioritas.agama.ada.di.mana.indonesia>.
- Waluyo, A. (2017, June 6). <https://www.voaindonesia.com/a/mui-terbitkan-fatwa-penggunaan-medsos-untuk-cegah-penyebaran-ujaran-kebencian/3888880.html>. Retrieved November 6, 2017, from <https://www.voaindonesia.com>: <https://www.voaindonesia.com/a/mui-terbitkan-fatwa-penggunaan-medsos-untuk-cegah-penyebaran-ujaran-kebencian/3888880.html>



## **PEMILU DAN KENISCAYAAN POLITIK IDENTITAS ETNIS DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN TEORITIS**

**Rendy Adiwilaga**

*Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Bale Bandung, Indonesia,  
rendyadiwilaga@gmail.com*

**M. Ridha TR**

*Peneliti Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Indonesia,  
m.ridhotaufik@gmail.com*

**Mustabsyirotul Ummah Mustofa**

*Program Studi Ilmu Politik, FISIP Universitas Padjadjaran, Indonesia,  
mustabs.mails@gmail.com*

---

### **ABSTRACT**

*The emergence of Political identity in a State is one of the logical consequences of the application of democratic understanding. This identity politics, formed as a manifestation of the interaction that occurs between the values of democracy that become mainstream with local values or other values that have been formed as a social structure in society. In Indonesia itself, the issues of identity politics have sprung up. Ethnicity is a base that often underlies the emergence of identity politics in Indonesia. This is certainly not surprising because Indonesia is a country that has ethnic and cultural diversity that has value, views, identification, and wisdom respectively. Ethnicity-based identity politics becomes very important, to avoid excessive expression of political identity that can threaten the integrity of the Indonesian nation. In this paper, we will discuss how to look at identity politics in political contexts through democratic electoral mechanisms that are not based on the oppression*

*or marginalization of ethnic society so as to compete for power through electoral mechanism, but rather to consciousness to contribute ideas and ideas for the nation based on local values to be an answer and solution to the nation's problems.*

**Keywords**

*political identity, election, democracy*

---

**ABSTRAK**

*Kemunculan Politik identitas dalam sebuah Negara merupakan salah satu konsekuensi logis dari diterapkannya paham demokrasi di Negara tersebut. Politik identitas ini, terbentuk sebagai wujud dari interaksi yang terjadi antara nilai-nilai demokrasi yang menjadi mainstream dengan nilai-nilai lokal atau nilai-nilai lain yang sudah terbentuk sebagai sebuah struktur sosial di masyarakat. Di Indonesia sendiri, isu-isu mengenai politik identitas sudah banyak bermunculan. Etnisitas merupakan basis yang sering mendasari munculnya politik identitas di Indonesia. Hal ini tentunya bukan merupakan sesuatu yang mengejutkan karena Indonesia merupakan Negara yang memiliki keragaman etnis dan budaya yang memiliki nilai, pandangan, identifikasi, dan kearifannya masing-masing. politik identitas berbasis etnisitas menjadi sangat penting, untuk menghindari ekspresi politik identitas yang berlebihan yang dapat mengancam integritas bangsa Indonesia. Dalam tulisan ini, akan dibahas mengenai bagaimana memandang politik identitas dalam kontestasi politik melalui mekanisme pemilu yang demokratis yang bukan didasari pada ketertindasan atau marginalisasi masyarakat etnis sehingga berlomba-lomba memperoleh kekuasaan melalui mekanisme pemilu, tetapi lebih kepada kesadaran untuk menyumbang ide dan pemikiran untuk bangsa, yang didasarkan pada nilai-nilai lokal untuk menjadi sebuah jawaban dan solusi atas permasalahan bangsa.*

**Kata Kunci**

Politik Identitas, pemilu, demokrasi

---

## 1. Pendahuluan

Runtuhnya rezim otoriter orde baru untuk kemudian digantikan oleh munculnya gerakan reformasi yang menjunjung tinggi demokrasi, menimbulkan banyak eksek dalam segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, baik itu aspek sosial, budaya, ekonomi, hingga tentunya politik. Salah satu eksek dari sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah munculnya fenomena politik identitas. Semua entitas yang ada di Indonesia berusaha untuk mengekspresikan preferensi politik, yang didasarkan pada identitas yang melekat pada dirinya, baik itu identitas agama, identitas etnis, dan sebagainya.

Namun dewasa ini, ada satu isu yang menjadi perhatian dan permasalahan bersama yakni, isu kepemimpinan sebagai eksek dari pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung. Kepemimpinan dianggap menjadi akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya berbagai masalah di negeri ini. Meledaknya fenomena Jokowi, meskipun dengan berbagai kontroversi pro dan kontranya, cukup untuk membuktikan bahwa isu kepemimpinan nasional sudah menjadi salah satu isu bersama yang sangat menarik perhatian masyarakat. Pada akhirnya, untuk menjawab permasalahan isu kepemimpinan ini, setiap identitas politik berusaha untuk memunculkan konsep kepemimpinan berdasarkan pada identitasnya tersebut. Kajian-kajian yang berfokus kepada politik identitas yang berbasis etnis ini sudah cukup banyak. Namun, kajian-kajian sebelumnya lebih banyak melihat dari sisi ancaman politik identitas etnis ini terhadap keberlangsungan demokrasi. Politik identitas etnis dapat menyebabkan

masyarakat menjadi terpecah belah dan mengarahkan Negara pada keadaan *failed state* yang tentunya sangat tidak diharapkan.

Salah satu tulisan yang mengkaji mengenai politik identitas etnis tersebut adalah tulisan Donald L. Horowitz (1993) yang berjudul *Democracy in Divided Societies*. Dalam tulisannya ini Horowitz melihat perkembangan di beberapa Negara di Asia, Afrika, Eropa Timur, dan Negara-negara pecahan Uni Soviet dimana kegagalan demokrasi di Negara-negara tersebut lebih banyak disebabkan oleh adanya konflik etnis. Demokrasi menurut Horowitz, akan selalu berbicara mengenai inklusi dan eksklusivitas, mengenai akses pada kekuasaan, serta mengenai keistimewaan yang datang bersama inklusi, dan konsekuensi hukuman yang datang bersama eksklusivitas. Dalam Negara-negara yang didalamnya terdapat konflik berbasis etnis, identitas etnis menjadi sebuah garis pembatas yang jelas untuk menentukan *who will be included and who will be excluded* (Horowitz, 1993).

Pemaknaan inklusi dan eksklusivitas ini dipengaruhi dan didasarkan benar-benar kepada identitas etnis. Pemerintah yang berkuasa akan menyingkirkan kelompok-kelompok lain yang berbeda secara etnis dengan dirinya, dan etnis yang berbeda dari pemerintah yang berkuasa itu akan selalu menjadi oposisi, bukan didasarkan pada perbedaan ideologi, pemikiran, atau konsep tentang bagaimana mencapai sebuah tatanan yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat agar masyarakat dapat sejahtera. Kesimpulan dari tulisan Horowitz ini adalah bahwa ekspresi politik identitas etnis yang terlalu ekstrim dan tanpa memandang nilai-nilai

penting multikulturalisme akan membuat demokrasi tidak berjalan. Politik identitas ini pada akhirnya akan menciptakan konflik antar etnis yang menyebabkan masyarakat menjadi terpecah belah dan membawa negara pada kondisi *failed state* yang disebabkan oleh etnis yang berkuasa akan selalu berusaha agar kekuasaan dan sumber daya yang ada, mengalir untuk kelompok etnisnya, bukan berusaha untuk mewujudkan yang terbaik bagi masyarakatnya.

Selain tulisan Horowitz, tulisan lain yang mengkaji politik identitas etnis adalah buku yang berjudul *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan* yang ditulis oleh Yekti Maunati. Dalam tulisannya, Maunati melihat politik identitas masyarakat Dayak yang mulai muncul sejak runtuhnya orde baru dan meletusnya konflik etnis yang terjadi di Kalimantan. Menurut Maunati, konflik tersebut merupakan eksekusi dari adanya marginalisasi secara ekonomi dan politik terhadap etnis Dayak yang telah lama dilakukan oleh pemerintahan orde baru. Disisi lain, ekspansi etnis Madura sebagai pendatang dirasakan mengganggu kehormatan etnis Dayak sebagai masyarakat asli Kalimantan. Kemudian dengan mengutip pernyataan Eriksen (1993), Maunati berargumentasi bahwa politik identitas etnis akan bangkit ketika kelompok atau etnis itu terancam.

Kedua tulisan diatas meskipun memiliki lokus dan fokus yang berbeda, namun memiliki kesamaan perspektif dalam melihat politik identitas etnis di sebuah negara. Keduanya melihat bahwa kemunculan politik identitas berawal dari konflik etnis yang dapat menyebabkan masyarakat yang terpecah belah. Politik identitas muncul akibat adanya sebuah

dominasi yang dilakukan oleh satu etnis terhadap etnis lain yang menyebabkan perlawanan dan resistensi dari etnis yang merasa ditindas. Kemunculannya, pada akhirnya dapat menjadi hambatan bagi demokrasi yang bercita-cita mengenai adanya heterogenitas dan kemajemukan masyarakat yang dapat mengartikulasikan kepentingannya melalui ekspresi yang demokratis.

Namun kedua tulisan tersebut, tidak menyinggung bagaimana politik identitas etnis yang muncul bukan karena adanya konflik etnis yang mendasarinya. Maka dari itu, berbeda dengan kajian-kajian diatas, dalam kajian ini penulis melihat politik identitas dapat muncul dari kesadaran bahwa ada permasalahan bangsa yang dianggap dapat diselesaikan dengan menerapkan nilai-nilai yang berasal dari kearifan lokal budaya, dimana nilai-nilai tersebut bersifat universal dan dapat diterapkan tanpa mengakibatkan konflik etnis yang berujung pada terjerumusnya Indonesia kedalam kondisi-kondisi yang menjadi ciri dari *failed state*.

## 2. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan studi literatur sebagai metode dengan pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan berbagai sumber bacaan mengenai politik identitas baik yang merupakan sumber primer maupun sumber sekunder sebagai pendukung sumber utama.

Dalam kajian ini penulis menelaah konsep-konsep politik identitas yang kemudian dielaborasi dengan fakta-fakta kontemporer, yang pada akhirnya menghantarkan penulis kepada suatu pemikiran yang argumentatif dalam memilah fakta dan konsep yang menampakkannya yang berkaitan



dengan politik identitas sebagai sebuah keniscayaan yang tidak bisa dinafikan melekat dalam demokrasi dan hadir dalam pemilu di Indonesia.

### 3. Perspektif Teori

Menurut Anthony Giddens, identitas diri dipahami dengan keahlian menarasikan tentang diri, dengan demikian menceritakan perasaan yang konsisten tentang kontinuitas biografi. Cerita identitas berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis: Apa yang dikerjakan? Bagaimana melakukannya? Siapa yang menjadi? Seseorang berusaha mengkonstruksi cerita identitas yang saling bertalian di mana diri membentuk lintasan perkembangan dari pengalaman masa lalu menuju masa depan (Giddens, 1991). Identitas maupun etnisitas diciptakan oleh proses sejarah yang menggabungkan kelompok-kelompok sosial yang berbeda ke dalam suatu struktur politik yang tunggal di bawah kondisi-kondisi sosial tertentu (Schultz, Emily and Lavenda, 2001). Giddens menegaskan bahwa etnisitas itu selalu berpusat pada identitas individu dan kelompok. Pentingnya identitas ini bagi sebuah kelompok etnik, menurut Giddens lagi, dikarenakan "*It can provide an important thread of continuity with past and is often kept alive through the practice of cultural traditions*" (Giddens, 1991).

Sebuah identitas tentunya tidak terbentuk begitu saja tanpa melewati berbagai proses. Menurut Jan E. Stets and Peter J. Burke mengemukakan bahwa Identitas dapat terbentuk melalui proses kategorisasi dan identifikasi diri, dimana proses tersebut adalah proses merefleksikan diri menjadi sebuah

objek yang dapat mengkategorikan, mengklasifikasikan, atau menamai dirinya dalam cara-cara tertentu dalam kaitannya dengan kategori atau klasifikasi sosial lainnya (Stets and Burke, 2000). Stets dan Burke kemudian menambahkan bahwa konsekuensi dari kategorisasi diri ini adalah adanya penekanan dari kesamaan persepsi antara diri dan anggota lain di dalam kelompok, dan adanya penekanan terhadap perbedaan persepsi antara diri dan orang lain diluar kelompok. Penekanan atas kesamaan dan perbedaan ini dilakukan berdasarkan pada semua sikap, keyakinan dan nilai-nilai, reaksi afektif, norma perilaku, gaya berbicara, dan properti lainnya yang diyakini berkorelasi dengan kategorisasi kelompok yang relevan.

Seperti yang dikatakan lebih lanjut oleh Stets dan Burke, bahwa sebuah identitas sosial yang menonjol adalah identitas yang berfungsi secara psikologis untuk meningkatkan pengaruh keanggotaan seseorang dalam kelompok itu pada persepsi dan perilaku. Untuk membuat identitas itu menonjol, diperlukan adanya komitmen dari para anggota kelompok tersebut. Komitmen ini memiliki dua aspek, yakni, *pertama* adalah kuantitatif-jumlah orang kepada siapa yang diikat melalui identitas. Semakin banyak orang yang terikat dengan memegang identitas (yaitu, semakin besar melekatnya identitas dalam struktur sosial), semakin besar kemungkinan adalah bahwa identitas akan diaktifkan dalam suatu situasi. Singkatnya, semakin kuat komitmen, semakin besar ciri khas tersebut; *Kedua* dari komitmen adalah kualitatif, yakni kekuatan relatif atau kedalaman hubungan dengan orang lain. Hubungan yang lebih kuat kepada

orang lain melalui memimpin identitas ke identitas lebih menonjol (Stets and Burke, 2000).

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1. Politik Identitas dalam Negara Demokrasi

Politik identitas dalam sebuah Negara demokrasi merupakan sebuah keniscayaan. Kemunculannya merupakan salah satu konsekuensi logis dari diterapkannya paham demokrasi dalam sebuah Negara, dimana salah satu asas demokrasi yang paling penting adalah pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang dijunjung tinggi oleh Negara. Hak-hak dasar tersebut diantaranya adalah *freedom of expression* yang menjamin setiap individu untuk menentukan preferensi politiknya, tentang suatu masalah, terutama yang menyangkut dirinya dan masyarakat di sekitarnya. *Freedom of expression* ini yang menjadi dasar bagi beberapa individu yang merasa memiliki kesamaan baik secara pemikiran, ideologi, dan identifikasi tertentu untuk sepakat membentuk sebuah identitas dengan tujuan mengartikulasikan kepentingan yang didasarkan pada identitas tersebut.

Politik identitas ini, terbentuk sebagai wujud dari interaksi yang terjadi antara nilai-nilai demokrasi yang menjadi *mainstream* dengan nilai-nilai lokal atau nilai-nilai lain yang sudah terbentuk sebagai sebuah struktur sosial di masyarakat. Persinggungan diantara nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai lokal yang sudah ada di masyarakat, serta ditambah kesadaran masyarakat sebagai sebuah entitas dalam demokrasi yang perlu dijunjung tinggi hak-hak dasarnya, membuat politik identitas

tumbuh subur dan berkembang secara pesat dan menjadi bagian dari proses perkembangan demokrasi itu sendiri.

Namun, kemunculan politik identitas ini banyak mendapat sorotan dan pandangan dari banyak ilmuwan sosial. Hal ini dikarenakan, munculnya kekhawatiran dari para ilmuwan sosial bahwa politik identitas akan menjadi sebuah tantangan dan hambatan bagi demokrasi karena dianggap dapat membuat masyarakat menjadi terpecah belah dan terpolarisasi berdasarkan identifikasi identitasnya masing-masing, sehingga dapat secara langsung mengancam nasionalisme dan pluralisme sebuah Negara. Namun demikian, tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa politik identitas ini tidak akan mengancam nasionalisme dan pluralisme sebuah negara, jika para ilmuwan politik mencarikannya sebuah konsep agar menjadi cara sehingga politik identitas tidak menjadi sandungan bagi demokrasi itu sendiri.

Kajian mengenai politik identitas ini mulai menarik perhatian para ilmuwan sosial pada 1970-an, bermula di Amerika Serikat. Ketika itu pemerintah AS menghadapi masalah minoritas, jender, feminisme, ras, etnisitas, dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang merasa terpinggirkan, merasa teraniaya. Kemudian, didasarkan pada kesamaan-kesamaan tersebut, mereka mencoba untuk menuntut hak-haknya agar dipenuhi oleh negara. Dalam perkembangan selanjutnya cakupan politik identitas ini meluas kepada masalah agama, kepercayaan, dan ikatan-ikatan kultural yang beragam, hingga kepentingan-kepentingan lain yang diartikulasikan sebagai identitas diri dan kelompoknya. Kemunculan

politik identitas ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah adanya perlakuan yang tidak adil terhadap kaum minoritas dan ingin diberlakukannya prinsip persamaan (*equality*) dalam masyarakat luas. Kemudian, selain itu, politik identitas ini muncul karena adanya kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau negara.

Di Indonesia sendiri, isu-isu mengenai politik identitas sudah banyak bermunculan. Disini politik identitas lebih terkait dengan masalah etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili pada umumnya oleh para elit dengan artikulasinya masing-masing. Bahkan politik identitas banyak menjadi hal yang mendasari sebuah gerakan untuk menekan pemerintah agar dapat memenuhi tuntutan-tuntutan yang menjadi kepentingan identitasnya. Kita bisa melihat bagaimana kelompok-kelompok yang merupakan wujud politik identitas berbasis agama seperti Hizbuttahrir Indonesia, yang dengan konsep Daulah Khilafiah-nya mencoba untuk mengubah Indonesia menjadi Negara dengan sistem khilafah. Atau Front Pembela Islam yang teridentifikasi sebagai bentuk radikalisme islam, melakukan segala cara bahkan hingga melakukan kekerasan untuk menegakkan syariat islam. Politik identitas berbasis agama ini yang banyak dipandang sebagai ancaman bagi pluralitas dan integrasi bangsa Indonesia.

Selain politik identitas yang berbasis agama, etnisitas juga merupakan basis yang sering mendasari munculnya politik identitas di Indonesia. Hal ini tentunya bukan merupakan sesuatu yang mengejutkan karena Indonesia merupakan

Negara yang memiliki keragaman etnis dan budaya yang memiliki nilai, pandangan, identifikasi, dan kearifannya masing-masing. Setiap etnis ini tentunya juga memiliki cara yang berbeda dalam beradaptasi dan berinteraksi dengan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia untuk tetap menjaga eksistensi etnis dan kebudayaannya. Ada yang mengekspresikan identitas etnisnya namun tetap berusaha untuk berada dalam jalur nasionalisme ke-Indonesia-an, ada pula yang dengan ekstrim berekspresi untuk menunjukkan perbedaannya dan ingin melepaskan diri dari kesatuan dan integrasi bangsa Indonesia. Ungkapan-ungkapan seperti “Presiden Indonesia haruslah orang Jawa”, “sudah saatnya kepemimpinan sunda muncul menjadi presiden” menjadi contoh ekspresi politik identitas berbasis etnis namun masih dalam kapasitas etnisnya sebagai bagian dari integritas bangsa. Berbeda halnya dengan gerakan separatis seperti OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Papua atau GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Aceh yang menyatakan bahwa mereka bukanlah bagian dari Indonesia maka dari itu harus memisahkan diri dari Indonesia dan mendirikan Negara sendiri.

Hal ini tentunya membuat kajian mengenai politik identitas berbasis etnisitas menjadi sangat penting, untuk menghindari ekspresi politik identitas yang berlebihan yang dapat mengancam integritas bangsa Indonesia, tetapi lebih lanjut mengarahkan politik identitas ini sebagai ekspresi yang dapat membantu Indonesia dalam perjalanannya menuju demokrasi yang dapat mengadaptasi kearifan-kearifan lokal yang ada di Indonesia dan mengakomodasi semua kepentingannya.

## 4.2 Etnis Sebagai Basis Politik Identitas

Politik identitas pada hakikatnya merupakan sebuah fenomena menarik pasca usainya perang dunia II, yang juga mengawali kebangkitan perang dingin hingga usainya pada akhir dekade 90-an. Hal ini menarik mengingat politik identitas menjadi “senjata” tersendiri bagi kaum minoritas dalam memperjuangkan hak-hak dasarnya. Hal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Kauffman, Menurut Kauffman (dalam Maarif, 2012) politik identitas diawali dari adanya kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa tersingkir oleh dominasi kelompok lainnya di dalam sebuah bangsa atau negara. Politik identitas, yang muncul pada 1970-an di Amerika Serikat, banyak berbicara mengenai isu gender, feminisme, ras, etnisitas, dan kelompok sosial lainnya yang merasa terpinggirkan dan teraniaya.

Jauh sebelum fenomena perang dingin dan kebangkitan budaya pop, praktek politik identitas sejatinya telah berlangsung dari masa ke masa. Perlawanan terhadap kolonialisme di berbagai negara Asia juga diawali melalui semangat etnisitas dan kelompok minoritas. Hanya memang politik identitas tersebut baru terkonsepsi secara terminologis pasca lahirnya pemikir-pemikir ulung seperti halnya Antonio Gramsci, Gayatri C. Spivak, dan sarjana lainnya yang memodifikasi politik identitas dengan mengikuti perkembangan zaman.

Agnes Heller (Ubed Abdillah, 2002: 22) memiliki pandangan yang lebih spesifik mengenai politik identitas itu sendiri. Heller menilai bahwa politik identitas adalah strategi politik yang memfokuskan pada pembedaan sebagai kategori utamanya. Menurutnya politik

identitas dapat memunculkan toleransi dan kebebasan, namun di lain pihak, politik identitas juga akan memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan, dan pertentangan etnis.

Melengkapi perspektif sebelumnya, Kemala Chandrakirana (1989) dalam artikelnya “*Geertz dan Masalah Kesukuan*” menuturkan bahwa politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi “orang asli” yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi “orang pendatang” yang harus melepaskan kekuasaan. Jadi, singkatnya politik identitas sekedar untuk dijadikan alat untuk menggalang politik guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya. Pendapat tersebut juga sekaligus mengelaborasi kemungkinan kedua yang dikemukakan oleh Heller perihal pola intoleransi maupun pertentangan etnis.

Praktik-praktik perebutan kekuasaan oleh kaum minoritas yang terlembagakan dapat dilihat dari bagaimana Louis Farrakhan dengan The Nation of Islam-nya di Amerika Serikat, Martin Luther King dan Malcolm X dengan gerakan kulit hitamnya yang juga berbasis di Amerika Serikat, serta bagaimana negara-negara pecahan Uni Soviet dengan identitasnya masing-masing berhasil memerdekakan diri. Bentuk paling ekstrim dari politik identitas, yakni separatisme, juga dapat dilihat dari bagaimana wilayah Quebec (berbahasa dan berbudaya Prancis) yang ingin merdeka dari Kanada (berbahasa Inggris), serta dewasa ini wilayah Catalunya yang ingin memisahkan diri dari Kerajaan Spanyol.

“Medan perang” yang legal bagi para pelaku politik identitas sendiri

merujuk pada representasi demokrasi yakni pemilihan umum maupun jajak pendapat. Catalunya sendiri telah berhasil mendorong ke arah tersebut walaupun hambatan teknis dan besar masih melanda, khususnya dari kerajaan Spanyol dan Negara-negara Uni Eropa. Dalam skrup yang lebih kecil, fenomena politik identitas di Indonesia juga pernah mengemuka baik masa pra kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Kebanyakan dari aktor tersebut berasal dari identitas kekuatan agama, kekuatan ideologi politik, dan kekuatan etnis.

Kekuatan agama sebagai wujud politik identitas di Indonesia diwarnai oleh corak-corak menarik yang diberikan oleh Sarikat Islam pada masa prakemerdekaan. Transformasi kekuatan kelompok Islam kemudian dilanjut oleh dua kutub kekuatan. Yang pertama ialah kekuatan moderat yang diprakarsai pimpinan Masyumi dalam Majelis Konstituante (1956-1959) dan kekuatan radikal yang diwakili oleh Darul Islam pimpinan S.M Kartosoewirjo yang kemudian berhasil ditumpas oleh pemerintahan Soekarno. Estafet kekuatan Islam dalam kontestasi politik kemudian mengendur dibawah kepemimpinan rezim Soeharto, hingga kemudian babak baru kekuatan Islam politik sebagai syariat negara mengemuka kembali pasca masuknya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan berdirinya Front Pembela Islam (FPI) serta Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai wujud baru gerakan tarbiyah yang mendamba lahirnya negara syariah juga muncul sebagai poros kekuatan baru Islam yang moderat dan bersedia mengikuti mekanisme demokrasi.

Kekuatan ideologi politik pun tak kalah sengit. Dalam percaturan politik Indonesia, beberapa ideologi mulai dari yang diimpor langsung dari luar seperti sosialisme, komunisme, dan nasionalisme, hingga ideologi lama seperti tradisionalisme Jawa, cukup memberikan situasi dinamis dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Komunisme, yang notabennya merupakan ideologi terlarang dewasa ini, bahkan sempat menjadi panglima pada periode 1959-1965 (Mortimer, 2006: 1) dimana kader-kadernya berhasil mengisi pos strategis di pemerintahan pusat bahkan pemerintahan desa. Dinamika tersebut, lagi-lagi mengendur dibawah kepemimpinan Soeharto karena adanya upaya generalisasi ideologi yang mengacu pada Pancasila versi pemerintah.

Terakhir ialah kekuatan etnis. Kekuatan etnis sendiri bukan lah barang aneh jika kita menilik pada keragaman budaya dan suku yang terdapat di Indonesia. Beberapa perang kemerdekaan, seperti halnya perang Aceh dan Pemberontakan Nuku menggambarkan bahwa identitas etnis pernah menjadi kekuatan positif yang mampu memberikan perlawanan besar terhadap kolonialisme. Pasca kemerdekaan, praktik-praktik politik identitas dalam bentuk ekstrim (separatisme) lahir akibat ketidakpuasan daerah terhadap pemerintahan muda Soekarno. Sebut saja Republik Maluku Selatan (RMS), dan periode selanjutnya dilanjut oleh lahirnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM), serta Gerakan Papua Merdeka (GPM). Rekonsiliasi di wilayah Aceh bahkan melahirkan wajah menarik dalam kontestasi politik dimana pada prosesnya kemudian, banyak partai-partai lokal Aceh yang mengikuti Pemilihan Umum.

Kemudian dalam skop yang lebih mikro, politik identitas di Indonesia juga tidak bisa dipisahkan dari fenomena *local strongmen* khususnya di daerah-daerah. Penulis tidak menarik jauh pada masa feodalisme karena pada masa ini, kekuasaan di daerah dikuasai oleh hukum adat tradisional yang bersifat totaliter dengan mencitrakan masyarakat sebagai “hamba” (Agustino, 2014), namun penulis mencoba merujuk pada periodisasi kedatangan kolonial, dimana pada masa-masa tersebut, *local strongmen* memiliki citra positif akibat adanya pembelaan terhadap kepentingan rakyat yang tertindas. Sayangnya, pasca kemerdekaan, terlebih pada masa kepemimpinan Soeharto, *local strongmen* dibentuk sebagai kepanjangan tangan pusat, dan bahkan cenderung menjadi kekuatan baru daerah yang sejatinya menjadi pengejawantahan pusat.

Agustino kemudian memaparkan bahwa *local strongmen* mengalami pergeseran peran pasca reformasi. Perbedaan haluan dari ‘politik lama’ yang tersentralisasi dan terkontrol kepada ‘politik baru’ yang lebih terdesentralisasi dan egaliter. Menurutnya:

“setelah melewati bulan madu reformasi yang sebentar, para broker politik dan *local strongmen* di level lokal mulai mengambil alih kekosongan maupun memperkuat akses kontrolnya terhadap politik lokal. Para broker dan *local strongmen* yang mengambil alih kekosongan pemain dalam arena politik lokal orde reformasi biasanya adalah ‘broker lama’ yang pada masa sebelumnya tidak mampu atau tidak mendapatkan kesempatan untuk bersaing dengan *local strongmen* sokongan rezim orde baru. Sedangkan broker dan *local strongmen*

yang berhasil menancapkan kukunya lebih dalam lagi pada era reformasi adalah ‘broker lama’ yang pada masa sebelumnya telah menjadi klien penguasa orde baru. Tetapi karena kemampuannya untuk melakukan reorganisasi kekuatan—selama masa transisi menuju demokrasi—mereka berhasil memanipulasi *state of minds* publik sehingga menempatkan orang kuat lokal menjadi semakin berkuasa dan berpengaruh di banding masa sebelumnya”

Perpaduan *local strongmen* dengan kebangkitan politik identitas di daerah, sejatinya dapat memicu fenomena-fenomena yang cukup menarik, entah bermuara ke hasil positif maupun negatif. Beberapa kasus di Indonesia di antaranya ialah perseteruan Kristen dan Muslim di Ambon serta tempat-tempat lain di Maluku, kemudian kompetisi kekuasaan di kesultanan Ternate dan Tidore yang melahirkan friksi politik yang tajam di aras lokal di Maluku Utara (Van Klinken, 2007), persaingan etnik di Kalimantan Tengah yang perlahan berkembang menjadi pertentangan dalam pemilihan umum dan Pilkada (Tansaldy, 2007), hingga perseteruan antar elit dalam rangka pembentukan daerah otonomi baru.

#### **4.3 Politik Etnis dan Upaya Mengelola Pemilu yang Demokratis**

Dalam perkembangannya, demokrasi saat ini memasuki tahap representasi politik yang tinggi. Pemilihan umum dianggap sebagai sarana partisipasi politik. Pemilihan umum atau demokrasi prosedural ini adalah pengejawantahan dari pengertian pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilu adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk

mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*) yang menurut Robert Dahl merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Lev mendeskripsikan demokrasi sebagai '*virtuous conceit*' yang berarti bahwa demokrasi adalah sistem pemilihan representatif dengan aktualisasi dan potensi partisipasi yang derajatnya cukup tinggi (Kingsbury, 2007). Demokrasi kini tidak dapat secara harfiah hadir sebagai pemerintahan oleh rakyat, rakyat harus menunjuk wakil-wakilnya untuk mengelola negara. Nilai-nilai demokrasi yang mementingkan kepentingan rakyat tentu tidak dapat begitu saja dihilangkan dalam demokrasi kekinian. Pihak yang dipilih oleh masyarakat sebagai wakilnya harus benar-benar mampu menjadi wakil dan mendapat legitimasi dari masyarakat.

Schumpeter mendefinisikan demokrasi sebagai kompetisi terbuka diantara seluruh pemimpin politik dimana peran masyarakat adalah mengalokasikan legitimasi kepada seseorang atau sekelompok orang yang akan menjadi penguasa (Kingsbury, 2007). Demokrasi sebagai sebuah model politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik dan kemampuan dalam memilih para pemimpin politik pada saat pemilihan. Menurutnya, metode demokratis adalah penataan kelembagaan untuk sampai kepada keputusan politik di mana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih suara. Demokrasi itu seperti 'pasar', satu mekanisme institusional untuk menyisihkan yang terlemah dan mendukung mereka yang paling

kompeten dalam perjuangan kompetitif untuk suara dan kekuasaan (Held, 2007).

Seperti lazimnya kontes atau kompetisi lain, dalam proses demokrasi peserta-peserta juga harus menyiapkan diri menjadi yang paling layak untuk menang. Dalam hal pemilihan umum ini, peserta pemilihan umum dituntut untuk menggunakan berbagai cara agar menjadi layak dipilih oleh masyarakat, atau paling tidak terlihat layak dipilih. Pada akhirnya pemilihan umum dimaknai sebagai proses demokrasi untuk menentukan aktor-aktor yang menduduki jabatan pemerintah yang nantinya berperan besar dalam penentuan arah pemerintahan.

Pemilu sebagai salah satu mekanisme demokrasi menjadi elemen kunci dalam demokrasi itu sendiri. Tanpa kompetisi pemilu bebas, adil dan teratur, pemerintah tidak dapat diadakan benar-benar bertanggung jawab terhadap rakyat. Pemilu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga Negara. Setidaknya ada empat fungsi pemilu yang terpenting: legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elite politik, dan pendidikan politik (Hikam, 1999). Karenanya, pemilihan umum hingga saat ini adalah salah satu sistem yang paling representatif atas berjalannya proses demokrasi, hingga ada sebuah adagium bahwa "*tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum*".

Dalam sudut pandang representasi, teori identitas sosial bisa digunakan untuk menjelaskan berhubungan antar kelompok-yaitu, bagaimana orang datang untuk melihat diri mereka sebagai anggota dari satu kelompok / kategori (*in-group*) dibandingkan dengan yang lain (*out-group*), dan konsekuensi dari

kategorisasi ini, seperti etnosentrisme (Turner et al. 1987). Identitas kultural – apakah ia dipahami dalam kaitan dengan identitas ikatan persaudaran, ras, ataupun etnik – dibangun dalam konteks yang berhadapan dengan yang lain. Oleh karenanya, batas-batas yang akhirnya menjadi diakui antar kelompok etnik adalah produk dari definisi diri secara internal dan definisi eksternal oleh yang lain. Tentunya, rasa kepemilikan kelompok dan kemampuan membedakan kelompoknya sendiri dengan kelompok yang lain, merentang jauh ke belakang dalam sejarah masa lalu (Schultz, Emily and Lavenda, 2001). Memiliki identitas sosial tertentu berarti menjadi satu dengan kelompok tertentu, menjadi seperti orang lain dalam kelompok, dan melihat sesuatu dari perspektif kelompok. Hal mengenai pembentukan identitas politik ini yang kemudian serupa dengan pelekatan identitas pemimpin populis yang selalu mengacu ‘atas nama rakyat’ yang membedakan kedudukan antara ‘Kita Vs Mereka’, dimana ‘kita’ adalah *lowest sector society* yang diperjuangkan dan ‘mereka’ adalah para elit politik yang dianggap tidak peduli dan bertanggungjawab terhadap masalah publik terutama masyarakat yang tereksklus. Identitas ini menjadi instrumen demokrasi yang membuat para aktor politik identitas berjuang untuk meraih kesetaraan politik dengan memasuki ranah politik, dimana demokrasi sejatinya juga memberi mereka kesempatan untuk tidak lagi tereksklusikan dari politik.

Politik identitas yang bersifat material dan hanya digunakan untuk memperebutkan kekuasaanlah yang mengancam kohesi sosial. Elit politik yang

terlibat dalam pemilu dapat memanipulasi identitas etnis sebagai alat memperoleh kekuasaan dan meributkan hasil pemilu. Beberapa konflik pemilu daerah yang terjadi akibat mobilisasi dukungan politik identitas untuk kepentingan elit jangka pendek. Simbolisasi ini dengan mudah kita temukan dalam slogan “*putra daerah*”, seperti yang terjadi dalam pilkada DKI Jakarta tahun 2012 dengan identitas betawi dan bukan betawi, pilgub Maluku Utara antara kelompok Tidore dan Ternate yang sampai masuk ke ranah sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (Salim, 2015). Yang menarik bahwa kebangkitan symbol “*putra daerah*” sejalan dengan kebangkitan *local strongmen* yang juga terlibat dalam kontestasi pemilu. Terutama setelah kebijakan pemilu kepala daerah langsung. Masyarakat dengan mudah digiring kepada isu-isu primordial atas nama kedaerahan dan putra daerah yang semu. Bukan kepada gagasan membangun daerah dengan kekhasan nilai-nilai lokal namun semata memperoleh kekuasaan elit *local strongmen/putra daerah* tersebut dengan modal politik identitas.

Identitas yang bersifat primordial semacam ini lah yang memang perlu diluruskan dan diwaspadai sebagai bibit konflik yang mengancam proses demokratisasi pemilu. Tidak hanya mengancam konflik komunal, tetapi juga melanggar substansi representatif pemilu karena politik identitas dimaknai hanya sebatas kendaraan politik para “elit lokal” untuk masuk ke dalam pusaran sirkulasi elit yang diproseskan lewat pemilu dengan memanipulasi dukungan kelompok etnis. Hal ini memunculkan tantangan bagi masyarakat etnis dalam mewujudkan nilai-nilai kepemimpinan berdasarkan kearifan



lokal etnisitas agar dapat diartikulasikan dalam sebuah kepemimpinan daerah maupun nasional, yang berarti masyarakat etnis harus membuat nilai-nilainya dapat pula diterima oleh identitas etnis lain yang ada di Indonesia. Tentunya untuk menghindari etnosentrisme yang justru, dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang beragam dan majemuk, akan memicu potensi konflik. Padahal dengan memberi ruang kepada politik identitas, kemungkinan memperbesar potensi partisipasi politik masyarakat daerah bisa lebih tinggi. Demokratisasi dan desentralisasi harus menjadi alasan utama meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui politik identitas. Tidak lagi ada eksklusi, inferioritas dan keterkungkungan menentukan nasib daerah, karena melalui pemilu langsung daerah, masyarakat menentukan representasinya untuk mengubah nasib dan wajah daerahnya secara sadar dan bertanggung jawab bersama.

Untuk itu, masyarakat etnis harus kembali menonjolkan bahwa nilai-nilai kepemimpinan berdasarkan kearifan lokal etnisitas yang harus dijunjung tinggi menjadi sebuah nilai yang universal bukan mengedepankan “keakuan” identitas etnis semata. Masyarakat etnis harus memiliki paham multikulturalisme, dimana multikulturalisme mengakui berbagai potensi dan legitimasi keragaman dan perbedaan sosio-kultural tiap-tiap kelompok etnis, ras, agama, dan entitas kebudayaan. Dalam pandangan ini baik sebagai individu maupun kelompok dari berbagai kesatuan sosial bisa bergabung dalam masyarakat, terlibat dalam *societal cohesion* tanpa harus kehilangan identitas kulturalnya, sekaligus tetap memperoleh hak-hak mereka untuk berpartisipasi

penuh dalam berbagai bidang kegiatan masyarakat terutama dalam pemilihan umum.

Dengan kebangkitan politik identitas etnis, Indonesia tidak kembali mundur ke era pemilih kultural namun, basis etnis ini dapat dipahami secara rasional tidak hanya sebatas kesamaan etnis atau sebatas figure aktor politik yang mewakili etnis tertentu, tapi melihat nilai politik identitas yang dibawa oleh figur calon sesuai dengan kearifan lokal identitas tersebut atau tidak. Sehingga tuduhan-tuduhan pemilih kultural, pemilih irasional tidak lagi tersemat dan terstereotipkan kepada masyarakat Indonesia yang memang memilih berdasarkan preferensi politik identitas etnis.

Politik identitas etnis harus digiring sebagai kesadaran bersama memperkaya kearifan lokal dalam mengisi konsep-konsep kepemimpinan dan pembangunan di Indonesia, bukan semata menjadi kendaraan politik para elit dengan mengatasnamakan etnisitas untuk terlibat dalam sirkulasi elit lewat mekanisme pemilu. Hal ini yang sebenarnya perlu dihindari. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan institusi politik untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan politik mengenai politik identitas yang esensial mengenai perjuangan hak dan gagasan politik. Partai politik juga tidak boleh menutup mata dan hanya menggunakan politik identitas sebagai bahan marketing saja. Tentu saja ini menjadi tugas bersama, baik dari lembaga penyelenggara pemilu, partai politik, hingga budayawan dan tokoh masyarakat di daerah.

Membumikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai dasar pijakan berpolitik dengan identitas etnis adalah sebuah hak asasi

yang melekat pada manusia. Sebuah keniscayaan demokrasi yang dilindungi dan wajib dijaga demi tercapainya kehidupan demokrasi yang lebih baik. Sehingga Indonesia bisa lebih kaya memproduksi pengetahuan melalui konsep-konsep dan gagasan lokal tentang kehidupan politik, sosial, ekonomi, pembangunan dan sebagainya yang memang lebih cocok karena hasil ekstraksi dari kebudayaan luhur bangsanya sendiri seperti halnya Pancasila. Apabila demokrasi Indonesia yang saat ini diakui adalah demokrasi Pancasila, maka menjadi kewajiban Negara, setiap etnis dan setiap suku di Indonesia dikembangkan bibit demokrasi yang terus menghidupkan Pancasila sebagai landasan politik keberagaman.

## 5. Simpulan

Kajian budaya politik yang kebanyakan menyoroti perilaku politik yang didasarkan pada etnisitas tertentu dan menganggapnya sebagai bagian dari hambatan demokratisasi, haruslah dirubah. Kita harus memandang politik identitas etnis dari sudut pandang nilai-nilai etnis yang ada di Indonesia sebagai suatu nilai yang universal dan dapat diterima dan diaplikasikan dalam pemikiran dan perilaku masyarakat Indonesia secara keseluruhan, dengan harapan dapat membawa arah demokratisasi ke arah yang lebih baik. Merenungkan kearifan lokal bukan berarti kembali ke masa lalu atau menjadi masyarakat tradisional lagi, namun mencari mutiara-mutiara para leluhur dan menjadikannya sebagai pegangan setiap langkah ke depan. Begitu pun ketika memandang sebuah

politik identitas yang berbasis etnis, bukan berarti kita kembali kepada sebuah bentuk primordialisme, tetapi bagaimana menciptakan sebuah nilai multikulturalisme yang bisa diartikulasikan secara universal. Multikulturalisme lebih sekadar dari pengakuan terhadap perbedaan, tetapi membuka ruang untuk akses dan berekspresi bagi semua elemen keanekaragaman tersebut dengan bersandar pada jati diri masing-masing, dan kemudian saling berkomunikasi tanpa harus saling mematikan satu sama lain. Pun demikian dengan kepemimpinan etnis, jika ingin diekspresikan sebagai sebuah bentuk identitas politik dan dapat diwujudkan secara nyata, adalah dengan mencirikan dirinya sebagai paham, jalan kehidupan yang universal, didasarkan bukan karena balas dendam masa lalu yang merasa tereksklusi politik nasional, tetapi sebagai wujud sumbangsih bagi demokratisasi di Indonesia agar berjalan ke arah yang sesuai dengan harapan, dengan cara berusaha mengartikulasikan nilai-nilai kearifan lokal yang diejawantahkan dalam kepemimpinan etnis baik daerah maupun nasional.

Pemilu dengan politik identitas jangan lagi dipandang menjadi momok de-demokratisasi Indonesia melainkan menjadi ciri khas demokrasi Indonesia yang mengakui ragam identitas dan merestuinnya untuk berkontestasi secara sehat melalui mekanisme pemilu yang demokratis. Tidak hanya aktor politik identitasnya saja sebagai subjek pemilu, tetapi juga mempromosikan nilai-nilai identitas dalam bingkai kearifan lokal yang disebarluaskan untuk secara konstruktif membangun Indonesia menjadi lebih baik. Sehingga dalam hal ini politik identitas etnis bukanlah sesuatu yang

dapat mengancam integrasi dan kesatuan, namun sebuah kearifan lokal yang universal, nilai-nilai budaya etnis yang multikultural, yang dapat menjaga harmonisasi dalam kemajemukan dan pluralitas budaya di Indonesia, juga sebagai jawaban atas krisis kepemimpinan saat ini. Fenomena ini penting untuk dikaji karena mempelajari kondisi kekinian

akan mengantarkan kita untuk dapat memprediksi apa yang terjadi di masa mendatang, tentunya untuk tujuan masyarakat yang lebih baik mencapai negara demokrasi yang sejahtera, seperti diungkap oleh John Naisbitt, *“the most reliable way to forecast the future is to try understand the present”* (Alfian, 2009).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah. U. (2002). *Politik Identitas Etnis*. Magelang: Indonesia Tera.
- Agustino, L. (2014). *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Alfian, M. A. (2009). *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Chandakirana, K. (1989). *Geertz dan Masalah Kesukuan*. Jakarta. Prisma No. 2/1969
- Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia, Sebuah Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Held, David. (2007). *Models of Democracy*. Jakarta : Akbar Tandjung Institute.
- Hikam, Muhammad AS. 1999. *Politik Kewarganegaraan : Landasan Redemokrasi di Indonesia*. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama.
- Horowitz, D. L. (1993). The Challenge of Ethnic Conflict: Democracy in Divided Societies. *Journal of Democracy* vol. 4, no. 4.
- Gandhi, L. (2006). *Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat*. Yogyakarta:Qalam
- Giddens, A. (1991). *Modernity and Self-Identity*. California: Stanford University Press.
- Kingsbury, D. (2007). *Political Development*. New York : Routledge.
- Maarif, A. Syafii. (2012). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Democracy Project.
- Maunati, Y. (2004). *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: LKiS
- Mortimer, R. (2006). *Indonesian Communism Under Soekarno: Ideology and Politics, 1959-1965*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim, K. (2015). Politik Identitas di Maluku Utara. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan Vol 11 No. 02. 2015*.
- Schultz., et.al (2001). *Anthropology: A Perspective on the Human Condition, Third Edition*. USA: St. Cloud State University
- Stets & Burke. (2000). Identity Theory and Social Identity Theory. *Social Psychology Quarterly, Vol. 63, No. 3. American Sociological Association*.
- Van Klinken, G. (2007). *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars*. London: Routledge.

## **NARASI IDENTITAS POPULIS DALAM DEMOKRASI ELEKTORAL**

**Caroline Paskarina**

*Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran/Jatinangor, Indonesia,  
caroline.paskarina@unpad.ac.id*

---

### **ABSTRACT**

*This article discusses how identity is narrated in the arena of power struggles in the context of electoral democracy. Narration of identity tends to be strengthened in various political events, including elections of regional heads. To uncover the narrative, this article uses populism as a conceptual framework. By conducting a critical literature review of the conceptualization of populism as identity politics, this article finds that identity is transformed into a form of nativism that is an expression of a majority group who feels marginalized. Politicization of identity through this populist narrative eventually tends to racist practices, and in the end would undermine the democratic order itself. The strengthening of populism which is signed by politicization of identity is a warning that needs to be responded by the change of political domination of the elite, who structurally taking advantage from the formal arrangement of liberal democracy. The electoral process needs to be balanced with the substantive change of power relation.*

### **Keywords**

Identity, Populism, Electoral Democracy

---

## ABSTRAK

*Tulisan ini membahas bagaimana identitas dinarasikan dalam arena pertarungan kuasa yang berlangsung dalam konteks demokrasi elektoral. Narasi tentang identitas cenderung menguat dalam berbagai event politik, termasuk pemilihan kepala daerah. Untuk mengungkap narasi tersebut, tulisan ini menggunakan populisme sebagai kerangka konseptual. Dengan melakukan kajian literatur terhadap konseptualisasi populisme sebagai politik identitas, tulisan ini menemukan bahwa telah terjadi pergeseran politik identitas dalam konteks populisme. Identitas dinarasikan sebagai bentuk nativisme yang merupakan ekspresi dari kelompok yang secara demografis mayoritas tapi merasa termarjinalkan. Politisasi identitas melalui narasi populis ini dalam jangka panjang beresiko mengarahkan demokrasi populer ke dalam praktik-praktik yang cenderung rasis, yang pada gilirannya melemahkan tatanan demokrasi itu sendiri. Menguatnya populisme yang ditandai dengan politisasi identitas merupakan peringatan yang perlu direspon dengan mengubah dominasi politik elit yang secara struktural diuntungkan oleh pola pengaturan formal demokrasi liberal, sehingga proses elektoral perlu diimbangi dengan perubahan relasi kekuasaan secara substantif.*

### **Kata Kunci**

Identitas, Populisme, Demokrasi Elektoral

## **1. Pendahuluan**

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 menjadi *event* politik yang paling menarik perhatian publik, terutama karena isu SARA yang demikian pekat mewarnai pertarungan antardua pasang kandidat yang masuk ke putaran kedua. Bermula dari kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Tjahaya Purnama (atau populer dengan sebutan Ahok), petahana Gubernur DKI Jakarta, yang kemudian diikuti dengan rangkaian demonstrasi yang mengatasmakan aksi pembelaan terhadap agama tertentu. Isu penistaan agama bahkan melampaui isu-isu lain yang sebenarnya lebih banyak berkaitan dengan pengelolaan urusan publik, seperti isu reklamasi, tata kota, dan

penanganan masalah-masalah sosial lainnya di Jakarta.

Menguatnya politik identitas berbasis agama dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta menjadi fenomena menarik karena muncul dalam bayang-bayang kebangkitan populisme. Dalam konteks global, kebangkitan populisme juga terjadi di berbagai belahan dunia. Karakter pemerintahan Trump di Amerika Serikat yang ingin membangkitkan kembali supremasi Amerika Serikat, dan kelanjutan dari sentimen politik Brexit akan menyuburkan tumbuhnya kembali sentimen identitas. Kecenderungan serupa juga menguat di Asia, seiring dengan kemenangan figur politisi populis dalam pemilu di India dan Filipina. Di Indonesia, menguatnya dukungan pada

kelompok Islam konservatif, seperti tampak dalam Pilkada DKI Jakarta, menjadi indikasi menguatnya populisme. Berbagai kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa kebangkitan populisme, tidak dapat dilepaskan dari politisasi identitas. Politik identitas pada awal perkembangannya dikaji sebagai suatu bentuk ekspresi perjuangan dari kelompok-kelompok minoritas untuk memperoleh pengakuan akan eksistensinya. Hal ini tergambar dari banyaknya gerakan politik identitas yang muncul sebagai bentuk perjuangan dari kelompok-kelompok etnis, agama, gender atau kelompok-kelompok kepentingan lain yang selama ini termarginalkan oleh kebijakan-kebijakan mayoritas atau kebijakan-kebijakan lain dari kelompok yang dominan. Politik identitas yang muncul sebagai perwujudan populisme, sebaliknya, justru menjadi strategi politik dari kelompok mayoritas untuk mempertahankan eksistensi dirinya.

Konteks kapitalisme global telah memunculkan bentuk-bentuk persaingan di mana kelompok mayoritas justru menjadi kelompok yang termarginalkan, sehingga berkembanglah populisme atau praktik politik populis yang muncul untuk memperjuangkan kelompok-kelompok mayoritas ketika berhadapan dengan tekanan-tekanan global (Inglehart dan Norris, 2016; Hadiz, 2016).

Seperti dikatakan Inglehart dan Norris (2016), populisme muncul karena 2 kondisi, yakni pertama, karena kesenjangan ekonomi dan yang kedua, karena pertentangan nilai-nilai budaya (kultural). Dalam konteks politik ekonomi, kalangan populis dianggap sebagai bagian dari kekuatan lama yang hendak melawan dominasi elit baru. Elit baru hendak

mendorong agenda kapitalisme modern yang berimplikasi pada peminggiran elit-elit lama yang selama ini diuntungkan dengan modus akumulasi rente. Sementara pertentangan nilai-nilai budaya menjadi pemicu populisme ketika masuknya identitas dan kebudayaan baru menyerang keberadaan nilai-nilai lama yang dianut oleh mayoritas warga, yang kemudian memicu respon balik yang reaksioner. Warga mayoritas ini merasa bahwa mereka harus mengklaim ulang kepemilikan nilai-nilai masyarakat yang ada melalui penolakan terhadap identitas baru.

Dalam konteks politik populis ini, narasi tentang identitas mengalami pergeseran. Politik identitas tidak lagi menjadi strategi dari kelompok minoritas untuk memperjuangkan eksistensinya, tetapi justru yang muncul adalah perjuangan kelompok-kelompok mayoritas berhadapan dengan kepentingan global yang terus mendesak mereka di dalam negeri. Populisme menyuarakan keterpinggiran kelompok mayoritas di tengah persaingan ekonomi dan budaya global.

Kemunculan populisme juga memicu perdebatan akademik, menyangkut dampak positif atau negatif yang dibawanya terhadap demokrasi. Kelompok yang kontra memandang populisme sebagai kondisi patologis dari perkembangan demokrasi liberal. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan sistem demokrasi terhadap perubahan relasi budaya karena globalisasi, sementara relasi kekuasaan masih didominasi oleh kekuatan lama yang masih berada dalam lingkaran kekuasaan.

Peminggiran akibat kombinasi antara dominasi pengelolaan ekonomi (kapitalisme) neoliberal yang disertai

dengan depolitisasi demokrasi liberal melalui pengerdilan ruang politik sebatas politik formal (pemilu dll), kemudian dimanfaatkan oleh elit-elit politik yang sedang bertarung dengan menggunakan retorika populis untuk mendapatkan dukungan dalam ruang demokrasi yang ada. Oleh karenanya, tidak ada yang alamiah dari identitas atau kebudayaan suatu masyarakat. Identitas menjadi konstruksi kekuasaan yang diciptakan untuk memperjuangkan eksistensi suatu entitas dalam ruang politik.

Fokus dari tulisan ini adalah mengungkapkan bagaimana identitas dinarasikan dalam konteks politik populis yang muncul dalam praktik demokrasi elektoral. Alih-alih dilihat sebagai patologi, populisme perlu ditempatkan sebagai gejala dari problem internal ekonomi-politik demokrasi yang berlaku sekarang. Karena kepentingan untuk menciptakan masyarakat pasar yang kompetitif, neoliberalisme menciptakan masyarakat yang sangat rentan karena minimalnya perlindungan negara. Kondisi kerentanan ini semakin parah ketika masyarakat tidak memiliki akses ke saluran-saluran politik formal. Struktur negara yang ada sudah semakin kebal dari kepentingan masyarakat yang terkena dampak kerentanan itu sendiri. Oleh karenanya, politik serta capaian negara yang ada menjadi sekadar sarana penguasaan segelintir kelompok elit. Hal inilah yang kemudian menciptakan kondisi material bagi tumbuhnya perasaan marah dari mereka yang terpinggirkan. Kekecewaan dan kemarahan tersebut memicu munculnya gerakan-gerakan protes bahkan perlawanan terhadap sistem politik yang elitis.

Narasi identitas dalam analisis tulisan ini menjadi bahan untuk menganalisis bagaimana kecenderungan menguatnya populisme sebagai politik identitas perlu direspon untuk mengantisipasi meluasnya kerentanan sosial, khususnya dalam menghadapi *event* pemilihan umum berikutnya.

## 2. Metode Penelitian

Tulisan ini ingin memetakan konseptualisasi populisme sebagai politik identitas melalui metode tinjauan literatur kritis. Metode ini dilakukan dengan menggunakan teknik pemetaan diskursus, yang dikembangkan oleh Sujatha Sosale (2007), khususnya untuk menyediakan kerangka kerja, metode, dan model analisis. Menurutnya, sumber-sumber untuk memetakan diskursus bisa berasal dari serangkaian teks, berupa arsip-arsip kebijakan, penerbitan-penerbitan ilmiah, laporan-laporan, dan dokumen-dokumen resmi. Kajian atas teks itu bisa memberi petunjuk untuk melihat upaya berbagai kelompok dalam periode sejarah tertentu dalam membangun apa yang disebut sebagai *selected meaning*, sekaligus untuk memeriksa gagasan-gagasan apa yang bekerja di belakangnya, juga preferensi-preferensi teoretis yang dipakainya.

Metode ini secara implisit akan dipakai sebagai panduan umum untuk memetakan diskursus populisme. Tentu saja ini adalah upaya awal untuk kajian-kajian serupa yang lebih serius di masa depan. Tulisan ini hanya akan memberikan pengantar umum khususnya untuk mendeteksi wacana-wacana besar yang sedang berkembang, dan bagaimana posisi teoretis masing-masing.



### 3. Perspektif Teori

Populisme memiliki makna yang luas, setidaknya terdapat 4 (empat) perspektif dalam menjelaskan populisme. Pertama, populisme sebagai ideologi. de Raadt, *et.al.* (2004) memahami populisme sebagai ideologi yang dianut partai politik untuk mendefinisikan siapa 'rakyat' itu dan bagaimana 'rakyat' direpresentasikan dalam program-program partai politik. Dalam konteks ini, populisme lebih dari sekedar strategi politik ataupun gaya komunikasi politik. Sebagai ideologi, populisme diterjemahkan ke dalam 3 (tiga) dimensi utama, yakni: populisme memadukan kehendak untuk memperjuangkan aspirasi 'rakyat' dengan kritik terhadap kemapanan sistem. Hal ini dilakukan dengan menuntut hubungan langsung antara para pemimpin politik dengan wargan negara (de Raadt, Hollanders, and Krouwel, 2004).

Dalam perspektif kedua, populisme dimaknai sebagai tantangan terhadap struktur yang mapan. Canovan (1999) mendefinisikan populisme sebagai keberpihakan pada 'rakyat' dalam berhadapan dengan struktur kekuasaan yang mapan serta ide-ide dan nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat. Dimensi struktural dalam relasi kekuasaan ini pada gilirannya membentuk karakteristik populisme dalam menentukan kerangka kerja yang *legitimate*, gaya politik, bahkan semangat perjuangan populisme. Populisme tidak hanya menantang para pemegang kekuasaan yang telah mapan, tetapi juga nilai-nilai yang dianut dan diterapkan oleh kalangan elit politik (Taggart, 1996 dalam Meny and Surel, 2002). Perspektif ini, pada dasarnya, memaknai populisme dalam konteks

struktural dalam melawan struktur atau rezim yang hegemonik.

Perspektif ketiga, populisme sebagai gaya komunikasi politik. Perspektif ini berangkat dari asumsi bahwa satu-satunya penciri yang sama dari berbagai gerakan populis adalah keterkaitannya dengan 'rakyat', sehingga populisme kemudian dipahami sebagai gaya politik yang dipakai untuk menjangkau berbagai kelompok sosial dan politik (Taguieff, 1995; Moffitt and Tormey, 2014; Grbeša and Šalaj, 2016). Populisme bukanlah sebuah ideologi, melainkan sekedar bahasa dan retorika politik yang intinya menghendaki kesederhanaan dan hubungan yang bersifat langsung antara pemimpin dan warga negara. Dalam perspektif ini, populisme tidak dapat dipandang sebagai ideologi karena gerakan-gerakan populis tidak memiliki pernyataan sikap yang jelas dan koheren terhadap sebagian besar isu-isu politik kontemporer dan di atas segalanya, gerakan-gerakan populis ini tidak memiliki nilai-nilai esensial, seperti kebebasan, kesetaraan, atau keadilan sosial.

Seiring dengan menurunnya peran partai politik dan perubahan di tataran global yang menciptakan ketidakpastian sosio-ekonomi dan berdampak pada keresahan sosial, muncul varian baru dari populisme. Perspektif keempat memahami populisme sebagai figur aktor atau gerakan yang mengusung isu antikemapanan dan berhasil memperoleh dukungan publik untuk membentuk pemerintahan baru. Kaum populis berhasil memobilisasi dukungan publik dengan 'menyerang' kelompok lain yang diposisikan sebagai musuh bersama, misalnya kelompok-kelompok domestik atau asing yang dituduh melakukan

eksploitasi atas sumber-sumber daya ekonomi. Di sisi lain, kelompok populis juga mendekati kaum miskin sebagai bentuk keberpihakan (Mietzner, 2015).

Dalam sejumlah kasus, para pendukung populisme telah berhasil meraih kemenangan dalam pemilihan umum dan mengisi posisi pemerintahan. Keberhasilan mereka untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan, menghadirkan praktik populisme baru, bukan sebagai ideologi yang melawan kemapanan struktur kekuasaan, tetapi sebagai figur politisi dengan dukungan populer. Mietzner (2015) menjelaskan lebih lanjut bahwa populisme baru ini lebih bersifat pragmatik ketimbang ideologi. Karenanya, populisme pragmatik ini cenderung menampilkan diri sebagai sosok yang inklusif, nonkonfrontatif, dan mendukung praktik-praktik demokratis. Ketiadaan kritik ideologis terhadap struktur kekuasaan yang mapan menjadikan populisme baru ini tampak lebih moderat ketimbang populisme yang dipahami dalam perspektif ideologis dan struktural.

Keberpihakan kepada 'rakyat' yang digaungkan oleh pengusung populisme sesungguhnya lebih merupakan bagian dari konstruksi citranya agar tampak seolah-olah menjadi pendukung praktik demokrasi karena berpihak pada masyarakat umum. Selain itu, kelompok populis juga memanfaatkan gejala ketidakpercayaan publik kepada politisi dan birokratisasi pelayanan publik sebagai klaim pembenaran atas tawaran perubahan yang berorientasi pada penyederhanaan dan kelangsungan dalam pola relasi kekuasaan. Isu-isu ini diangkat sebagai dasar untuk meraih dukungan publik melawan otoritas yang berkuasa.

Keempat perspektif di atas menunjukkan keluasan lingkup populisme secara konseptual, sekaligus kecenderungan kekinian yang berkembang dalam praktik-praktik bernuansa populis. Populisme yang bernuansa pragmatis seperti dikemukakan Mietzner (2015) memunculkan kembali perdebatan tentang kaitan populisme dan demokrasi. Panizza (2017) mempertanyakan apakah populisme menjadi masalah bagi demokrasi ataukah sesungguhnya populisme itu sendiri yang problematik karena perwujudannya yang semakin pragmatis dalam merespon perubahan global dan praktik demokrasi liberal yang cenderung meminggirkan kelompok-kelompok yang tidak memiliki posisi tawar cukup untuk berkompetisi.

Fenomena populisme kontemporer, seperti yang berkembang di Eropa dan Asia saat ini, menunjukkan kecenderungan pragmatis ketimbang ideologis. Canovan (2004) menyebutnya dengan istilah *New Populism*, yakni gerakan politik 'kanan' yang terutama mengkritisi praktik-praktik demokrasi liberal yang dilakukan partai politik dan kebijakan-kebijakan *mainstream*. Gerakan *New Populism* mengklaim dirinya sebagai representasi dari 'rakyat' sebagai pemegang kekuasaan yang *legitimate*, tetapi kepentingan kepentingan dan aspirasinya justru diabaikan oleh para politisi yang berkuasa. Klaim ini yang mendasari gerakan *New Populism* untuk bersikap pragmatis dengan menyesuaikan diri dengan aspirasi yang berkembang di sekitarnya. Posisi yang dipilih dan nilai-nilai yang diperjuangkannya bergantung pada kemapanan yang dilawannya.

Keempat perspektif teoretik tentang populisme juga menegaskan esensi gagasan populisme adalah keberpihakan

kepada 'rakyat'. Dalam konteks ini, identitas menjadi faktor penting dalam membangun posisi populisme karena populisme selalu memperhadapkan sosok diri ('rakyat') dengan sosok liyan (*the other*), antara sosok yang berkuasa dan yang tuna kuasa, bahkan antara rezim yang mapan dan yang terpinggirkan.

Sebagai politik identitas, populisme beroperasi pada tataran diskursus untuk membentuk praktik-praktik simbolis yang mempertahankan klaim-klaim identitas yang saling bertentangan dan terdislokasi (Panizza, 2017). Identitas menentukan siapa jatidiri kita, apa yang kita inginkan, bagaimana cara kita memandang diri sendiri, dan bagaimana posisi kita dalam relasi dengan orang lain. Karena itu, identitas menjadi hal yang kompleks, relasional, sekaligus tidak utuh karena sesungguhnya identitas hanyalah sebutan yang diberikan atas apa yang dikehendaki tetapi tidak sepenuhnya dapat dicapai (Panizza, 2017). Pembentukan identitas mencakup proses konstruksi pembedaan-pembedaan dan pertentangan-pertentangan untuk menentukan batasan antara '*insiders*' dan '*outsiders*', antara diri dan yang liyan.

Müller (2016) menegaskan bahwa populisme adalah selalu merupakan politik identitas, tapi sebaliknya, tidak semua politik identitas dapat dikategorikan sebagai populisme. Identitas yang dipakai dalam konteks populisme adalah identitas yang eksklusif, yang secara tegas memisahkan antara diri dan kelompok yang lain, yang kemudian menyebabkan populisme menjadi ancaman bagi demokrasi. Keyakinan yang dianut populisme bahwa identitas dan kelompoknya adalah *true citizen* atau 'rakyat' itu sendiri menjadikan identitas dan kelompok-kelompok yang

berbeda sebagai musuh dari 'rakyat', sehingga mengarah pada polarisasi bahkan konflik sosial.

Demokrasi elektoral menjadi lahan yang subur bagi tumbuhnya para politisi yang menggunakan populisme sebagai politik identitas. Isu keberpihakan pada 'rakyat', bahkan pendefinisian ulang siapa itu 'rakyat' memperoleh momentum dalam kompetisi elektoral yang berlangsung di tengah kondisi ketidakpercayaan publik yang makin meningkat terhadap institusi politik formal. Populisme dalam kompetisi elektoral tidak hanya mengusung isu-isu antikemapanan, tetapi juga memelihara sentimen perlawanan terhadap identitas yang dianggap mengancam bagi keberadaan kelompoknya. Situasi inilah yang menyebabkan kerentanan sosial semakin kuat.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Studi tentang populisme kontemporer menunjukkan bahwa populisme pada dasarnya merupakan praktik politik identitas, dalam pengertian sebagai proses pembentukan identitas 'rakyat' berhadapan dengan kelompok lain yang dianggap memarginalkan kepentingan 'rakyat'. Populisme dalam konsepsi tersebut menunjukkan wajah perlawanan yang tidak saja antikemapanan, sekaligus juga antipluralisme. Hal inilah yang membuat populisme menjadi "pisau bermata dua" bagi pertumbuhan demokrasi.

Pada bagian pembahasan ini, akan diuraikan bagaimana identitas dinarasikan dalam konteks populisme di Indonesia. Untuk memahami narasi tersebut, terlebih dahulu diuraikan konteks yang melatarbelakangi menguatnya populisme di Indonesia.

Inglehart dan Norris (2016) mengasumsikan menguatnya populisme disebabkan oleh dua hal, yakni kesenjangan ekonomi dan pertentangan kultural. Menariknya, Inglehart dan Norris (2016) berargumen bahwa kesenjangan ekonomi bukanlah faktor utama. Dukungan terhadap politisi populis ternyata tidak menunjukkan korelasi kuat dengan tingkat pengangguran, tingkat pendapatan rumah tangga atau status pekerjaan (terdidik/tidak terdidik). Dukungan terhadap populisme juga tidak berkorelasi kuat dengan perasaan subjektif tentang kerentanan ekonomi (*economic insecurity*). Di sinilah mengapa pertentangan kultural (*cultural backlash*) lebih menjelaskan fenomena dukungan atas populisme.

Kemunculan populisme di Indonesia memiliki keunikan dibandingkan di negara-negara lain. Kendati juga dipicu oleh menurunnya kepercayaan kepada institusi formal dan globalisasi yang membawa serta nilai-nilai baru dalam relasi sosial, budaya, dan ekonomi, tetapi mayoritas kandidat yang bertarung dalam proses elektoral di Indonesia membawa isu antikeamanan dan perubahan. Hal ini menarik karena membuat pemilahan antara kelompok 'rakyat' dan 'elit' menjadi samar.

Dalam pemilihan presiden 2014, ada dua kandidat yang sama-sama mencitrakan diri sebagai politisi populis, kendati mengusung isu yang berbeda. Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan bahwa sistem politik yang ada sekarang telah rusak, perekonomian dikuasai oleh asing, rakyat termarginalkan oleh kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan elit dan kroninya. Kampanyenya banyak menyerukan

keberpihakan kepada kaum miskin dan masyarakat perdesaan. Kepemimpinan yang kuat menjadi faktor penentu untuk melakukan perubahan. Prabowo menjadi figur yang merepresentasikan gagasan populisme klasik yang sepenuhnya menentang keamanan sistem yang berkuasa (Mietzner, 2015).

Joko Widodo, sebaliknya, mengusung gagasan populisme yang berbeda. Mietzner (2015) mendeskripsikan gagasan populisme versi Joko Widodo sebagai populisme teknokratis, di mana: (1) tidak ada tawaran untuk melakukan perubahan secara masif dan terstruktur terhadap sistem yang sudah ada, tetapi melakukan perubahan secara gradual dalam bingkai sistem demokrasi yang berlaku; (2) tidak ada kelompok tertentu yang dianggap sebagai lawan, bahkan yang dimunculkan adalah inklusivitas yang merangkul semua kelompok dan golongan; selain itu, (3) Jokowi cenderung tidak mengeksploitasi retorika antiasing, sebaliknya, ia memilih meningkatkan pelayanan publik untuk menjamin distribusi sumber daya yang lebih merata; dan (4) membina kedekatan hubungan personal dengan rakyat.

Di antara kedua varian populisme tersebut, populisme teknokratis yang lebih moderat tampaknya lebih mudah diterima oleh sebagian besar pemilih, sehingga Jokowi dapat meraih kemenangan dalam Pemilihan Presiden 2014. Hal ini menunjukkan bahwa kendati banyak kritik dan ketidakpuasan diarahkan terhadap praktik demokrasi populer pascareformasi, tetapi tidak sampai mengarah pada keinginan publik untuk mengubah rezim demokrasi secara total. Publik cenderung menghendaki perbaikan dalam pelayanan publik, sehingga tawaran populisme teknokratis yang berfokus pada

perbaikan tata kelola pemerintahan dalam penyediaan kebutuhan publik sehari-hari menjadi lebih mudah diterima publik ketimbang tawaran populisme klasik untuk mengembalikan kejayaan bangsa dan negara di bawah kepemimpinan yang kuat.

Di sisi lain, sifat inklusif dari populisme teknokratis justru memunculkan dilema baru dalam relasi kekuasaan. Tanpa perubahan radikal dalam sistem kekuasaan, kepentingan-kepentingan dari elit lama masih tetap ada, bahkan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemerintahan yang sekarang berlangsung. Kendati gagasan populisme teknokratis berhasil menempatkan Jokowi sebagai presiden terpilih, tetapi gagasan yang sama ternyata belum optimal untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif. Bangkitnya populisme tidak berarti berakhirnya dominasi oligarkhi atas politik seperti yang diidentifikasi oleh Robison dan Hadiz (2004) dan Winters (2013). Sebaliknya, retorika populis telah menjadi bagian dari pertarungan kekuasaan di dalam oligarki itu sendiri dan menjadi kendaraan untuk masuknya aktor-aktor politik baru ke dalam arena kekuasaan. Argumen ini memiliki implikasi penting bagi Indonesia karena kendati tuntutan populis dapat mempengaruhi bekerjanya politik oligarki, tetapi tidak terjadi pemilahan yang signifikan antara populisme dan oligarki. Populisme semata menjadi strategi untuk mempertahankan kekuasaan oligarkis melalui kompetisi demokratis (Hadiz & Robison, 2017).

Hal itu terutama terjadi karena partai politik dan koalisi temporer -- yang dibentuk untuk kepentingan elektoral -- sejak semula masih merupakan warisan dari kekuatan pasca-otoriter, sehingga tidak mengubah secara signifikan

konfigurasi dan pola relasi kekuasaan untuk mengakses dan mendistribusikan sumber-sumber daya. Konteks politik tersebut akan terus membatasi kemungkinan bagi populisme Indonesia untuk menghasilkan terobosan politik yang secara fundamental memperbaiki kesenjangan ekonomi, kekuasaan, maupun membangun kembali institusi politik yang mengalami pelemahan pascapemerintahan otoritarian.

Keterbatasan kapasitas populisme teknokratis di dalam mengubah relasi kekuasaan menyebabkan isu kesenjangan ekonomi dan pertentangan budaya (Inglehart & Norris, 2016) menjadi lahan yang potensial untuk menyuburkan politisasi identitas. Politik identitas menjadi ekspresi politik lintas kelas, di mana kepentingan tertentu dapat mendominasi sambil tetap mengklaim bahwa dirinya mengartikulasikan kehendak kolektif. Dengan demikian, berbagai jenis populisme dapat muncul, misalnya, dari pertemuan antara kepentingan elit perdesaan dan kapitalisme pasar modern atau yang melibatkan komunitas perkotaan yang termarginalkan (Hadiz & Robison, 2012).

Pertemuan berbagai kepentingan lintas kelas ini dapat menjadi legitimasi atas klaim mewakili kepentingan 'rakyat' secara umum, padahal di dalam diri identitas tersebut sesungguhnya ada kepentingan-kepentingan kelas yang saling bertentangan. Strategi ini menunjukkan bahwa populisme sebagai politik identitas dapat mengabaikan perbedaan-perbedaan yang ada antarkelompok, di mana identitas homogen dari 'rakyat' diperhadapkan dengan 'elit' atau bahkan dengan 'asing' sebagai musuh. Dengan demikian, identitas menjadi hal

yang konstruktif dan dinamis karena dapat dibentuk, bukan hanya secara ideologis maupun diskursif, tetapi juga dengan menempatkannya dalam arena pertarungan kekuasaan dan sumber daya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kepentingan yang mendasari konstruksi identitas tersebut yang pada akhirnya menentukan siapa yang 'termasuk' dan 'dikecualikan' dari definisi 'rakyat'.

Pertarungan gagasan populisme sejak masa pemilihan presiden 2014 mengindikasikan 2 (dua) jalur yang berbeda bagi masa depan Indonesia. Gagasan populisme klasik melihat kembali pentingnya institusi pengelolaan sumber daya yang didominasi oleh negara atas dasar cita-cita nasionalisme, sementara gagasan populisme teknokratis lebih berakar pada gagasan pasar dan kepentingan kelas menengah. Selain kedua gagasan tersebut, kebangkitan populisme di Indonesia juga ditandai oleh menguatnya 2 (dua) bentuk populisme berbasis Islam, yakni yang berupaya menumbuhkan kembali praktik-praktik keagamaan secara konservatif dan yang berorientasi ke masa depan di mana masyarakat dan praktik-praktik politik menyatu dengan identitas dan institusi keagamaan (Hadiz & Robison, 2017).

Menguatnya populisme berbasis agama ini merupakan respon terhadap praktik politik sekuler yang dianggap mendominasi penyelenggaraan negara (Hadiz & Robison, 2017). Di sisi lain, populisme berbasis agama juga menunjukkan pertentangan nilai, sebagai konsekuensi dari masuknya nilai-nilai baru yang dibawa globalisasi, seperti feminisme, multikulturalisme, internasionalisme, dan nilai-nilai lain yang identik

dengan *political correctness*. Fareed Zakaria mengutip Inglehart dan Norris (2016), menambahkan bahwa nilai-nilai di atas diterima oleh generasi lebih muda, tetapi membuat generasi yang lebih tua merasa tidak aman. Generasi yang lebih tua melihatnya sebagai serangan atas peradaban dan nilai-nilai yang mereka anut selama beberapa dekade. Keterbukaan global sekarang menciptakan ketidakamanan nilai-nilai lama. Hal ini kemudian menciptakan respon yang reaksioner, di mana warga mayoritas ini merasa bahwa mereka harus mengklaim ulang kepemilikan nilai-nilai masyarakat yang ada melalui penolakan terhadap identitas baru yang dianggap liyan oleh mayoritas tersebut (Perdana, 2017). Akibatnya, mereka memberikan dukungan pada partai atau politisi yang mereka anggap bisa menjaga atau nilai-nilai yang mereka anggap lebih cocok.

Dengan demikian, narasi identitas dalam populisme Indonesia muncul sebagai ekspresi dari kelompok mayoritas tapi merasa termarginalkan. Keterpinggiran tersebut disebabkan oleh pengelolaan sumber daya yang elitis dan terbatasnya ruang publik untuk melakukan kontrol atas penyelenggaraan kekuasaan oleh lembaga-lembaga formal. Kesenjangan ekonomi menjadi isu yang muncul sebagai penciri dari narasi identitas kelompok-kelompok yang termarginalkan ini, seperti yang tampak dalam politik populis yang disuarakan oleh kelompok miskin perkotaan dan kelompok buruh.

Narasi identitas dalam populisme Indonesia juga sarat dengan penggunaan narasi nativisme untuk memperkuat identitas gerakan. Identitas nativisme ini muncul sebagai pembeda dengan sosok liyan, yang tidak hanya berbeda secara

kultural tetapi juga dianggap sebagai kelompok yang menguasai sumber-sumber daya ekonomi. Karena itu, nativitas yang muncul dalam populisme tidak selalu identik dengan keaslian secara genealogis, tetapi lebih menunjuk pada kemurnian nilai yang diperjuangkan berhadapan dengan nilai-nilai baru, termasuk terhadap hibriditas nilai yang juga dipandang sebagai ancaman terhadap nilai-nilai lama.

Kecenderungan populisme untuk menarasikan identitas sebagai kontekstual, termasuk dalam mengkonstruksi identitas lintas kelas membuka ruang baru bagi pembelajaran berdemokrasi, terutama untuk mengkritisi politik populis dalam arena kompetisi elektoral yang ternyata tidak membawa perubahan fundamental pada pola relasi kekuasaan yang masih berwatak oligarkhis.

## 5. Simpulan

Ada beragam praktik populisme yang muncul sebagai respon terhadap globalisasi dan praktik demokrasi liberal. Populisme di Indonesia mengalami kecenderungan menguat sejak pemilihan presiden 2014 seiring dengan kehadiran figur kandidat yang mengusung dua gagasan populisme yang berbeda, yakni populisme klasik dan populisme teknokratis.

Populisme teknokratis yang lebih moderat dan inklusif lebih dapat diterima oleh mayoritas pemilih di Indonesia, tetapi di sisi lain, karakter inklusifnya menjebak gagasan populisme ini ke dalam praktik politik kompromistis, sehingga

tidak terjadi perubahan fundamental dalam relasi kekuasaan yang oligarkhis. Dalam konteks politik tersebut, populisme sebagai politik identitas tampil dengan menarasikan identitas sebagai simbol perlawanan dari kelompok mayoritas yang merasa termarginalkan akibat pengelolaan kekuasaan yang oligarkhis. Nativisme juga muncul dalam narasi identitas populis untuk menegaskan pemilahan posisi berhadapan dengan kelompok lawan.

Populisme mengusung gagasan keberpihakan pada 'rakyat', yang merupakan esensi dari demokrasi. Tetapi, keberpihakan ini tidak cukup karena narasi identitas dalam populisme juga dapat dikonstruksi untuk kepentingan legitimasi kekuasaan oligarkhis. Populisme yang muncul sekarang adalah buah dari politisasi faksi elit tertentu yang telah terpinggirkan dalam pertarungan politik formal. Menguatnya politik populis membuka kemungkinan untuk melawan dominasi politik elit yang secara struktural diuntungkan oleh pola pengaturan formal demokrasi liberal. Karena itu, yang diperlukan adalah menysar ketimpangan struktural yang dikritik dalam populisme mengenai sistem demokrasi. Kerentanan yang dihadapi oleh kelompok mayoritas harus diatasi dengan menciptakan agenda kesejahteraan sosial yang bersifat lintas kelas. Di sini, inklusivitas diterjemahkan bukan sebagai kompromi dengan para elit politik, tetapi sebagai perluasan keberpihakan kepada kelompok-kelompok yang menerima manfaat dari pengelolaan urusan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Canovan, M. (1999). Trust the people! Populism and the two faces of democracy". *Political Studies*, 41(1), hlm. 2-16.
- Canovan, M. (2004). Populism for political theorists? *Journal of Political Ideologies*, 9(3), hlm. 241–252. <https://doi.org/10.1080/1356931042000263500>
- de Raadt, J. Hollanders, D. & Krouwel, A. (2004, Agustus). Varieties of populism: An analysis of the programmatic character of six European parties". Diakses dari [https://www.researchgate.net/publication/238086872\\_Varieties\\_of\\_Populism\\_An\\_Analysis\\_of\\_the\\_Programmatic\\_Character\\_of\\_Six\\_European\\_Parties](https://www.researchgate.net/publication/238086872_Varieties_of_Populism_An_Analysis_of_the_Programmatic_Character_of_Six_European_Parties)
- Grbeša, M., & Šalaj, B. (2016). Textual analysis of populist discourse in 2014/2015 presidential election in Croatia". *Contemporary Southeastern Europe*, 3(1), hlm. 106-127.
- Hadiz, V. R. & Robison, R. (2012). Political economy and Islamic politics: Insights from the Indonesian case. *New Political Economy* 17(2), hlm. 137–155.
- Hadiz, V. R. (2016). *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2017). Competing populisms in post-authoritarian Indonesia. *International Political Science Review*, 38(4), hlm. 488–502. <https://doi.org/10.1177/0192512117697475>
- Inglehart, R. & Norris, P. (2016, Agustus 6). Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash". Diakses dari [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2818659](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2818659)
- Meny, Y., & Surel, Y. (Eds.). (2002). *Democracies and populist challenge*. New York: Palgrave Macmillan.
- Mietzner, M. (2015). *Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia*. *Policy Studies* (15471349). Diakses dari <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=102181521&site=ehost-live&scope=site>
- Moffitt, B., & Tormey, S. (2014). Rethinking populism: Mediatisation and political style". *Political Studies* 62(2), hlm. 381-97
- Müller, J-W. (2016). *What is populism?* Philadelphia, Pennsylvania, USA: University of Pennsylvania Press.
- Panizza, F. (2017, April 27). Is populism a problem for democracy?. Diakses dari [http://www.fesprag.cz/fileadmin/public/pdf-events/2017\\_27-2804\\_Panizza.pdf](http://www.fesprag.cz/fileadmin/public/pdf-events/2017_27-2804_Panizza.pdf)
- Perdana, A. A. (2017, Januari 23). Menguatnya populisme: Trump, Brexit hingga FPI. Diakses dari <https://indoprogress.com/2017/01/menguatnya-populisme-trump-brexite-hingga-fpi/>
- Robison, R. & Hadiz, V.R. (2004). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. London: Routledge.



- Sosale, S. (2007), *Communication, Development and Democracy: Mapping a Discourse*. New York, USA: Hampton Press.
- Taguieff, P. (1995). Political science confronts populism: from a conceptual mirage to a real problem". *Telos* 103, hlm. 9-44.
- Winters, J. A. (2013). Oligarchy and democracy in Indonesia. *Indonesia*, 96(October), hlm. 11–33.



# TEMPLATE JURNAL BAWASLU

*Jurnal Bawaslu*  
**ISSN**



*Author Name et al.*

*Vol. 1, No.2, pp. a-b, 14 November 2015 (to be filled by editorial desk)*

## **JUDUL (Font-14, Bold)**

### **Nama Tanpa Gelar 1 (Font-12, Bold)**

*Institusi, Kota/Kabupaten, Negara, Email (Font-11, Italic)*

### **Nama Tanpa Gelar 2 (Font-12, Bold)**

*Institusi, Kota/Kabupaten, Negara, Email (Font-11, Italic)*

## **ABSTRACT (Font-12, Bold)**

---

*Abstrak harus dalam 100 sampai 300 kata. Font-11, Calibri, Italic, dalam bentuk satu paragraf, berfokus pada tujuan penelitian, metodologi yang diadopsi, temuan dan kesimpulan. Gunakan 1.0 baris spasi untuk semua bagian dalam manuskrip. Semua tulisan harus ditulis dalam gaya Calibri & gunakan margin Layout Halaman Normal. Di mohon untuk TIDAK mengubah tata letak, spasi, dan huruf dalam template ini.*

### **Keywords (Font-11 Bold)**

*Pilkada, Pemilu, Bawaslu, Perilaku Pemilih, Keterwakilan (Font-11)*

---

## **ABSTRAK (Font-12, Bold)**

*Abstrak harus dalam 100 sampai 300 kata. Font-11, Calibri, Italic, dalam bentuk satu paragraf, berfokus pada tujuan penelitian, metodologi yang diadopsi, temuan dan kesimpulan. Gunakan 1.0 baris spasi untuk semua bagian dalam manuskrip. Semua tulisan harus ditulis dalam gaya Calibri & gunakan margin Layout Halaman Normal. Di mohon untuk TIDAK mengubah tata letak, spasi, dan huruf dalam template ini.*

### **Keywords (Font-11 Bold)**

*Pilkada, Pemilu, Bawaslu, Perilaku Pemilih, Keterwakilan (Font-11)*

---

## 1. Pendahuluan (Font-12, Bold)

Di mohon untuk TIDAK mengubah tata letak, spasi, dan huruf dalam template ini. Tulisan harus ditulis dalam pilihan gaya font Calibri-11 spasi baris 1.0. Panjang tulisan 3000-5000 kata. Bagian ini berisi latar belakang permasalahan, uraian permasalahan dan pertanyaan penelitian/hipotesis (bila ada). *Tidak menggunakan catatan kaki.*

### 1.1 Subbab (Font-11, Bold)

Penulisan poin-poin uraian menggunakan bullets, misalnya:

- Perumusan Misi yang diusung berdasarkan penilaian situasi,
- Penentuan kelompok target
- Cara menyampaikan pesan pada kelompok target, dan
- Pemanfaatan Modal Caleg

**Tabel 1.** *Tren Perubahan Kebijakan xx*

Tahun	UU	Kebijakan
2000	Xx	Xx
2004	xx	xx

Sumber : Bawaslu RI, 2017

## 2. Metode Penelitian (Font-12, Bold)

Bagian ini berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penulisan artikel ini. Metode peneliain meliputi, jenis metode, data apa saja yang digunakan, bagaimana cara mengumpulkan data serta bagaimana data divalidasi. *Tidak menggunakan catatan kaki.*

## 3. Perspektif Teori (Font-12, Bold)

Bagian ini berisi tentang perspektif teori yang akan digunakan. Uraikan teori secara jelas dan tepat pada sasaran. *Tidak menggunakan catatan kaki.*



**Gambar 1.** *Logo Bawaslu*

*Sumber: Bawaslu RI, 2017*

## 4. Hasil dan Pembahasan (Font-12, Bold)

Persoalan yang dianalisis dalam bagian ini harus dituliskan secara jelas, mendalam dan tajam. Dalam menganalisis penulis tidak menggunakan terlalu banyak kutipan konsep dan teori. *Tidak menggunakan catatan kaki.*

## 5. Simpulan (Font-12, Bold)

Simpulan utama dari penelitian ini disajikan dalam bentuk yang singkat. Bagian simpulan harus dapat mengarahkan pembaca pada hal yang penting dari bagian penelitian. Hal ini juga dapat diikuti oleh saran atau rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian lebih lanjut.

### Catatan:

**Kutipan tidak menggunakan Catatan Kaki. Catatan kaki hanya digunakan untuk memberikan keterangan lanjutan (jika diperlukan. Penulisan Kutipan menggunakan *running notes***

### Tata Cara Penulisan kutipan (Menggunakan format APA) :

**Struktur Kutipan :** (Nama Belakang Penulis, Tahun, hlm.1234)

**\*\***Nomor halaman dan paragraf hanya digunakan untuk pengutipan langsung, contoh:

“Well, you’re about to enter the land of the free and the brave. And I don’t know how you got

that stamp on your passport.  
The priest must know someone”  
(Tóibín, 2009, hlm. 52).

\*\*Jika hanya merujuk pada sumber (tanpa melakukan pengutipan langsung dan parafrasa), maka format nomor halaman atau paragraph tidak perlu digunakan, contoh:

Student teachers who use technology in their lessons tend to continue using technology tools throughout their teaching careers (Kent & Giles, 2017).

\*\*Jika nama penulis telah disertakan dalam paragraf, maka hanya menulis tahun terbitan, contoh:

According to a study done by Kent and Giles (2017), student teachers who use technology in their lessons tend to continue using technology tools throughout their teaching careers.

## DAFTAR PUSTAKA (FONT-12 BOLD, APA Format)\*\*

**\*\*Daftar Pustaka Ditulis Berdasarkan Urutan Abjad Dari Nama Belakang**

### Contoh penulisan:

#### 1. Buku dengan satu penulis

Dickens, C. (1942). *Great expectations*. New York, NY: Dodd, Mead.

#### 2. Buku dengan dua atau lebih penulis

Goldin, C. D., & Katz, L. F. (2008). *The race between education and technology*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

Matthews, G., Smith, Y., & Knowles, G. (2009). *Disaster management in archives, libraries and museums*. Farnham, England: Ashgate.

#### 3. Bab dalam buku dengan editorial

Struktur:

Nama belakang penulis bab, inisial nama depan. (Tahun terbit). Judul Bab. Dalam inisial nama depan editor. Inisial nama belakang editor (Ed). *Judul Buku* (hlm.00). Kota penerbit, Negara: Penerbit.

Contoh:

De Abreu, B.S. (2001). The role of media literacy education within social networking and the library. In D.E. Agosto & J. Abbas (Eds.), *Teens, libraries, and social networking* (hlm. 39-48). Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.

#### 4. Jurnal Cetak

Struktur:

Nama Belakang Penulis, Inisial Nama depan. (Tahun Terbit). Judul Artikel. *Judul Jurnal, Volume (Seri)*, rentang halaman artikel.

Contoh:

Gleditsch, N. P., Pinker, S., Thayer, B. A., Levy, J. S., & Thompson, W. R. (2013). The forum: The decline of war. *International Studies Review*, 15(3), hlm. 396-419.

#### 5. Jurnal Online dengan DOI

Stuktur:

Nama Belakang Penulis, Inisial Nama depan. (Tahun Terbit). Judul Artikel. *Judul Jurnal, Volume (edisi)*, rentang halaman artikel. <http://dx.doi.org/xxxxx>

Contoh:

Sahin, N. T., Pinker, S., Cash, S. S., Schomer, D., & Halgren, E. (2009). Sequential processing of lexical, grammatical, and phonological information within Broca's area. *Science*, 326(5951), hlm. 445-449. <http://dx.doi.org/xxxxx>

## 6. Media Cetak

Struktur:

Nama belakang, Inisial Nama Depan. (Tahun, Bulan Tanggal). Judul Artikel. *Judul Koran*, Rentang halaman.

Contoh :

Alair, C.H. (2017, September 14). Demokrasi Indonesia. *Kompas*, hlm. 3-4.

## 7. Media Online

Struktur:

Nama belakang, Inisial Nama Depan. (Tahun, Bulan Tanggal). *Judul Artikel*. Judul Koran. Diakses dari <http://xxxxxxxxxxxx>

Contoh:

Whiteside, K. (2004, August 31). College athletes want cut of action. *USA Today*. Diakses dari <http://www.usatoday.com>

## 8. Majalah Cetak

Struktur:

Nama Belakang, Inisial Nama Depan. (Tahun, Bulan). Judul Artikel. *Judul Majalah, Volume(edisi)*, rentang halaman.

Contoh:

Hasanah, R.U. (2016, Mei). Progres Pembangunan Indonesia. *Tempo*, 4-10 Mei 2016. hlm. 23-25.

## 9. Websites

Struktur:

Nama Belakang, Inisial Nama Depan. (Tahun, Bulan tanggal). Judul Artikel. Diakses dari <http://xxx>

Contoh:

Austerlitz, S. (2015, March 3). How long can a spinoff like 'Better Call Saul' last? Diakses dari <http://fivethirtyeight.com/features/how-long-can-a-spinoff-like-better-call-saul-last/>

## 10. Blogs

Struktur:

Nama Belakang, Inisial Nama Depan. (Tahun, Bulan tanggal). Judul Artikel dalam blog [Blog post]. Diakses dari <http://xxx>

Contoh:

McClintock Miller, S. (2014, January 28). Easy Bib joins the Rainbow Loom project as we dive into research with the third graders [Blog post]. Diakses dari <http://vanmeterlibraryvoice.blogspot.com>

## 11. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Struktur:

Nama Belakang, Inisial Nama Depan. (Tahun). *Judul Skripsi/Tesis/Disertasi* (Skripsi/Tesis/Disertasi). Kota, Fakultas, Universitas.

Contoh:

Idris, K. (2013). *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Orde Baru* (Disertasi). Depok, FISIP, Universitas Indonesia.

## 12. YouTube

Struktur:

Nama Belakang penulis, Inisial Nama depan. [YouTube Username]. (Tahun, Bulan, Tanggal Unggah). *Judul Video* [Video file]. Diakses dari <https://youtu.be/xxxxxxx>

Contoh:

Damien, M. [Marcelo Damien]. (2014, April 10). *Tiesto @Ultra Buenos Aires 2014 (full set)* [Video file]. Retrieved from <https://youtu.be/mr4TDnROScM>